Pustaka
cendekiamuda

PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KOMUNITAS

Ta'rif, MA.

Ta'rif, MA.

PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KOMUNITAS

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Pustaka cendekiamuda

PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KOMUNITAS

Ta'rif, MA.

Editor

Muhib Rasyidi, MA., Hum

Desain Isi dan Sampul

Raditya A. Gusti

rommy.2012@gmail.com

Penerbit

Pustaka Cendekiamuda

(Anggota IKAPI)

Jalan Otista Raya Ruko Prima Blok A-32

Ciputat Tangsel 15411

Bekerjasama dengan

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta

Cetakan Pertama: Agustus 2017

ISBN : 978-602-61574-0-9

14,5 cm x 21 cm

xiv, 262 hal.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis tanpa izin tertulis dari penerbit. (all rights reserved)

PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KOMUNITAS

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PEDOMAN TRANSLITERASI

a = ا	z = ز	f = ف
b = ب	s = س	q = ق
t = ت	sh = ش	k = ك
th = ث	s̲ = ص	l = ل
j = ج	d̲ = ض	m = م
h̲ = ح	t̲ = ط	n = ن
kh = خ	z̲ = ظ	h = ه
d = د	‘ = ع	w = و
dh = ذ	gh = غ	y = ي
r = ر		

Vokal Pendek

- *a* = ـَ ; *i* = ـِ ; *u* = ـُ

Vokal Panjang

- Bunyi a panjang ditulis *ā* (فلا = *falā*), bunyi *i* panjang ditulis *ī* (خليفة = *khalīfa*), dan *u* panjang ditulis *ū* (شورى = *shūrā*), masing-masing dengan ‘garis’ (-) di atasnya.
- Bunyi Rangkap: ay = اي ; aw = او

Ta Marbūta di akhir kata:

- Bila dimatikan tidak ditulis: خليفة *khalīfa* bukan *khalīfah*
  Kata ini tidak perlakukan terhdap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: zakat, shalat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
- Apabila diikuti oleh kata benda (*ism*), maka ia menjadi (*t*): وحدة الوجود *wahdat al-wujūd* bukan *wahda al-wujūd*

Kata Sandang

- Kata sandang, yang dilambangkan dengan huruf (ال), menjadi (*l*), baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan *qamariyyah*: *al-rijāl* bukan *ar-rijāl, al-diwān* bukan *ad-diwān.*

PERPUSTAKAAN
BALITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., atas selesainya penyusunan dan pencetakan buku-buku Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2017. Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi dan publikasi pengembangan hasil-hasil penelitian dan kajian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pada kesempatan ini Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan berhasil menerbitkan buku sebanyak 13 judul. Diharapkan bacaan dari buku-buku ini dapat menjadi bahan, referensi, untuk perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja Kementerian Agama dan stakeholder Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Hal itu sesuai dengan tugas dan fungsi Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan yaitu melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual dan strategis yang berkembang di pendidikan agama dan keagamaan, baik formal maupun non-formal. Salah satu bentuk pertanggungjawaban public kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan baik oleh institusi maupun perorangan adalah sosialisasi hasil reset (publikasi). Karena itu untuk mengemban amanah aparatur negara yang telah menggunakan anggaran negara, maka melakukan publikasi hasil penelitian dan pengembangan menjadi sesuatu yang mutlak perlu dilakukan.

Publikasi merupakan kegiatan menyampaikan, mendiseminasikan, menyebarkan dan mensosialisasikan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

hasil penelitian dan pengembangan, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara peneliti dengan masyarakat pengguna hasil penelitian dan pengembangan atau pihak yang berkepentingan, baik lembaga, masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum (Pedoman Penjaminan Mutu [Quality Assurance] Penelitian Pendidikan Agama: 87).

Atas telah terpublikasinya buku ini, kami berharap bacaan yang ada didalamnya dapat dijadikan bahan bacaan oleh para pembaca dan pembuat serta perumus kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan.. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kami menyadari bahwa *"tak ada gading yang tak retak,"* maka kehadiran buku masih terdapat kekurangan di sana sini. Untuk itu kami terbuka untuk menerima masukan dan mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan yang akan kami upayakan menjadi bahan penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Atas kontribusi segenap pihak atas penerbitan buku ini dan kemungkinan penyempuyrnaan ke depan, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan agama dan keagamaan dan mempersiapkan generasi bangsa yang berkarakter. Semoga bermanfaat.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Jakarta, Agustus 2017
Kepala Puslitbang
Pendidikan Agama dan Keagamaan,

Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA.

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, segala puja dan puji kami panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan inayahNya sehingga penulis ditengah-tengah kesibukannya masih dapat menyelesaikan S H Q X O L V D Q E X N X E L E diberi judul Pendidikan Islam Berbasis Komunitas

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Buku dihadapan pembaca ini merupakan kumpulan dari berbagai tulisan penulis yang diolah dari hasil laporan penelitian selama bekerja sebagai peneliti di bidang pendidikan keagamaan nonformal dan informal pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Selain itu, tulisan buku ini juga diolah dari beberapa tulisan penulis yang telah diterbitkan dalam Jurnal Edukasi. Hadirnya buku ini diharapkan menjadi dorongan penulis untuk selalu berkarya dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia.

Isi buku ini terbagi ke dalam tujuh tema. Bagian pertama membahas tentang Geliat Keagamaan Pesantren Lembaga Pemasyarakatan Cianjur; Bagian Kedua membahas tentang Pemberdayaan Perempuan pada Komunitas Majelis Taklim; Bagian Ketiga menguraikan tentang Pesantren APIK Kaliwungu Kendal Melawan Arus Pendidikan Global; Bagian Keempat membahas Pembinaan Pendidikan Anak Jalanan di Pesantren Fathul Khair Cimanggis Depok; Bagian Kelima menguraikan tentang Formulasi Keberagamaan Muslim Minoritas di Tabanan Bali; Bagian Keenam menguraikan tentang Merancang Masa Depan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini; dan yang terahir Bagian Ketujuh mengkaji tentang Belajar Pendidikan Islam Alternatif Pada SD Plus Islamic Center Manado

Penulis menyadari dibalik tersusunnya buku ini berkat adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak baik secara material maupun spiritual, sehinga hambatan dan rintangan dapat teratasi. Penulis sampaikan ucapan terimaksih kepada Bapak Dr. Hamdar Arraiyah, M.Ag selaku Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Dr. Muh. Murtadlo, M.Ag sebagai Kepala Bidang Litbang Pendidikan Nonformal dan Informal; Husen Hasan Basri, M.Si dan para peneliti di Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menjadi teman setia dalam berdiskusi, koreksi dan motivasi bagi penulis, demikian pula para tenaga Litkayasa dan Tenaga Administrasi di lingkungan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang selalu mendukung dalam kegiatan penelitian penulis.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Kepada Muhib Rosyidi, MA., Hum. yang bersedia mengedit tulisan sehingga menjadi sebuah buku yang enak dibaca. Semoga menjadi amal baik di dunia dan akhirat. Secara khusus penghargaan diberikan kepada Istriku yang selalu memberikan motivasi dan mendukung perjalanan karir maupun dalam mengarungi kehidupan bersama disaat suka maupun duka. Tidak lupa kepada ketiga anakku Azka, Fajar dan Naava yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat dan kehangatan dalam keluarga. Semoga Allah memberikan yang terbaik, berkah dan manfaat di dunia dan akhirat.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari buku ini masih terdapat beberapa kekurangan, untuk itu demi penyempurnaan buku ini, saran dan kritik membangun bagi pembaca semuanya penulis harapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca semuanya. Amin

Jakarta, November 2016

Penulis

Ta'rief

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG
PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN v
PENGANTAR PENULIS vii
DAFTAR ISI xi

Bagian-1
GELIAT KEAGAMAAN PESANTREN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS) 3
- Dari Sistem Kepenjaraan Menjadi Sistem Pemasyarakatan 7
- Pendirian Pesantren Terpadu At-Taubah
  Lapas Kelas II B Cianjur 13
- Tujuan Pendirian dan Struktur Organisasi 16
- Kurikulum dan Kegiatan Pengajaran 18
- Tenaga Pengajar atau Ustadz 22
- Santri /Warga Binaan 24
- Sarana dan Prasarana 30
- Dampak Pembinaan Pesantren 30
- Menakar Pesantren sebagai Model Pembinaan Lapas 31

Bagian-2
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA KOMUNITAS
MAJELIS TAKLIM 39
- Majelis Taklim dan Pemberdayaan Perempuan 43
- Potret Keagamaan di Kabupaten Bogor 47
- Majelis Taklim an-Nur Cibinong 48
- Tenaga Pengajar (Ustadz) dan Jamaah 51
- Kurikulum dan Materi Pembinaan 53
- Majelis Taklim an-Nur: Prototype
  Pemberdayaan Perempuan 55

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Bagian-3

PESANTREN APIK KALIWUNGU KENDAL
MELAWAN ARUS PENDIDIKAN GLOBAL 67
- Potret Pondok Pesantren APIK Kaliwungu 70
- Pengelolaan Pesantren 73
- Penopang Kegiatan Pesantren 75
- [illegible] Pengajar Unggul Pesantren 77
- Santri Kauman dan Non Kauman 80
- Kurikulum: Perpaduan Sistem Pengajaran Klasikal dan Non-Klasikal 81
- Ekstrakurikuler: Wahana Pengembangan Minat dan Bakat Santri 92
- Penguatan Metode Pengajaran 95
- Sistem Evaluasi dan Penilaian Santri 100
- Mobilitas Alumni Pesantren 102
- Menimbang Peran dan Fungsi Pondok Pesantren APIK Kaliwungu 103
- Fungsi pesantren dalam [illegible] 104
- Peran Pesantren dalam Memelihara Tradisi Islam ([illegible]) 105

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Bagian-4

PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK JALANAN
DI PESANTREN FATHUL KHAIR CIMANGGIS DEPOK 113
- Pesantren dan Pendidikan Terpadu Anak Harapan 117
- Potret Pesantren Fathul Khair Cimanggis 121
- Kegiatan Pendidikan 123
- Pengelolaan Pendidikan 129
- Sarana dan Prasarana 133
- Sumber Pembiayaan 134

- Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu Anak Usia Harapan 135
- Bentuk Pendidikan yang Diikuti 138
- Faktor Pendukung dan Kendala 142

Bagian-5

FORMULASI KEBERAGAMAAN MUSLIM MINORITAS DI TABANAN BALI 151

- Layanan Pendidikan Minoritas 154
- Potret Minoritas Muslim Tabanan 157
- Potret Pendidikan Keagamaan Tabanan 162
- Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz 163
- Madrasah Diniyah (MD) Miftahul Huda 167
- Pelayanan Pendidikan Keagamaan Minoritas 168
- Harapan Pelayan Pendidikan Keagamaan 177
- Bentuk Lembaga Pendidikan Keagamaan 178
- Jenis Pendidikan Keagamaan 180
- Sarana Prasarana 181

Bagian-5

MERANCANG MASA DEPAN MODEL PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI 185

- Perkembangan LPAAUD 189
- Capaian Pelayanan Pendidikan Al-Qur'an 192
- Santri 194
- Tujuan dan Kurikulum 195
- Lama Belajar dan Waktu Penyelenggaraan 197
- Guru atau Ustadz 199
- Pembinaan TKA/TPA 203
- Aspek-Aspek yang Perlu Dikembangkan 204

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Bagian-6

BELAJAR PENDIDIKAN ISLAM ALTERNATIF PADA SD PLUS ISLAMIC CENTER MANADO 213
- Pendidikan Agama Islam Alternatif 216
- Merespon Kegelisahan Umat 221
- Penawaran Kurikulum Integratif 227
- Rekruitmen Pimpinan, Pendidik dan Peserta Didik 230
- Pengembangan Inovasi Pembelajaran 232
- Penguatan Jaringan Kelembagaan 234
- Peluang dan Tantangan 236

DAFTAR PUSTAKA 245
INDEKS 255
GLOSARIUM 257
BIODATA PENULIS 260

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

1 Geliat Keagamaan Pesantren Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) Cianjur

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Geliat Keagamaan Pesantren Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)[1]

Ketika penjara berubah menjadi pesantren, ia bukanlah tempat menghinakan yang menjauhkan manusia dari keramaian, melainkan tempat pembinaan kepribadian, keimanan, dan intelektual sebagaimana ulat yang terpenjara di kepompong untuk kelak menjadi kupu-kupu.

Semenjak ditetapkannya Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, masalah pembinaan narapidana di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dari sistem kepenjaraan yang mengacu pada Reglemen Penjara 1917 No.708 kepada sistem pemasyarakatan. Istilah penjara dengan sistem kepenjaraan yang dulunya terkesan angker dan sangar sebagai tempat hukuman itu kini menjadi terdengar lebih 'ramah'

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

1 Tulisan ini merupakan hasil Kolaborasi bersama dengan Husen Hasan Basri, pernah dipublikasikan di Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Volume 13, Nomor 3, Desember 2015.

dan 'manusiawi' setelah diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan. Sebutan narapidana pun diganti dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dalam UU tersebut, sistem pemasyarakatan dimaksudkan sebagai upaya yang menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan (narapidana) yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.[2]

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Dengan prinsip pembinaan, pendidikan, dan bimbingan, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi diperlakukan sebagai pihak terhukum yang layak untuk dikucilkan, dihukum dan disiksa, tetapi mereka kini menjadi seperti 'anak didik' yang diberikan pendidikan, pembinaan

2 UU no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Penjelasan PP no. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

dan bimbingan. Hak-hak warga binaan sebagai warga negara dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan UU tersebut tetap terjaga.[3]

Sebagai bentuk implementasi dan prosedur teknis pelaksanaan, UU No. 12 Tahun 1995 kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini, tata cara pemenuhan hak warga binaan dijelaskan secara detail. Misalnya, hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, Pasal 6 menjelaskan bahwa untuk memenuhi hak pendidikan rohani warga binaan, pihak lembaga permasyarakatan (Lapas) harus menyediakan petugas pembina dan pembimbing rohani dan pendidikan budi pekerti juga terkait hak warga binaan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pasal 10

3 Setidaknya ada empat belas macam hak warga binaan yang termaktub didalam UU tersebut, yakni hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; dan mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, juga ada hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat pasal 14 UU no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

PP ini menyebutkan bahwa disamping menyediakan tenaga pendidik, pihak Lapas juga dianjurkan untuk menjalin kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan guna optimalisasi pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran warga binaan.

Salah satu bentuk pembinaan yang cukup vital bagi warga binaan adalah pembinaan dan bimbingan kerohanian, serta pendidikan agama. Hal ini terutama karena kesiapan warga binaan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dan kemungkinan tidak mengulangi tindak kejahatan yang telah dilakukannya sangat tergantung dari bagaimana proses pembinaan dan bimbingan mental kerohanian yang ia jalani selama di dalam Lapas. Dalam upaya optimalisasi pembinaan dan bimbingan mental kerohanian ini, banyak model yang dilakukan pihak Lapas. Salah satu model yang dikembangkan pihak Lapas dalam pembinaan mental rohani (pembinaan kepribadiaan) warga binaan adalah melalui penyelenggaraan pesantren. Salah satu—mungkin satu-satunya—Lapas yang menyelenggarakan model pesantren adalah Lapas Kelas II B Cianjur.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur, Tri Saptono Sambudji, kehadiran pondok pesantren di Lapas merupakan bagian dari pembinaan para narapidana yang kelak akan kembali ke lingkungan masyarakat.[4] Keberadaan pesantren di Lapas Kelas II B Cianjur mendapat respon positif dari berbagai kalangan,

4 Wawancara dengan Mastur SH, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas kelas II B Cianjur, pada 4 Februari 2013.

karena model Pondok Pesantren Terpadu at-Taubah di Lapas tersebut cukup berhasil. Keberhasilan pengelolaan pembinaan narapidana itu menginspirasi Menteri Agama saat itu, Surya Dharma Ali, untuk mendorong pembangunan pondok pesantren di lingkungan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Sebab, sebagai tempat pembinaan, akan lengkap peran dan fungsi penjara sebagai pembinaan narapidana dalam konteks keagamaan dan keimanan.

Gagasan pondok pesantren at-Taubah Lapas kelas II B Cianjur dapat dijadikan model untuk diterapkan di Lapas lainnya perlu diterjemahkan dalam bentuk yang kongkrit dan implementatif. Ketika kasus pesantren at-Taubah ini diimplementasikan muncul beberapa permasalahan, yaitu: *pertama,* terkait dengan posisi pesantren di Lapas. Di manakah letak posisi pesantren dalam institusi Lapas? Apakah terpisah atau terintegrasi dengan program pembinaan Lapas. *Kedua,* permasalahan yang terkait penyelenggaran pendidikan agama di pesantren at-Taubah. Permasalahan ini terkait dengan potret pendidikan di pesantren at-Taubah, meliputi penggagas, pengasuh atau pengajar, santri, kurikulum dan model pembelajaran, sarana prasarana, serta pembiayaan.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Dari Sistem Kepenjaraan Menjadi Sistem Pemasyarakatan

Penghapusan sistem kepenjaraan oleh sistem pemasyarakatan menjadikan perlakukan terhadap narapidana bersifat membina dan mendidik. Tujuan sistem pemasya-

rakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 menegaskan bahwa:

"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".[5]

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam penjelasan Undang-Undang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" pada Pasal 3 adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana sebagai anak didik

5 Lihat *UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 2.*

pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana sebagai Anak Didik Pemasyarakatan.

Menurut A. Fuad Usfa sebagaimana yang dikutip Yuanita, teori pembinaan lebih mengutamakan perhatian pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya supaya ia cenderung mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.[6]

HAK CIPTA DILINDUNGI
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Dengan menggunakan konsepsi pembinaan, Yuanita mengkaji pembinaan nara pidana melalui pendidikan

6 Lihat Rani Yuanita. 2011. *Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan Agama sebagai Upaya Mencegah Munculnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.* Disertasi Fakultas Ilmu Sosial UNY.

agama di Lapas Narkotika Yogyakarta. Kajian itu menyimpulkan: *pertama*, kegiatan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama sebagai upaya mencegah munculnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dilakukan melalui kerja sama dengan Kementrian Agama Kabupaten Sleman dan pondok pesantren.

Kedua, terdapat kendala internal dan eksternal pembinaan narapidana melalui pendidikan agama. Kendala internal yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta, berupa kendala internal fisik dan non fisik. Kendala eksternal yang berasal dari pihak luar, yaitu ketika narapidana bebas dari lembaga pemasyarakatan dimungkinkan kembali ke lingkungan penyalahguna narkotika seperti semula sedangkan pengawasan hanya pada saat narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan..

Ketiga, upaya Lapas Narkotika Yogyakarta untuk mengatasi kendala internal yaitu dengan pengadaan buku-buku keagamaan dan mempercepat proses administrasi pengadaan kelas; penyediaan waktu khusus bagi narapidana untuk berkunjung ke perpustakaan dan meningkatkan kesadaran narapidana dalam mengikuti pembinaan dengan mengoptimalkan penyadaran dalam setiap pembinaan yang dilakukan; melakukan pendekatan khusus kepada narapidana di luar pembinaan secara umum; melakukan perencanaan pembuatan kurikulum, menggunakan pendekatan personal kepada narapidana perempuan, menggunakan pendekatan konseling, media

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

poster/gambar, serta penyediaan fasilitas perpustakaan, bekerjasama dengan instansi/Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak-banyaknya; upaya diskusi antara Kasubsi Bidang Pembinaan dan Kasubsi Bidang Keamanan; dan penegakan komitmen petugas.

Sedangkan untuk mengatasi kendala eksternal yaitu dengan memutus ketergantungan terhadap narkotika melalui rehabilitasi, pembinaan dan pencegahan pemakaian narkotika di dalam Lapas; serta melakukan kerjasama dengan aparat hukum dan instansi lain yang terkait.[7]

Jika hasil kajian Yuanita menempatkan lembaga pesantren berada di luar Lapas dan sebagai *partner* Lapas, maka pesantren at-Taubah di Lapas kelas II B Cianjur berada di dalam Lapas sendiri. Eksistensi pesantren di Lapas dapat dikatakan sebagai fenomena baru. Sebagai sebuah lembaga pendidikan dan keagamaan, pesantren at-Taubah Lapas kelas II B Cianjur memiliki peran-peran kependidikan dan keagamaan.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur berdiri sejak tahun 1951. Semula beralamat di jalan Siliwangi. Kemudian pada tahun 1958 pindah ke jalan Aria Cikondang No. 75 Cianjur. Sebelum menjadi Lapas, ia adalah Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas II B Cianjur. Perubahan status Rutan menjadi Lapas terhitung mulai tanggal 16 April 2003. Lapas Kelas II B Cianjur menempati lahan seluas 15.500 m^2 dengan luas bangunan 2.560 m^2. Daya

7 *Ibid.*

tampung 500 orang dan saat ini menampung 870 warga binaan.

Perubahan status Rutan ke Lapas ini berdampak pada perubahan penanganan kepada narapidana, dari hukuman kepada pembinaan. Maka, narapidana tidak disebut sebagai orang-orang terhukum melainkan warga binaan dengan fokus pada pembinaan mental, pendidikan dan keterampilan kerja.

Pembinaan, bimbingan, dan pendidikan mental di Lapas Kelas II B diselenggarakan oleh Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Sie BIMKEMAS) di bawah koordinasi Kepala Bagian Pembinaan Narapidana/Warga Binaan/Anak Didik. Sie BIMKEMAS selanjutnya menugaskan dua orang petugas Bimbingan Mental (Bintal) untuk urusan teknis pelaksanaannya. Bintal inilah yang sesungguhnya menjadi ujung tombak dan berada di garis depan yang paling menentukan berhasil tidaknya segala proses pelaksanaan bimbingan mental kerohanian. Demi optimalisasi capaian target pembinaan dan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan Kementerian Agama, kepolisian dan BNN, serta mubaligh untuk membantu kinerja petugas Bintal.

Mereka memberi penyuluhan dalam bentuk ceramah umum selama dua jam setiap minggu. Materi yang disampaikan sesuai kelembagaan masing-masing. Kementrian

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Agama memberikan pembinaan dalam hal keagamaan, Kepolisian memberikan pembinaan dalam kamtibmas, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan penyuluhan tentang bahaya narkotika.

Seiring perkembangan peningkatan pelayanan pembinaan warga binaan Lapas dan antusiasme warga binaan yang mengikuti program pembinaan kegamaan tersebut, muncullah gagasan untuk meningkatkan proses pembinaan dengan membuat semacam pusat pembinaan sehingga yang dulunya dilakukan secara kuantitas jarang menjadi tinggi intensitasnya dalam tiga bentuk pembinaan, yaitu: pembinaan keperibadian seperti pesantren terpadu at-Taubah, pembinaan kemandirian seperti keterampilan, dan pembinaan intelektual seperti program Paket B dan Paket C.

Pendirian Pesantren Terpadu At-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur

Pesantren Terpadu at-Taubah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Cianjur didirikan pada tanggal 20 Mei 2012. Penggagas awalnya dua orang, yakni narapidana atau warga binaan yang berinisial HS dan Deden Hendra SH, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Regristrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan. Gagasan ini dilatari oleh kegelisahaan akan pendekatan kekerasan dalam pembinaan yang dirasakan oleh warga binaan. Serta inefektivitas pengajian yang dilakukan dua minggu sekali dalam bentuk majelis ta'lim. Gagasan ini kemudian disampaikan kepada Kepala Lapas saat itu, Sahad Philip Parapat. Meskipun Kepala Lapas seorang Katolik, ia menyetujui urgensi pendirian

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

pesantren sebagai upaya pembinaan terpadu.

Kebutuhan akan pendirian pesantren juga didasari oleh kegelisahan Deden Hendra yang melihat kesungguhan Dewan Gereja Cianjur dalam membina narapidana Nasrani. Setiap sabtu, sebanyak 15 perwakilan Dewan Gereja yang membina 9 orang narapidana Nasrani. Sementara pembinaan atas sebagian besar warga binaan muslim hanya terhenti pada majelis taklim seminggu dua kali. Maksimalitas pembinaan dari para pemuka Nasrani dan minimalitas pembinaan kaum muslim inilah yang membuahkan gagasan pendirian pesantren. Saat ini, masih terdapat satu warga binaan Nahsrani yang tetap mendapatkan hak pembinaan keagamaan dari Dewan Gereja.

Di dalam proses pendirian pesantren, faktor HS sangat signifikan. Sebab dialah penggagas dan motor penggerak ide adanya pembinaan agama yang lebih baik. HS sendiri mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPRD Cianjur yang masuk Lapas akibat tersandung kasus korupsi. Ia divonis 7,5 tahun penjara dan sampai saat ini telah menjalani hukuman selama 3,5 tahun. Karena kasus korupsi yang menimpanya bersifat struktural-kebijakan, maka keberadaan HS di Lapas mendapat perhatian siginifikan dari teman-temannya. Dengan posisi strategis itu, HS masih memiliki hubungan baik sehingga bisa mengupayakan alokasi dana bagi pendirian pesantren Lapas, baik dari pemerintah daerah maupun DPRD. Menariknya, ia menderivasikan alokasi

para pengajar yang mau mengajar di pesantren ini.

Berdasarkan keputusan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur Nomor: Kd.10.03/ PP.007/687/2012, tanggal 17 September 2012, pesantren ini mendapat pengakuan dari Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren 510032030007. Artinya, lembaga yang menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan di Lapas ini telah menjadi pesantren yang memiliki legal formal resmi.

Pesantren at-Taubah disebut sebagai Pesantren Terpadu karena ia terpadu dengan pembinaan di Lapas secara integral. Artinya tidak ada pemisahan antara pembinaan kepribadian yang di dalamnya pendidikan pesantren dengan pembinaan lain, yang menyebabkan kesatuan antara lembaga pesantren dan Lapas itu sendiri. Keterpaduan ini bisa dilihat dari keterpaduan pembinaan kepribadian (pesantren), pembinaan kemandirian dan pembinaan intelektual yang terlihat dalam kegiatan santri/warga binaan.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Tujuan Pendirian dan Struktur Organisasi

Tujuan jangka panjang pendirian pesantren adalah:

a) Menjadikan Lapas Cianjur sebagai Lapas Pusat Pendidikan Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP baik intern maupun ekstern Lapas Cianjur,
b) Menghasilkan Ex-WBP (setelah Napi bebas dari penjara) yang mempunyai pengetahuan tentang Agama Islam dan menjadi Pelopor Deradikalisasi di

masyarakat,

c) Membangun stigma positif terhadap Lembaga Pemasyarakatan, WBP dan Ex-WBP dan
d) Ex-WBP mudah diterima masyarakat karena terjadi transformasi jiwa, Ex-WBP bisa menjadi panutan masyarakat (contoh : Ex-WBP memiliki sertifikat dengan kompetensi mampu membaca al-Qur'an, memahami Fiqih, Nahwu dan lain-lain).

Adapun tujuan jangka pendek pendirian pesantren adalah:

a) Terwujudnya peserta binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar,
b) Terwujudnya peserta binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang mampu membaca Kitab Kuning,
c) Terwujudnya peserta binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang taat menjalankan ibadah yang wajib dan sunat, dan
d) Terwujudnya peserta binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang mampu mendakwahkan Islam kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat pada umumnya.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN KOMINFO RI

Struktur Organisasi Pesantren Terpadu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur diisi oleh orang-orang Pemda, MUI, dan Lapas. Struktur organisasi pesantren terdiri dari: Dewan Pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, pembina, dan rois santri. Dewan Pembina terdiri dari Bupati, Ketua DPRD,

Kepala Lapas, Ketua MUI, dan para kyai. Dalam pengurus pelaksana terdiri dari pihak MUI, Lapas, dan warga binaan. Warga binaan dipimpin oleh seorang yang disebut rois.

Struktur organisasi pesantren at-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur saat ini adalah sebagai berikut: ‡ ™ ƒ •‡ • „ ‹ • ƒ terdiri dari : Bupati Kabupaten Cianjur, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cianjur, Ketua MUI Kabupaten Cianjur, KH. Inggi Badru Zaman, KH. Abdul Qodir Rozi, KH. M Yahya Soleh, H. Ahmad Yani, S.IP., H. Yosep Umar, SH, MM.

Sementara itu kepengurusan harian adalah : KH. Totoy Mukhtar Gozali, S.Sy (Ketua), Mastur, Amd.IP, SH. MM. (Wakil Ketua), Drs. Nanang Gojali, M.Ag. (Sekretaris), Deden Hendra, SH. (Wk. Sekretaris), Suhandi, S.Pd.I. (Bendahara), Para Ustad/Assatid (Pembina), Heri Sukirman, SH. (Rois/Kepala santri Pemasyarakatan).

Kurikulum dan Kegiatan Pengajaran

Tidak ada kurikulum resmi yang digunakan. Para pembina pesantren membuat kurikulum sendiri. Secara umum kurikulum yang digunakan mengacu kepada kurikulum Iqra dan pesantren Mifathul Huda Manonjaya Tasikmalaya. Untuk kelompok A difokuskan kepada materi Baca Tulis al-Qu'ran dan praktek shalat, dan untuk kelompok B difokuskan kepada materi Aqidah, Ibadah dan Mua'amalah, serta Nahwu dan Sharaf. Buku yang digunakan adalah buku iqra karangan ustadz As'ad Humam. Sedangkan buku yang digunakan untuk kelompok B adalah kitab-kitab kuning. Selain itu digunakan buku

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Satuan Pelajaran Madrasah Diniyah Hamida. Satuan pelajaran ini disusun oleh Departemen Pendidikan Hamida Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya. Satuan Pelajaran ini terdiri dari Tauhid, Syahadatain, Fiqih, Al-Qur'an, Tarikh dan Akhlak.

Tauhid meliputi: *Aqāid Īmān*, Sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah, Sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Syahadatain meliputi: bacaan syahadatain, ma'rifat, *tasdiq*, *shigah al-tasdiq*, rukun Islam, dan rukun Iman. Fiqih meliputi:bersuci, wudhu, rukun shalat, rakaat shalat, dan praktek wudhu dan shalat. Al-Qur'an meliputi: membaca dan menulis al-Qur'an dan hafalan. Tarikh meliputi sejarah rasul. Akhlak meliput: akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, dam doa-doa pesantren.

Kelompok B juga menggunakan kitab kuning. Untuk materi Aqidah digunakan kitab *Tijān al-Dirāri,* materi ibadah digunakan kitab *Safīnah al-Najāh,* dan materi nahwu sharaf digunakan kitab *Nahwu al-Wādih.*

Kegiatan belajar yang ada dalam rangka pembinaan bersifat terpadu, antara pembinaan pesantren dan pelatihan *life skill*. Kelompok A berjumlah 17 kelompok. Serta Kelompok B, yang telah lulus BTQ dan praktik ibadah, mengaji aqidah, syari'ah dan akhlaq. Kelompok B terdiri dari 8 kelompok. Namun secara garis besar, di dalam pengajian BTQ selalu diselipkan ajaran aqidah, syari'ah dan akhlaq sebagai pondasi dari pembinaan keagamaan. Pengajian formal ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu dan Kamis, pukul 08.00 – 10.00 menjelang siang. Pengajian formal lainnya bersifat kolektif. Yakni *istigāstah* bersama

PUSLITBANG LEKNAS
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

setiap hari Selasa pagi di Masjid At-Taubah. *Istigāsah* diawali dengan shalat duha, dzikir *istigāsah* dan diakhiri *tausiyah* dari pimpinan pesantren, Kiai T. Mochtar Ghazali. Pengajian kolektif yang bersifat ritual *murāqabah* juga dilakukan setiap malam jum'at dalam bentuk *riyādah*; shalat hajat dan membaca Surat Yasin berjama'ah.

Sore hari diisi dengan pembinaan *life skill,* seperti menjahit, pembuatan meubelair, tata boga dan pendidikan dalam bentuk PKBM Paket B, C dan KF. Bagi yang tidak ikut kursus pembinaan, sering melakukan pendalaman pengajian di kamar-kamar, khususnya pendalaman membaca al-Qur'an.

Dalam rangka pembinaan, Pesantren at-Taubah mewajibkan setiap warga binaan untuk mampu membaca al-Qur'an dan menghafal 10 surat pendek. Kemampuan ini menjadi syarat bagi penerimaan remisi, Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Dengan pola pembelajaran bersifat formal dan informal, Pesantren at-Taubah telah mampu mengubah Lapas menjadi pesantren. Hal ini berdampak signifikan bagi para santri. Manfaat nyata dari pengajian pesantren terlihat dalam kemampuan membaca al-Qur'an dan praktik ibadah, terutama shalat. Sebab hampir 70% warga binaan tidak bisa shalat ketika kali pertama masuk Lapas, dan 97% tidak bisa membaca al-Qur'an. Saat ini setelah mengalami pembelajaran kepesantrenan, presentasi tersebut berbalik. Hal ini terlihat dari antusiasme para santri untuk shalat berjamaah. Untuk Dzuhur dan Ashar berjama'ah di masjid. Sementara Maghrib, isya', dan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

subuh berjama'ah di kamar masing-masing. Di setiap kamar terdapat imam shalat, mu'adzin dan kepala kamar, sehingga setiap menjelang shalat Maghrib, Isya' dan Subuh, selalu terdengar adzan bersahutan dari setiap kamar. Shalat jama'ah di masjidpun menggambarkan fenomena yang fenomenal. Hampir satu jam sebelum shalat, para santri telah memenuhi masjid dan membanjiri hingga di halaman masjid.

Selain kemampuan membaca al-Qur'an, Pesantren at-Taubah juga telah melahirkan para santri yang hendak menghafal al-Qur'an. Saat ini sudah ada 4 santri yang sedang menghafal al-Qur'an. Rata-rata mereka telah mencapai juz 2 hingga juz 3. Selain proses tahfidz, juga terdapat 6 santri yang memperdalam seni baca al-Qu'ran, dan group nasyid dalam rangka pengembangan seni Islam. Keberhasilan pesantren menumbuhkan semangat menghafal al-Qur'an merupakan titik puncak keberhasilan pembelajaran, sebab ia menggambarkan titik nadir kesadaran para santri.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Jika dirangkum keterpaduan antara kegiatan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pembinaan intelektual adalah sebagai berikut: *Pertama* : kegiatan mengaji setiap Senin, Rabu dan Kamis pukul 08.00-10.00, bentuk kegiatannya adalah : a) Baca Tulis al-Qur'an (BTQ) dan praktik ibadah, untuk Kelas A berjumlah 17 kelompok, b) Aqidah, Syariah dan Akhlaq, untuk Kelas B berjumlah 8 kelompok.

Kedua, Dzikir bersama setiap Selasa pagi: Shalat dhuha berjamaah, *istigāsah* dan taushiyah. Semuanya dilakukan

oleh seluruh warga binaan di Masjid At-Taubah. *Ketiga*, pembacaan Surat Yasin dan *riyāḍah* bersama setiap malam jum'at. *Keempat*, PKBM dalam bentuk kejar Paket C (setara SMU), Paket B (Setara SMP) dan Paket KF (Setara SD). Pelatihan Ketrampilan menjahit: Pakaian, sablon dan potong rambut.

Kelima, pemberian *life skill* warga binaan: Membuat kandang ayam, Peternakan (kelompok tani): Penetasan Itik, Pelatihan ketrampilan Tata boga (bagi kelompok wanita): Pembuatan telor asin. *Keenam*: kegiatan Olah raga: Team futsal, volley ball, tenis meja dan senam kesegaran jasmani. *Ketujuh*, Penyuluhan kesehatan HIV/ AIDS dan tes narkotika.

Tenaga Pengajar atau Ustadz

Pengajar di pesantren At-Taubah berjumlah 33 orang dan ada sekitar 9 orang sebagai cadangan. Dari 33 orang tersebut sebanyak 25 orang kami berikan angket. Dari penyebaran angket itu didapat data sebagai berikut. Seluruh pengajar berasal dari Cianjur. Dilihat dari tempat lahir sebagian besar 48% lahir di Cianjur. Sisanya tersebar di beberapa wilayah di Jawa Barat. Ada sekitar 8% pengajar yang lahir di Lampung. Namun ada sekitar 16% yang tidak menyebutkan dimana mereka lahir.

Usia pengajar cukup beragam. Sebagian besar 40% berusia antara 37-42 tahun. Diikuti usia 25-30 tahun sebesar 24% dan usia 31-36 tahun sebesar 16%. Jika dijumlah usia antara 25-42 sebanyak 80%. Maka, data ini menunjukkan pengajar di pesantren At-Taubah dapat

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

dikatakan sebagian besar tergolong muda meskipun ada sekitar 4% yang berusia 67-72 tahun.

Dilihat dari pendidikan terakhir, sebanyak 32% pengajar berpendidikan terakhir SMU dan 24% berpendidikan terakhir SLTP. Bahkan 4% berpendidikan terakhir SD. Ini artinya, sebagian besar atau 60% berpendidikan terakhir SMU ke bawah. Hanya 24% yang berpendidikan terakhir dari D4 sampai S2. Namun sebagian besar pengajar 56% adalah alumni pesantren. Sisanya, 40% bukan alumni pesantren dan 4% tidak diketahui apakah alumni pesantren atau tidak.

Pekerjaan pengajar beragam. Selain sebagai pengajar di pesantren at-Taubah, mereka bekerja sebagai guru pesantren 20%, guru 16%, pimpinan pesantren 12%, guru majlis taklim 16%, wiraswasta 8%, guru diniyah 4%, guru ngaji 4%, dan guru TPA 4%. Selain itu ada juga pekerjaan pengajar sebagai anggota Polri 4%, jurnalis, dosen 4%, dan pensiunan Pemda 4%.

Dilihat dari aktif dan tidaknya pengajar di organisasi, sebagian besar atau 68% pengajar aktif di organisasi dan sisanya 32% menyatakan tidak aktif di organisasi. Dari sejumlah pengajar yang aktif di organisasi, sebanyak 47% aktif di organisasi Hamida (Himpunan Miftahul Huda). Organisasi ini merupakan himpunan alumni pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya. Pesantren ini didirikan oleh almarhum KH. Choer Affandi. Ia adalah seorang ulama kharismatik dan tokoh pergerakan Darul Islam (DI). Saat ini pesantren ini dipimpim oleh KH. Asep Maushul Affandi dan KH. Abdul Aziz Affandi. Pesantren ini tergolong pesantren Salafiyah. Sekitar kurang lebih 1.000

cabang pesantren Miftahul Huda yang tersebar umumnya di daerah Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Di Cianjur sendiri, pesantren yang berafiliasi dan mengidentifikasikan diri kepada pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya cukup banyak sekitar 400 pesantren. Diantaranya adalah pengasuh pesantren at-Taubah Lapas Cianjur, yaitu: K.T. Muchtar Ghozali.

Selain tenaga pengajar yang berasal dari organisasi Hamida, terdapat juga organisasi DTA, FPI, IKAPI, MUI, Matlaul Anwar, Muhamadiyah, Persis, dan Syarikat Islam.

Tabel:1
Organisasi yang Diikuti Pengajar

Organisasi Yang Diikuti	Frekuensi	%
Hamida	8	47
DTA	1	6
FPI	1	6
IKAPI	1	6
MUI	1	6
Matlaul Anwar	1	6
Muhamadiyah	1	6
Persis	1	6
Syarikat Islam	1	6
tidak menyebutkan	1	6
Jumlah	17	100

Sumber: penyebaran angket penelitian pesantren at-Taubah 29-01-2013

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Santri /Warga Binaan

Setiap warga binaan yang akan menjadi santri melalui beberapa tahapan, yaitu: proses administrasi, pemeriksaan kesehatan, sekretariat pesantren, dan kamar orientasi.

Setelah melakukan pendaftaran administrasi, seorang warga binaan diperiksa kesehatannya. Selanjutnya oleh pihak penyelenggara di tes untuk dikelompokkan, apakah masuk kelompok A yang belajar Baca Tulis al-Qur'an (BTQ) dan praktek ibadah atau masuk kelompok B yang belajar Aqidah, Ibadah, Akhlak.

Santri pesantren at-Taubah per 30 Januari 2013 sebanyak 800 orang. Santri terbagi kepada beberapa kelompok belajar, yaitu: (1) Santri BTQ dan Praktek Ibadah, (2) Santri Aqidah, Syariah, dan Akhlak, (3) Santri Qira'at dan Akhlak.

Tabel: 2
Jumlah Kelompok Belajar dan Jumlah Santri

Kelompok Belajar	Jumlah Kelompok	%	Jumlah santri	%
Santri BTQ dan Praktek Ibadah	16	64	541	68
Santri Aqidah, Syariah, dan Akhlak	8	32	235	29
Santri Qira'at dan Akhlak	1	4	24	3
Total	25	100	800	100

Sumber: sekretariat pesantren at-Taubah

Dari 541 santri kelompok BTQ dan praktek ibadah terdapat 9 kelompok Iqra' 1-3 dengan jumlah 294 santri dan 7 kelompok Iqra' 4-6 dengan jumlah 247 santri.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel: 3
Rincian Jumlah Kelompok dan Santri BTQ dan Praktek Ibadah

Kelompok Belajar	Jumlah Kelompok	%	Jumlah Santri	%
Iqra' 1-3	9	56,3	294	54,3
Iqra' 4-6	7	43,8	247	45,7
Total	16	100	541	100

Sumber: sekretariat pesantren at-Taubah

Berdasarkan angket yang kami sebarkan kepada 745 dari 800 santri dapat dikembangkan beberapa karakteristik. Karakteristik pertama, berdasarkan usia santri. Usia antara 26-35 tahun sebesar 38%, usia antara 16-25 tahun sebesar 31%, usia antara 36-45 tahun sebesar 16 %, usia antara 46-55 tahun sebesar 7%, usia antara 56-65 tahun sebesar 3%, usia antara 66-75 tahun sebesar 1% dan santri yang tidak menjawab sebesar 4%. Kelompok usia 16-25, usia 26-35, dan usia 36-45% berjumlah 85%. Artinya, dapat dikatakan usia santri sebagian besar tergolong muda. Karakteristik kedua, adalah berdasarkan jenis kelamin santri. Santri laki-laki sebesar 98,7% dan santri perempuan sebesar 1,3%.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel: 4
Usia Santri Pesantren at-Taubah

Usia	jumlah	%
16-25	230	31
26-35	283	38

36-45	118	16
46-55	51	7
56-65	23	3
66-75	6	1
76-85	1	0
Tidak menjawab	33	4
Total	745	100

Sumber: Hasil olah angket penelitian

Karakteristik ketiga adalah berdasarkan pendidikan terakhir. Diperolah data bahwa 49,1% santri berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 27% berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), 13,4% berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), 6,3% berpendidikan terkahir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 0,1% berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (MTs), 0,1% berpendidikan terakhir Madrasah Aliyah (MA), 1,9% berpendidikan terakhir Strata Satu (S1), 0,3% berpendidikan terakhir Diploma 3 (D3), 0,4% berpendidikan terakhir KF (tingkat Keaksaraan Fungsional), dan 0,1% berpendidikan terakhir Paket B. Data ini menunjukkan 96,6% santri berpendidikan terakhir SMA ke bawah. Meskipun demikian mereka masih memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi pasca keluar dari Lapas.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel: 5
Pendidikan Terakhir Santri Pesantren at-Taubah

Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
SD	366	49,1
SMP	201	27
MTs	1	0,1
SMA	100	13,4
SMK	47	6,3
MA	1	0,1
S1	14	1,9
D3	2	0,3
KF	3	0,4
Paket B	1	0,1
Tidak menjawab	9	1,2
Total	745	100

Sumber: penyebaran angket penelitian pesantren at-Taubah pada tanggal 29-01-2013

Karakteristik keempat adalah berdasarkan status di Lapas. Sebanyak 84% santri berstatus narapidana, 15,6% berstatus tahanan, dan sisanya 0,4% tidak diketahui statusnya apakah narapidana atau tahanan.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel:6
Status Santri Pesantren at-Taubah

Status	Jumlah	%
Narapidana	626	84
Tahanan	116	15,6
Tidak Menjawab	3	0,4
	745	100

Sumber: penyebaran angket penelitian pesantren at-Taubah pada tanggal 29-01-2013

Karakteristik kelima adalah berdasarkan kasus. Dari 626 santri yang berstatus narapidana, sebanyak 29% adalah kasus KDRT, 26,8% kasus narkoba, 17,4% kasus pencurian, 6, % kasus perampokan, 4,5% kasus penipuan, 3,4% kasus penggelapan, 1,8% kasus *illegal loging*. Sisanya terjerat kasus penadahan, penganiayaan, aborsi, pemalsuan uang, korupsi, pemerkosaan, melarikan wanita, tindak kekerasan, dan lainnya.

Karakteristik keenam adalah berdasarkan lama dipidana bagi yang berstatus narapidana. Dari 626 santri yang berstatus narapidana, sebanyak 50,8% dipidana antara 0-4,7 tahun. Sebanyak 41,1% dipidana antara 4,8-9,4 tahun, dan 6,9% dipidana antara 9,5–14 tahun.

Tabel:7
Lama dipidana

Lama Pidana	Jumlah	%
0 - 4,7 tahun	318	50,8
4,8 - 9,4 tahun	257	41,1
9,5 - 14 tahun	43	6,9
Tidak menjawab	8	1,3
Total	626	100

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Sumber: penyebaran angket penelitian pesantren at-Taubah pada tanggal 29-01-2013

Sarana dan Prasarana

Tempat pembelajaran di pesantren at-Taubah masih memanfaatkan fasilitas seadanya. Pengajian formal diadakan di kamar-kamar sel penjara yang meliputi 11 kamar dari 27 kamar tahanan dan narapidana. Selain di

kamar sel, pengajian juga diadakan di Masjid at-Taubah yang ada di dalam Lapas, serta di aula pertemuan para pengurus Lapas. Kondisi ini menunjukkan semangat besar warga Lapas untuk memaksimalkan pembinaan pesantren.

Dampak Pembinaan Pesantren

Berdasarkan informasi yang diperoleh para pengajar (pembina) Pesantren Terpadu at-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur pada saat mengadakan pengajian di tengah masyarakat, ada yang menyampaikan dan menanyakan eksistensi pesantren di Lapas Kelas II B Cianjur. Ada perbedaan kemampuan warga binaan antara sebelum masuk dan sesudah keluar Lapas Kelas II B Cianjur, misalnya sebelum masuk Lapas tidak bisa baca al-Qur'an dan setelah keluar bisa membaca al-Qur'an.

Pihak penyelenggara menceritakan kepada penulis bahwa ada mantan santri Pesantren Terpadu Lapas Kelas II B Cianjur yang setelah keluar, aktif dan mengajar di Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Cianjur, Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Siliwangi Cianjur, mengisi privat atau panggilan ke rumah, dan sekarang aktif mengajar qira'at di Pondok Pesantren Terpadu at-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur.

Pesantren Terpadu at-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur mengeluarkan surat keterangan dan sertifikat bagi santri yang telah selesai mengikuti pesantren atau habis menjalani masa pidananya dengan ketentuan sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

1. santri dengan masa pidana 1 bulan s/d 6 bulan akan diberikan surat keterangan telah mengikuti Pesantren Terpadu di Lapas Kelas II B Cianjur;
2. santri dengan masa pidana 6 bulan s/d 1 tahun akan diberikan sertifikat yang menerangkan bahwa santri dimaksud telah mengikuti pelajaran selama berada di Pondok Pesantren Terpadu at-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur;
3. santri dengan masa pidana 1 tahun keatas akan diberikan sertifikat yang menerangkan mata pelajaran yang telah diikuti disertai nilai hasil evaluasi pembelajaran di Pondok Pesantren Terpadu at-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur.

Surat keterangan dan sertifikat dikeluarkan oleh Pesantren Terpadu at-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur yang diketahui oleh Kepala Lapas Kelas II B Cianjur dan disetujui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Menakar Pesantren sebagai Model Pembinaan Lapas

Pesantren at-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur memang bukan seperti pesantren pada umumnya yang berkonsentrasi pada pengembangan keilmuan Islam. Ia lebih merupakan pesantren terapi dan pendidikan keagamaan dalam rangka pembentukan kepribadian muslim. Hal ini tercermin dari nama pesantren itu sendiri, at-Taubah yang artinya pertaubatan, kembali kepada-Nya. Maka Pesantren at-Taubah merupakan tempat yang menyediakan proses

pendidikan demi pertaubatan hidup.

Proses pembentukan kembali pribadi muslim ini terlihat dalam kesadaran para pengurus pesantren yang juga merupakan pengurus Lapas, bahwa kriminalitas yang dilakukan para warga binaan, salah satunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan agama. Pemahaman ini ditemukan setelah proses pendidikan berjalan selama hampir setahun ini, ketika ditemukan fakta bahwa hampir 70% warga binaan tidak bisa shalat. Kewajiban belajar baca al-Qur'an dan praktik ibadah menyiratkan pendidikan paling dasar di dalam Islam, sebagai pintu masuk bagi pemahaman keislaman lebih dalam.

Hanya saja, pesantren ini juga tidak hanya menyediakan pendidikan dasar agama, tetapi juga pemahaman lebih lanjut mengenai aspek-aspek dasar (*uṣul al-dīn*) Islam. Adanya pengajian Aqidah, Syari'ah, dan Akhlaq di dalam Kelompok B menyiratkan pengembangan pendidikan Islam lebih lanjut. Apalagi melalui penggunaan kitab kuning klasik, seperti *Sulām al-Taufīq* yang menempatkan Pesantren at-Taubah benar-benar sebagai pesantren. Yang menarik di dalam pesantren ini memang tidak terletak pada proses didaktik formal maupun cakupan kurikulumnya yang masih terbatas, melainkan kehidupan keagamaan yang "subur", menyiratkan semangat hidup para santri. Hal ini terlihat jelas dalam ibadah sehari-hari, terutama kegiatan shalat yang selalu dilakukam secata berjamaah. Baik di kamar sel masing-masing maupun di masjid. Jamaah shalat selalu penuh hingga membanjiri halaman masjid. Hal ini menjadi pemandangan yang

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

mengharukan, mengingat semangat ini terjadi di sebuah lembaga pemasyarakatan. Adzan yang saling menyahut dari masing-masing sel juga menyajikan semangat kehidupan Islami yang kuat dan akhirnya mampu menampilkan kehidupan Lapas yang benar-benar berbeda dengan Lapas biasanya.

Keberhasilan pesantren ini juga terdapat pada penumbuhan kesadaran dari sebagian kecil warga binaan untuk mendalami al-Qur'an dalam proses *tahfīḏ*. Artinya, pesantren telah mampu menumbuhkan kesadaran mendasar di kalangan warga binaan untuk tidak memaknai masa hukuman di Lapas sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pertaubatan menuju kepribadian muslim yang berarti. Beberapa santri yang berketetapan hati menjadi *hāfīḏ* bahkan menyukuri keberadaan mereka di Lapas sebab dengan keberadaan ini mereka bisa menghabiskan waktu menghafal al-Qur'an. Kesadaran ini merupakan titik balik dari kejahatan menjadi pertaubatan.

Dengan keberhasilan pendidikan pesantren dalam "menyulap" Lapas, menjadi pesantren, tak heran jika Lapas Kelas II B Cianjur ini menjadi Lapas unggulan berbasis pesantren. Hal ini telah membuahkan dua kebaikan sekaligus. Pertama, masuknya pesantren dan para pengajar agama ke "dunia gelap" kejahatan, yang selama ini dijauhi oleh kaum agamawan. Pesantren at-Taubah telah menunjukkan arus balik keagamaan dengan berebutnya para ustdaz dan kyai untuk mengajar di pesantren ini. Mereka terinspirasi oleh teladan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan cahaya (*al-*

PUSLITBANG
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

hudā) di tengah kegelapan masyarakat jahiliyah. Lapas yang berisi para kriminal merupakan masyarakat jahiliyah yang membutuhkan cahaya agama. Di dalam proses pengajaran, terlihat betapa para ustadz dan kyai begitu semangat memberikan penyadaran keagamaan kepada para santri binaan.

Kedua, revolusi pembinaan atas kriminalitas berbasis pesantren. Model pembinaan yang ada di Lapas konvensional terbukti kurang efektif di dalam pembentukan kesadaran para terhukum. Hal ini terjadi sebab pembinaan cenderung terfokus pada pelatihan kerja, sementara problem akut para narapidana sebenarnya terletak pada moralitas. Pembinaan agama dalam bentuk majelis ta'lim secara berkala terbukti tidak efektif bagi proses penyadaran. Hal ini terjadi karena penyadaran keagamaan memang membutuhkan pendidikan intensif, baik di dalam kelas, terlebih di ruang kehidupan para santri. Dengan adanya pesantren, pendidikan agama tidak terhenti pada pengajaran klasikal, melainkan pembinaan di dalam praktik hidup keseharian. Maka secara tidak langsung, Pesantren at-Taubah telah membentuk Islam tidak hanya sebagai sistem pendidikan, melainkan juga sistem budaya. Artinya, tata pendidikan Islam telah diintegralkan dengan tata sub-kemasyarakatan di Lapas tersebut. Hal ini terlihat pada sifat Pesantren at-Taubah sebagai pesantren terpadu.

PUSLITBANG LEKTUR KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

***

Pesantren at-Taubah merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, secara legal formal telah diakui sebagai pesantren oleh Kementerian Agama. Kegiatan pesantren dilakukan secara terpadu dan integral dengan pembinaan di Lapas. Keterpaduan ini dalam keterpaduan pembinaan kepribadian (pesantren), pembinaan kemandirian, dan pembinaan intelektual yang terlihat dalam kegiatan santri (warga binaan).

Penyelenggaraan Pesantren at-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur sebagai institusi pendidikan, memang bukan pesantren pada umumnya yang berkonsentrasi pada pengembangan keilmuan Islam. Pesantren ini lebih merupakan pesantren terapi dan pendidikan keagamaan dalam rangka pembentukan kepribadian muslim yang muncul karena kesadaran akan minimnya pengetahuan agama di Lapas. Bentuk dan pengelolaan pesantren disesuaikan dengan kondisi di lingkungan Lapas. Kurikulum yang diajarkan masih terbatas kepada pendidikan dasar agama, aspek-aspek dasar (*uṣul al-dīn*) Islam, penekanan pada BTQ, ritual ibadah sehari-hari (shalat jamaah), doa/zikir, *Tahfiḍ* al-Qur'an. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara *sorogan*, *bandongan* dan diskusi.

Dengan demikian, pendidikan keagamaan berbasis pesantren di Lapas Kelas II B Cianjur dapat dijadikan sebuah model pesantren yang bisa diterapkan di Lapas lainnya. Jika akan diterapkan di Lapas-Lapas lain hendaknya inisiatif datang dari warga binaan, kemudian

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

direspon oleh MUI, ormas keagamaan, Kementerian Agama, dan pihak Lapas sendiri. Selanjutnya, perlunya dilakukan pembinaan secara kontinyu dan intensif bagi alumni Pesantren at-Taubah dengan menitipkan mereka kepada para tokoh setempat, MUI, pesantren (khususnya pesantren yang mengembangkan program *life skill*), sehingga para alumni dapat benar-benar diterima oleh warga masyarakat biasa dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya []

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

2 Pemberdayaan Perempuan pada Komunitas Majelis Taklim

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Pemberdayaan Perempuan pada Komunitas Majelis Taklim[1]

Pada akhirnya Majelis Taklim tidak hanya lembaga pendidikan agama an sich tetapi ia adalah wadah pemberdayaan perempuan strategis dalam meningkatkan kemandirian dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat.

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan Islam non formal yang telah ada sejak lama. Majelis taklim sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam non formal telah mendapat pengakuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Bab VI Pasal 26 Ayat 4 tentang Pendidikan Non-Formal (UU Pendidikan Non-Formal) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PP Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan) yang

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

1 Bagian ini dikembangkan dari Artikel yang dimuat di Edukasi : Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Volume VII, Nomor 4 Desember 2009.

secara eksplisit menyebutkan majelis taklim sebagai bagian dari pendidikan non-formal. Hal ini menunjukkan bahwa majelis taklim merupakan salah satu bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

Majelis taklim sebagai institusi pendidikan Islam yang berbasis masyarakat, peran strategisnya terutama terletak dalam mewujudkan *learning society,* yaitu suatu masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa dibatasi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, juga dapat menjadi wahana belajar, serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah mengembangkan silaturrahmi, dan berbagai kegiatan kegamaan lainnya bagi semua lapisan masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, majelis taklim melaksanakan fungsinya pada tataran non-formal dengan lebih fleksibel dan terbuka. Majelis taklim juga merupakan salah satu solusi dan peluang bagi masyarakat untuk menambah dan melengkapi pengetahuan yang kurang atau tidak sempat mereka peroleh pada pendidikan formal, khususnya dalam aspek keagamaan.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, karena sifatnya non-formal, maka penyelenggaraan majelis taklim dalam beragam bentuknya berjalan sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan ekonomi masyarakat. Bahkan bisa dikatakan bahwa penyelenggaraan majelis taklim tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang menjadi jamaahnya. Karena itu kemudian muncul berbagai karakteristik majelis taklim yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit.

Akan tetapi dalam perjalanannya, tumbuh dan berkembangnya majelis taklim belum diikuti dengan sentuhan manajerial yang memadai sehingga majelis taklim dan kegiatannya cenderung berjalan dalam ritme yang monoton tanpa inovasi. Hal ini mencerminkan kelompok-kelompok belajar yang bersifat rutinitas, kurang menyentuh realitas kehidupan jamaah, dan tidak berdaya memberikan kontribusi dalam membantu dan menyiapkan jamaahnya menghadapi tantangan hidup yang semakin kompetitif.

Menyadari pentingnya posisi majelis taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal dan adanya keterkaitan antara majelis taklim dan kondisi sosio-kultur dan ekonomi masyarakat pendukungnya, tulisan ini menjadi sangat penting untuk mengembangkan dan memberdayakan majelis taklim terutama bagi kalangan perempuan.[2] Selain itu diperlukan kajian dan analisis

2 Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 diperoleh jumlah penduduk sekitar 206,3 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, proporsi penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang, yaitu 49,9 persen perempuan dan sisanya 50,1 persen laki-laki. Dengan jumlah penduduk yang besar dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin yang berimbang, maka bila diikuti dengan kualitas dan kemampuan yang baik antara laki-laki dan perempuan, akan menjadi potensi pembangunan yang sangat besar. Pada kenyataannya, kualitas hidup perempuan dalam beberapa bidang pembangunan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Padahal beberapa landasan hukum seperti Pasal 27 dan 28 UUD 1945, UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, UU No. 43 tahun 1998 tentang PNS, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, telah memberikan jaminan atas partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan dan hukum.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

yang lebih komprehensif tentang karakteristik majelis taklim dan masyarakat pendukungnya. Pemahaman tentang karakteristik ini, selanjutnya menjadi acuan untuk mereposisi dan memetakan kembali eksistensi majelis taklim agar berkontribusi maksimal dalam pembangunan masyarakat muslim.

Di sisi lain, dari sekian banyak organ perjuangan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM), basis terkecil dalam suatu komunitas yang selama ini belum banyak dilirik, apalagi pada tataran akademik, adalah majelis taklim, yang hampir semuanya diisi oleh kaum perempuan. Selain itu organ majelis taklim selama ini selalu dipandang sebelah mata. Bahkan, tak jarang majelis taklim dimaknai hanya sebatas perkumpulan ibu-ibu pengajian yang membaca surat Yasin dan tahlil, sehingga kurang dianggap perannya dalam pemberdayaan perempuan. Padahal, potensi kaum ibu yang tergabung dalam majelis taklim luar biasa besarnya. Hal ini terjadi karena basis komunitas majelis taklim ini menyebar mulai dari tingkat masjid yang besar, sedang, kecil, bahkan di pelosok pedesaan menjangkau ke mushala-mushala yang ada di kelurahaan dan desa, hingga ke rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Tulisan ini mencoba mengangkat bagaimana kondisi sosio-kultural dan ekonomi masyarakat memberi warna terhadap majelis taklim terkait manajemen, materi, dan proses pembelajaran, serta bagaimana pengaruh kegiatan majelis taklim terhadap pemberdayaan perempuan (muslimah).

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Majelis Taklim dan Pemberdayaan Perempuan

Kehadiran majelis taklim tidak bisa dilepaskan dari perkembangan Islam. Nabi SAW menyampaikan ajaran Islam dengan berbagai macam strategi dan metode. Salah satunya dilakukan secara sembunyi-sembunyi saat awal-awal al-Qur'an turun di Makkah. Ketika Islam berkembang di Kota Madinah, Nabi dan para sahabatnya melakukan pembinaan terhadap umat Islam secara terbuka. Dakwah dalam rangka menyampaikan ajaran Islam merupakan cikal bakal berkembangnya majelis taklim yang dikenal hingga saat ini. Masuknya Islam ke Indonesia melalui majelis taklim juga merupakan sarana efektif dalam mengembangkan agama Islam.

Kata majelis taklim berasal dari bahasa Arab yaitu: *majlisun* dan *ta'līmun*. Kata *majlisun* adalah *isim makan* dari *jalasa–yajlisu–julūsan* yang berarti tempat duduk dan kata *ta'līmun* adalah bentuk *masdar* dari kata '*allama-yu'allimu-ta'līmun* yang berarti pengajaran atau pengajian.[3] Dengan demikian majelis taklim secara *lughawi* berarti tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian bagi orang-orang yang ingin mendalami ajaran-ajaran Islam.

Secara istilah, majelis taklim dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala, dan teratur, diikuti oleh jamaah relatif banyak, bertujuan untuk

3 Lihat A.W. Munawwir. 1997. Kamus Al-Munawwir. Yogyakarta: Pustaka Progresif, edisi kedua, cet. ke-14, h. 2002 dan 967.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

membina hubungan yang santun dan serasi antar manusia dengan Allah SWT, antar manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah.[4] Kegiatan ceramah umum atau pengajian Islam biasanya dilaksanakan di masjid, di halaman masjid atau di kantor-kantor, baik kantor pemerintah maupun swasta dan di tempat lain yang dikhususkan untuk itu. Majelis taklim merupakan institusi pendidikan non-formal keagamaan, di mana prinsip kegiatannya adalah kemandirian dan swadaya anggotanya.

Dilihat dari karakteristiknya secara umum majelis taklim adalah lembaga (institusi) yang melaksanakan pendidikan atau pengajian agama Islam yang memiliki kurikulum, ustadz atau guru, jamaah, metode, materi, dan tujuan pembelajaran.[5] Sementara itu dalam Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa karakteristik majelis taklim, adalah lembaga kajian Islam yang memiliki ciri-ciri tersendiri dilihat dari sudut metode dan buku pegangan yang digunakan, jamaah, pengajar (ustadz) materi yang diajarkan, sarana, dan tujuan.[6]

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Karakteristik majelis taklim yang seperti itu masih merupakan karakteristik umum dari setiap majelis

4 Koordinator Dakwah Islam. 1990. Pedoman Majelis Taklim. Jakarta: KODI, h. 15.

5 Dewan Redaksi. 2001. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h.120-121.

6 Departemen Agama RI. 1996. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, h. 675.

taklim. Sebagai lembaga pembinaan umat, majelis taklim mempunyai beberapa fungsi, diantaranya: [7]

1. wadah untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada jamaahnya;
2. wadah yang memberi peluang kepada jamaah untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman dalam masalah agama;
3. wadah yang dapat membina keakraban di antara sesama jamaah, dan;
4. wadah informasi dan kajian keagamaan serta kerjasama di kalangan umat.

Pentingnya peran majelis taklim bagi umat Islam tidak diragukan lagi. Dengan memperhatikan perkembangan dan eksistensinya, majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non-fomal pada masa sekarang mempunyai kedudukan tersendiri dalam mengatur pelaksanaan pendidikan agama dalam rangka dakwah Islam dan merupakan salah satu lembaga bagi pendidikan seumur hidup (*long life education*).

PUSLITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Majelis taklim juga merupakan salah satu media yang tepat dalam memberdayakan kaum perempuan (muslimah) karena pada umumnya anggota (jamaah) majelis taklim yang berkembang selama ini lebih banyak didominasi

7 Rosehan Anwar, dkk. 2002. Majelis Taklim dan Pembinaan Umat. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, h. v.

kalangan perempuan, Sebagai sarana dalam penyampaian pesan-pesan agama, tidak sedikit program pembangunan yang dilakukan pemerintah yang memanfaatkan peran majelis taklim. Pesan agama dipandang cukup efektif untuk mensosialisasikan program-program pemerintah. Sebut saja misalnya program Keluarga Berencana (KB) dan transmigrasi yang sukses dengan melibatkan tokoh agama yang mensosialisasikan program ini melalui majelis taklim.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial-budaya agar individu dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri sehingga mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga dapat membangun kemampuan dan konsep diri.[8]

Pemberdayaan perempuan dimaknai sebagai suatu upaya meningkatkan kemampuan perempuan di majelis taklim untuk memperoleh akses terhadap sumberdaya pendidikan (pemikiran, dakwah), ekonomi (*life skill*), dan sosial budaya dengan cara menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi perempuan yang terdapat pada dirinya. Hal ini dilakukan secara individual dan kelompok atau kolektif sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

8 PP Ripnas. Kementerian Pemberdayaan Wanita. Jakarta: Memperta, 2002-2004, h. 36.

Potret Keagamaan di Kabupaten Bogor

Dimensi keberagamaan masyarakat merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk mempercepat laju pembangunan, mengingat dimensi religius telah melekat dan menjadi pranata moral masyarakat Indonesia. Sejak bangsa ini didirikan, nilai-nilai keagamaan menjadi *concern* para *founding father* negeri ini. Sila pertama dalam Pancasila adalah cerminan nyata dari watak khas bangsa ini.

Di Kabupaten Bogor, masyarakatnya terdiri dari berbagai pemeluk agama. Ada yang memeluk agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Secara kuantitatif, Islam menjadi agama mayoritas yang dianut warga setempat. Ini dapat dilihat dari pemeluknya yang berjumlah 3.253.382. Disamping itu juga dapat dilihat dari jumlah tempat ibadah yang ada. Sesuai dengan data yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor tahun 2006, di Bogor terdapat 2.773 masjid yang tersebar di 40 kecamatan. Ditambah dengan 741 mushala dan 5.944 langgar.

PUSLITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Kedua Kristen Katolik, dengan jumlah pemeluk 24.512 orang dengan 29 gereja yang ada di 12 kecamatan. Ketiga Kristen Protestan, dengan jumlah pemeluk 21.702 orang. Keempat Budha, dengan jumlah pemeluk 21.311 dan 11 wihara yang tersebar di 10 kecamatan. Kelima Hindu, dengan jumlah pemeluk 11.938 orang dan 5 Pura yang ada di empat kecamatan. Secara keseluruhan, dari 40 kecamatan yang ada di kabupaten Bogor terdapat 9.503 tempat ibadah yang terdiri dari masjid, mushala, langgar,

gereja, wihara, dan pura. Jumlah ini belum ditambah sarana dan prasarana keagamaan lain yang terartikulasi dalam berbagai bentuk kegiatan dan kelembagaan.

Khusus untuk Islam, di Bogor terdapat 1.089 Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) yang tersebar di 40 kecamatan. Jumlah murid dari lembaga ini pada tahun 2006 tercatat 77.408 anak guru pembimbing atau pengajar sejumlah 3.770 orang. Selain TPQ ada juga 281 Taman Kanak-Kanak al-Qur'an (TKQ) yang juga tersebar di 40 kecamatan. Jumlah muridnya pada tahun 2006 sebanyak 6.455 anak dan guru pengasuh sejumlah 893 orang. Kecuali TPQ dan TKQ, di Bogor juga terdapat banyak majelis taklim. Dari data yang ada di Kantor Kementerian Agama tahun 2006 tercatat 2.406 majelis taklim tersebar di 40 kecamatan. Dari ke-40 kecamatan tersebut, jumlah terbanyak ada di kecamatan Cibinong. Di kecamatan ini terdapat 246 majelis taklim.

Majelis Taklim an-Nur Cibinong

Salah satu majelis taklim yang dianggap besar dan berpengaruh di lingkungan kabupaten Bogor adalah majelis taklim an-Nur. Majelis taklim an-Nur terletak di Jalan an-Nur, Kelurahan Pabuaran RT 04/08 Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini termasuk daerah padat penduduk dan tidak jauh dari Jalan Raya Bogor-Jakarta. Keberadaan majelis taklim an-Nur ini sebenarnya sudah lama dirintis oleh tokoh agama setempat. Mereka menjadi tokoh sentral sekaligus menjadi panutan di masyarakatnya. Sebagai tokoh agama, mereka

IKHLAS BERAMAL
PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan terhadap masyarakat sekitarnya terutama dalam pembinaan keagamaan maupun bidang lainnya. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, pada tahun 1994 majelis taklim an-Nur secara kelembagaan baru didirikan oleh beberapa tokoh agama seperti Dra. Hj. Ida Farida, Drs. TB. Ahmad Zaky, dan lain-lain. Diantara yang menjadi latar belakang didirikannya majelis taklim an-Nur, adalah:

1. Keinginan untuk membantu dan meningkatkan pengetahuan agama masyarakat serta meningkatkan taraf hidup ibu-ibu rumah tangga baik secara ekonomi maupun sosial;
2. Belum ada majelis taklim di lingkungan tersebut;
3. Sebagai sarana untuk bertukar pendapat dan pengalaman anggota, dan sebagai;
4. Sarana membina silaturahmi yang akrab dalam koridor *ukhuwah islamiyah*.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Berangkat dari latar belakang di atas, majelis taklim an-Nur tidak hanya mendalami dan meningkatkan ilmu-ilmu agama tetapi juga memberikan pengetahuan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup jamaahnya dalam bidang ekonomi maupun sosial. Sesuai dengan dinamika masyarakat setempat, antusiasme masyarakat bersambut gayung dengan visi didirikannya majelis taklim an-Nur. Pengetahuan –terutama kaum ibu– yang pada awalnya masih sangat minim dalam soal agama, lambat laun berkembang dan meningkat. Baca tulis al-Qur'an

menjadi spesifikasi pembelajaran dimana kaum ibu-ibu masih kurang pengetahuannya. Pemberdayaan bidang sosial dan ekonomi dilakukan melalui koperasi majelis taklim an-Nur. Sampai saat ini, majelis taklim an-Nur kian berkembang. Bahkan saat ini majelis taklim an-Nur mempunyai tempat yang permanen dan unit usaha sendiri. Di bawah naungan yayasan yang sama (baca: yayasan an-Nur) juga didirikan lembaga pendidikan lain. Ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) an-Nur, madrasah, pesantren, dan panti asuhan.

Dalam pembinaannya, majelis taklim an-Nur menginduk pada organisasi Badan Kontak Majelis Taklim (BMKT) yaitu lembaga organisasi majelis taklim dibawah pimpinan Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS. Struktur kepengurusan majelis taklim an-Nur terdiri dari 1 orang ketua , 2 orang ketua pelaksana harian, sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2, dan 4 orang anggota pengurus.

Program kegiatan majelis taklim an-Nur Cibinong yang selama ini dilakukan antara lain:

1. *Yasinan* dan *barzanjian;*
2. Belajar baca al-Qur'an;
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bekerja-sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas);
4. Pendalaman agama (Tauhid*, Fiqh,* Akhlak, Sejarah);
5. Pembinaan anak yatim;
6. Pengembangan ekonomi;

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Majelis taklim an-Nur termasuk yang belum memiliki kurikulum secara tertulis, yakni belum tersusun secara rapih dengan intensitas, kualifikasi, evaluasi, dan target tertentu yang diharapakan. Kurikulum atau materi yang selama ini berlangsung masih banyak ditentukan oleh para ustadz atau ustadzah. Padahal kurikulum sangat penting dalam sebuah organisasi. Ia akan menjadi sebuah cermin setiap aktifitas yang dilakukan oleh aktifis-aktifis organisasi tersebut. Dengan adanya kurikulum, perkembangan organisasi dapat dideteksi. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari. Bila kedua hal ini sudah dapat dikontrol, bisa dipastikan kemajuan majelis taklim an-Nur dapat diraih sesuai dengan cita-cita para pengurus. Kendati demikian, majelis taklim an-Nur ini mengajarkan beberapa materi yang cukup variatif. Materi-materi tersebut, meliputi Tauhid, Fikih, Tafsir, Akhlak, dan membaca al-Qur'an. Ada juga materi tambahan seperti Tajwid, Bahasa Arab, dan membaca huruf latin.

Kegiatan pengajian dilaksanakan sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Jumat mulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Acara dimulai dengan pembacaan yasinan (tradisi membaca surat yasin), dilanjutkan pembacaan wiridan (*tahlīl, taḥmīd, takbīr*) secara bersama yang dipimpin oleh sesepuh atau ustadzah senior. Dilanjutkna dengan ceramah atau pendalam agama yang disampaikan oleh tenaga pengajar yang sudah ditetapkan. Cara penyampaian materi tersebut umumnya menggunakan metode ceramah. Untuk memperdalam materi, sekali dua kali diadakan sesi tanya jawab. Terkadang juga ada

PENERBITAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

hafalan dan penugasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman jamaah terhadap materi yang disampaikan. Untuk mengetahui penguasaan jamaah terhadap materi yang diajarkan, sesekali diuji melalui praktik membaca al-Qur'an, praktik shalat, dan praktik penyelenggaraan jenazah. Penilaiannya difokuskan pada aspek pemahaman.

Menurut penuturan salah seorang jamaah, alokasi waktu dalam pembelajaran ini cukup untuk menguasai materi yang diberikan. Alasan para jamaah mengikuti kegiatan ini sebagaian besar karena ingin memperdalam dan mengetahui lebih jauh masalah keagamaan. Tujuan tertinggi dari majelis taklim an-Nur adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada jamaah Allah Swt. Tujuan inilah yang menjadi salah satu alasan salah seorang jamaahnya bertekad mengikuti kegiatan ini sampai akhir hayat. Bagi pimpinan majelis taklim lain, yang menjadi jamaah pengajian di majelis taklim an-Nur, mereka mendapatkan bekal atau materi kajian yang akan disampaikan kepada jamaahnya –baik terkait dengan isi ceramah, dialog, metode penyampaian, dan hal-hal lainnya.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Majelis Taklim an-Nur: Prototype **Pemberdayaan Perempuan**

Ada beberapa hal menarik yang menjadi karakteristik majelis taklim ini, yaitu latar belakang berdirinya, fungsi, manajemen penyelenggaraan, serta pemberdayaan perempuan di majelis taklim. Pada aspek kepemilikan dan

pengelolaan, majelis taklim an-Nur dapat di kategorikan menjadi milik ustadz dan ustadzah, milik organisasi, milik perkantoran, dan akhirnya menjadi milik yayasan.[9] Pada awal berdirinya, majelis taklim an-Nur tumbuh atas inisiatif ustadz dan ustadzah dalam menyebarkan dan menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat, sebagai bentuk kewajibannya sebagai muslim maupun muslimat. Selain itu, keberadaan majelis taklim an-Nur juga tidak bisa dipungkiri karena adanya faktor kebutuhan masyarakat tentang pemahaman terhadap agama. Majelis taklim seperti inilah yang banyak berkembang di masyarakat, misalnya majelis taklim yang sudah cukup besar seperti majelis taklim Kwitang Jakarta Pusat, majelis taklim at-Tahiriyah, majelis taklim as-Syafiiyah dan sebangainya. Selain itu muncul juga beberapa oraganisasi induk yang memayungi beberapa majelis taklim seperti BKMT pimpinan Dr. Tutty Alawiyah AS, Balai Kesehatan Mata Msyarakat (BKMM) yang merupakan afiliasi organisasi Dewan Masjid Indonesia (DMI), Forum Komunikasi Majlis Taklim (FKMT), Aisyiyah Muhammadiyah, Muslimat NU, dan sebagainya.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Seiring dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat, pengelolaan majelis taklim juga mengalami perubahan. Majelis taklim tidak hanya dikelola oleh orang perorang, tetapi juga sudah mulai dikelola dalam bentuk organiasasi, yayasan, dan perkantoran. Hal serupa dialami oleh majelis

9 Tutty Alawiyah AS. 1997. Strategi Dakwah di Lingkungan Majlis Taklim. Bandung:Mizan, h. 77.

taklim an-Nur. Terjadi proses perubahan pengelolaan yang semula oleh kyai atau tokoh agama dan menjadikan rumahnya sebagai temapat belajar, menjadi pengelolaan dalam bentuk organisasi yang berada di bawah yayasan yang dilengkapi struktur kepengurusan dan program kerja serta mekanisme pergantian kepengurusan.

Dalam hal fungsi majelis taklim yang dijalankan, tidak seperti kebanyakan majelis taklim lain yang hanya berfungsi sebagai lembaga dakwah atau wadah untuk memperluas wawasan keislaman para jamaahnya, majelis taklim an-Nur juga berfungsi sebagai wadah pengembangan sosial budaya dan kegiatan ekonomi bagi para jamaah. Berdasarkan program kegiatannya majelis taklim yang berkembang selama ini dapat dikategorikan:

1. Kelompok yasinan, majelis zikir, marhabanan;
2. Kelompok yasinan, klasikal, sosial;
3. Pemberdayaan pendidikan, sosial, ekonomi masyarakat.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Majelistaklim an-Nur termasuk kategori yang melakukan kegiatan ketiga unsur tersebut. Dari sini kegiatan majelis taklim an-Nur sudah mengalami perubahan yang tidak hanya melulu mendalami pengetahuan agama *an sich*, tetapi sudah mulai menyentuh pada bidang lainnya.

Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyusunan kurikululum pengajian. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari kegiatan pengajian yang dilakukan, perlu ada kurikulum pengajian, sehingga pelaksanaan pengajian tidak lagi bersifat konvensional, di mana

materi pengajian sering *over-lapping*, tidak sesuai dengan kebutuhan dan membuat jamaah jadi jenuh. Disamping itu pemahaman jamaah terhadap ajaran agama Islam menjadi tidak komprehensif. Dengan adanya kurikulum, ada kemungkinan perkembangan sebuah organisasi dapat dideteksi. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari. Bila kedua hal ini sudah dapat dikontrol, bisa dipastikan kemajuan sebuah majelis taklim akan dapat diraih sesuai dengan cita-cita dari para pengurus.

Selain itu, faktor pendukung agar tercapainya tujuan yang direncanakan adalah menyiapkan materi-materi yang disusun dalam kurikulum tersebut. Materi adalah bahan-bahan yang akan diajarkan oleh para dai dan daiah kepada *mad'u*nya. Hal ini dimaksudkan agar setiap pertemuan memiliki sasaran yang akan dicapai, baik oleh dai maupun oleh *mad'u*. Materi ini sebaiknya juga disusun selama satu periode agar dalam proses pertemuan tidak lagi bingung dengan yang akan disampaikan kepada para *mad'u*. Oleh karena itu dalam menyusun kurikulum yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga dapat menjadi pedoman yang membantu. Beberapa hal tersebut, adalah tujuan yang hendak dicapai, peserta majelis taklim (*mad'u*), situasi dan lingkungan, fasilitas yang dimiliki, dan pribadi pengajar (*da'i*), serta kemampuan profesionalnya.

Aspek ketenagaan majelis taklim an-Nur terutama ustadz dan ustadzah memiliki kapasitas yang memadai. Mereka lulusan S1 Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dengan status sosial ekonomi menengah ke atas. Perekruitan ustadz dan ustadzah yang berpendidikan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

minimal S1 dapat dimaklumi karena pendiri dan pengurus majelis taklim beranggapan bahwa karakteristik ustadz dan ustadzah yang demikian mampu menjamin para jamaah mendapatkan pelajaran dari sumber yang terpercaya. Namun hal ini akhirnya berpengaruh pada proses pembelajaran yang lebih banyak didominasi oleh para ustadz dan ustadzah sedangkan para jamaah lebih banyak bersifat pasif. Meski demikian, tidak menjamin para ustadz dan ustadzah memiliki otoritas kuat dalam proses pembelajaran. Hal ini tampak dari adanya jamaah yang mengobrol bahkan tidur-tiduran pada saat jam belajar tanpa mendapat teguran dari ustadz dan ustadzah. Hal ini dimungkinkan karena usia para ustadz dan ustadzah itu relatif masih cukup muda, sementara sebagian jamaah sudah berusia lanjut.

Pemberdayaan perempuan dimaknai sebagai upaya meningkatkan kemampuan perempuan di majelis taklim untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, pemikiran, dakwah, ekonomi (*life skill*), dan sosial budaya dengan menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi perempuan yang dilakukan secara individual dan kelompok atau kolektif sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Upaya majelis taklim dalam meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses terhadap terutama dalam pendidikan sudah lama dilakukan. Melalui pengajaran dan pembinaan agama (fikih, tauhid, akhlak, muamalah) yang mejadi kegiatan utamanya, majelis taklim berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan

BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

perempuan memperoleh akses pendidikan keagamaan. Selain itu kesempatan untuk mendapatkan sumber daya lain seperti sosial-budaya dan ekonomi sudah mulai dilakukan, walaupun demikian pada beberapa bidang ini belum digarap secara maksimal di lingkungan majelis taklim.

Pemberdayaan perempuan di majelis taklim khususnya di an-Nur tidak jauh berbeda dengan kondisi majelis taklim yang ada. Program pemberdayaan perempuan masih sebatas memberikan akses atau kesempatan kepada sumber daya yang minim sehingga kemampuan perempuan benar-benar mandiri belum bisa dikatakan maksimal. Hanya pada bidang-bidang tertentu saja yang mendapatkan perhatian yaitu bidang pendidikan.

Akses mendapatkan sumber pendidikan di majelis taklim an-Nur, sebenarnya menjadi *core* dari kegiatan majelis taklim itu sendiri. Kesempatan perempuan mendapatkan pendidikan ini diperoleh melalui kegiatan ceramah dan diskusi yang terkait dengan pemahaman-pemahaman keagamaan seperti akidah, fikih, muamalah, sejarah. Yang tak kalah penting, majelis taklim juga berupaya meningkatkan pengetahuan para jamaahnya terutama jamaah yang belum bisa membaca dan menulis huruf latin, dengan membuka program pemberantasan baca tulis huruf latin dan menjadikan majlis taklim sebagai PKBM. Kegiatan ini merupakan kerjasama majelis taklim an-Nur dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Dinas Pendidikan). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membebaskan buta aksara latin di kalangan perempuan.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Adapun yang menjadi peserta adalah jamaah pengajian, sedangkan tenaga pengajarnya adalah para ustadz dan ustadzah juga tenaga pengajar dari Dinas Pendidikan. Kegiatan ini berjalan dengan baik, diikuti oleh beberapa jamaaah yang belum bisa baca tulis huruf latin.

Hal ini berjalan efektif, sebagaimana disampaikan pengurus, karena yang menjadi tenaga pengajar adalah ustadz dan ustdazh yang secara psikolgis tidak ada beban atau rasa malu ketika belajar. Ustadz dan ustadzah memberikan dorongan atau motivasi baik secara agama maupun secara manfaatnya. Pada aspek pendidikan keagamaan, sebenarnya lebih dominan dilakukan majelis taklim, karena memang menjadi tujuan utama dari kegiatan majelis taklim. Namun demikian karena faktor cakupan materi lebih luas dan waktu pembelajarannya terbatas sehingga proses penyadaran dan akses mendapatkan pendidikan ini memakan waktu lama. Oleh karena itu majelis taklim perlu menyusun kurikulum secara terencana dan sesuai dengan kebutuhan jamaah.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Terkait dengan pemberdayaan di bidang ekonomi, majelis taklim an-Nur memiliki usaha dalam meningkatkan taraf kesejahterahan ekonomi jamaah melalui kegiatan arisan dan membuka usaha koperasi. Arisan, selain sebagai sarana pengikat dalam kegiatan dalam majelis taklim, juga dapat dijadikan sebagai modal bagi jamaah yang mendapatkannya. Kegiatan usaha lainnya adalah membuka koperasi jamaah. Usaha koperasi ini sebagai bentuk kegiatan dari jamaah, oleh jamaah, dan untuk jamah. Modal utama dari usaha ini adalah iuran wajib

dan sukarela jamaah kemudian dijalankan oleh pengelola dari jamaah dan usaha tersebut kemudian diperuntukan kepada jamaah. Pemberdayaan ekonomi di majelis taklim an-Nur masih sangat sederhana karena beberapa keterbatasan, seperti SDM, tidak adanya jaringan untuk memperoleh akses terhadap sumber informasi, dan dana.

Dalam bidang sosial, majelis taklim an-Nur dalam setiap pengajian selalu menyisihkan amalnya untuk beasiswa anak yatim piatu. Kegiatan ini bertujuan untuk membina anak-anak yatim kemudian dibiayai pendidikannya hingga sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, pada acara-acara penting, majelis taklim an-Nur secara sukarela membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah seperti korban bencana baik banjir, gempa bumi, dan yang lainnya dengan memberikan bantuan amal. Dari pengamatan dan hasil wawancara, jamaah kurang antusias terhadap kegiatan sosial dibandingkan untuk urusan yang bersifat pemenuhan fisik pribadi dan seremonial, seperti pengadaan seragam jamaah dan wisata ziarah. Biasanya jamaah akan lebih memikirkan bagaimana dapat membeli seragam dan untuk wisata ziarah. Dalam satu tahun saja bisa dua sampai tiga seragam yang harus dibeli oleh jamaah. Begitu pula dengan kegiatan ziarah, mereka dengan antusias terlibat dalam kegiatan ini dengan cara menabung.

Peran majelis taklim dalam memberikan akses terhadap kaum perempuan dalam aspek pendidikan terutama pendidikan agama tidak bisa dipungkiri, namun demikian pada aspek sumber daya lainnya seperti

PUSLITBANG
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi walaupun sudah mulai disentuh, masih belum nampak dan terasa pada aspek pemberdayaannya bagi kaum perempuam. Hal ini terjadi karena majelis taklim memiliki beberapa kendala di antaranya faktor pengelolaan (manajerial), kurikulum, sumber daya manusia, dan yang utama dalam hal pendanaan. Lain halnya kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang secara khusus terlibat dalam program pemberdayaan perempuan sebut saja organisasi seperti Kapal Perempuan, Rahima, Puan Amal Hayati, dan lain-lain. Dengan SDM dan dana yang mereka miliki, organisasi ini secara khusus memberikan advokasi dan pelatihan-pelatihan yang terencana sehingga hasilnya dapat diketahui. Bila saja majelis taklim seperti LSM yang disebutkan diatas, tentu akan menjadi kekuatan yang dapat diperhitungkan dalam pemberdayaan perempuan.

***

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Keberadaan Majelis taklim merupakan bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan kaum muslim (jamaah) dalam pembinaan keagamaan. Majelis taklim ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pengajaran dan pembinaan agama bagi para jamaahnya tetapi juga berperan sebagai lembaga sosial budaya maupun ekonomi terutama ikut serta dalam memberdayakan kaum perempuan (jamaah). Pemberdayaan perempuan di kalangan majelis taklim memiliki potensi yang cukup strategis dalam

meningkatkan peran perempuan sehingga benar-benar mandiri. Jika tersedia program pemberdayaan yang terencana dan terukur, tentulah akan berdampak positif lagi bagi pemberdayaan majelis taklim di masa yang akan datang.

Perlu partisipasi dari berbagai pihak untuk memberikan pembinaan khusus kepada majelis taklim seperti pemberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola dan ustadz serta ustadzah secara simultan, sehingga dalam pengelolaan/manajemen dan proses pembelajaran dilakukan secara baik sehingga dapat meningkatkan pemahaman keagamaan dan taraf hidup yang lebih baik bagi jamaah. Perlu dilakukan kerjasama, dalam pemberdayaan perempuan di majelis taklim, dengan semua pihak agar peningkatan peran kaum perempuan dapat terwujud secara mandiri. Selain itu Kemenag, lembaga keagamaan dan lembaga majelis taklim perlu menyusun program kegiatan, kurikulum, dan silabus secara terencana dan terukur sehingga tujuan yang akan dicapai dapat berjalan dengan baik []

PENELITIAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

3 Pesantren APIK Kaliwungu Kendal Melawan Arus Pendidikan Global

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Pesantren APIK Kaliwungu Kendal Melawan Arus Pendidikan Global[1]

Geliat pesantren tradisional berbasis tafaqquh fī al-dīn memerankan fungsi sebagai transmisi dan transfer keilmuan Islam, pemeliharaan tradisi Islam dan penciptaan atau reproduksi kader-kader ulama dengan kualitas yang tinggi dan mempunyai ciri yang khas sebagai pesantren ilmu alat dan fiqh. Distingsi lembaga pendidikan inilah yang akan bisa bertahan ditengah gempuran modernisasi.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan *tafaqquh fī al-dīn* khas Indonesia yang berjasa dalam mengantarkan eksistensi negara Indonesia. Pesantren memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Keunikan dan daya tarik pondok pesantren tersebut terlihat dari sosok luarnya, kehidupan kesehariannya, potensi dirinya, isi pendidikannya, maupun sistem , dan metode yang dikembangkan di pesantren. Semua itu, menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan ilmuwan muslim maupun non-muslim dalam melakukan

1 Tulisan ini diambil dari hasil penelitian tentang pengajaran kitab kuning di Pesantren APIK Kaliwunggu Kendal, tahun 2012.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

kajian atau studi tentang pesantren.

Keunikan dunia pesantren, tatkala menghadapi perubahan sosial masyarakat, adalah kemampuanya melakukan adaptasi dan kreasi dengan kebutuhan dan harapan penggunanya (masyarakat) sesuai kaidah yang menjadi rujukan pesantren "*al-muḥāfadatu 'alā al-qadīmi al-ṣāliḥ wa al-ahdu bi al-jadīdi al-aslaḥ*. Dalam menyikapi perubahan, terdapat dua model penyelenggaraan pendidikan pesantren, yaitu sebagian pesantren melakukan adaptasi terhadap aspek kelembagaan, kurikulum, pengelolaan, dan lain-lain. Pesantren menyelenggarakan sistem madrasah/kelasikal dan kurikulumnya menyesuaikan dengan kurikulum pemerintah dengan membuka lembaga pendidikan formal Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), atau Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bahkan sampai peruruan tinggi.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Sebagian pesantren lainnya, masih tetap menyelenggarakan sistem pendidikan khas pesantren secara mandiri baik kurikulumnya maupun proses pembelajaran dan pendidikannya. Sistem pendidikan khas pesantren ini dapat berbetuk model salafiyah yang pengajarannya berbasis kitab kuning maupun model *muallimin* yang berbasis *dirasah islamiyah*. Model satuan pendidikan ini, lulusannya tidak memiliki legalitas formal ijazah seperti lulusan pada pendidikan formal, lulusannya hanya mendapatkan ijazah dari pesantren.

Menurut Azra terdapat tiga peran tradisional pesantren, yaitu sebagai transmisi ilmu dan pengetahuan Islam (*transmission of Islamic knowledge*), pemeliharaan tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*), dan reproduksi (calon-calon) ulama (*reproduction of 'ulama*)".[2] Dalam perkembangannya, pesantren sebagai lembaga pendidikan *tafaqquh fī al-dīn* dengan kitab kuning sebagai sumber pengajarnnya, mengalami pergeseran. Pergeseran dalam sistem pendidikan, metode pengajaran, otoritatif kyai dalam bidang-bidang keilmuan tertentu, minat masyarakat pada kajian kitab, mengalami krisis kader ulama, dan lain-lain. Hasil survei pengajaran kitab kuning tahun 2011 yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Pendidikan Agama dan Keagamaan menemukan bahwa dari 289 kitab kuning yang disurvei, frekuensi pengajaran kitab kuning dalam beragam bidang keilmuan tergolong rendah dilihat dari tingkat keterpilihan kitab-kitab itu oleh kyai (12,3%) dan santri (10,3%). Demikian juga dilihat dari jumlah kitab yang diajarkan diatas 50% kyai dan santri juga tergolong rendah.[3]

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

2 Azyumardi Azra dan Jamhari. 2006. "Pendidikan Islam Indonesia Dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Historis." dalam *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*, Ed. Jajat Burhanuddin dan Dina Afrianty. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13.

3 Husen Hasan Basri dkk. 2012. *Survei Pengajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat.

Mekipun demikian, dari sekian banyak pesantren yang ada masih terdapat pesantren yang *istiqamah* dan fokus mengembangkan pendidikan *tafaqquh fiddin* berbasis pengajaran kitab-kitab kuning. Salah satunya Pondok Pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu Kendal Jawa Tengah. Pesantren ini memiliki peran yang kuat terkait dengan bertahannya lembaga pendidikan tradisional ini di tengah-tengah sistem lembaga pendidikan formal lainnya yang memiliki *civil effect*. Selain itu, Pesantren APIK Kaliwungu ini dipilih karena pesantren ini memfokuskan pengajarannya pada kitab-kitab *turast*/kitab kuning yang secara tradisi pengajaran kitab kuningnya kuat dan secara historis menghasilkan para tokoh (dai/*mubaligh*, dan ulama).

Tulisan ini mendeskripsikan tentang bagaimana sistem pendidikan Pesantren Salafiyah APIK kaliwungu Kendal Jawa Tengah dikembangkan dan bagaimana peran lembaga pendidikan ini tetap eksis di tengah arus modernisasi pendidikan.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Potret Pondok Pesantren APIK Kaliwungu

Lokasi Pondok Pesantren Asrama Pelajar Islam Kauman (APIK) Kaliwungu sangat strategis dan mudah dijangkau dari segala penjuru kota baik Semarang, Kendal, maupun daerah sekitar sehingga pondok pesantren ini mudah dikenal. Letaknya juga bersebelahan dengan jalan raya dan alun-alun dimana komunitas masyarakat sering berkumpul karena adanya kegiatan sosial yang diadakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar.

Kaliwungu dikenal sebagai kota santri, lebih dari 25 pondok pesantren tersebar di Kaliwungu. Pondok Pesantren APIK merupakan pesantren tertua. Disamping Kaliwungu, terdapat pesantren besar dan umumnya adalah pesantren salafiyah, misalnya Pondok Pesantren al-Fadlu, Pondok Pesantren al-Irsyad, Pondok Pesantren Bani Umar al-Karim, dan Pondok Pesantren ARIS. Statusnya sebagai pondok pesantren tertua menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin mendalami ilmu agama Islam.

Secara historis Pondok Pesantren APIK Kaliwungu Kendal didirikan oleh KH. Irfan bin Musa bin Abdullah Ghafi bin Ma'arif bin Qamaruddin bin Jiwosuto (panembahan mataram) pada tanggal 12 Februari 1919. Awalnya pesantren ini dinamakan *al-Ma'had Salafi al-Kaumani*. Pemberian nama ini didasarkan pada fakta bahwa para santri yang belajar di sana berasal dari sekitar Masjid Jami' Kaliwungu. Saat itu, masyarakat yang tinggal di sekitar masjid disebut masyarakat kauman. Sementara tujuan kegiatan belajar tersebut agar para santri mengetahui dan meneladani orang shaleh terdahulu *(salafiyah*).

PUSLITBANG
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Seiring banyaknya santri yang tidak hanya belajar dari daerah sekitar, pendiri dan komunitas masyarakat Kaliwungu menyediakan asrama bagi para santri yang berasal dari luar daerah Kaliwungu. Bangunan asrama ini merupakan sumbangan wakaf dari kakak KH. Irfan bin Musa, yaitu KH. Abdullah Rasyid yang berprofesi sebagai pedagang sukses. Selain itu diperoleh dari sumbangan dan infak dari masyarakat sekitar.

Sepeninggal KH. Irfan bin Musa pada tahun 1932 M, estafet kepemimpinan sementara diserahkan kepada KH. Ahmad Rukyat (salah satu keponakanya), karena saat itu putera-puteri KH. Irfan bin Musa belum mampu mengemban tugas mengasuh pondok pesantren. Pondok Pesantren APIK Kaliwungu pada masa kepemimpinan KH. Ahmad Rukyat mengalami perkembangan yang pesat, karena pada saat itu merupakan masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan rumah pendiri pondok dijadikan sebagai posko palang merah. Pada masa inilah nama pondok pesantren *Salafi al-Kaumani* berubah menjadi Asrama Pelajar Islam Kauman (APIK) Kaliwungu. Perubahan nama ini didasarkan pada situasi pergolakan politik negara dengan munculnya organisasi-organisasi masa seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama dan organisasi kepemudaan.

Setelah wafatnya KH. Ahmad Rukyat pada tahun 1968, Pondok APIK yang semula pengajarannya hanya menggunakan sistem *bandongan* dan *sorogan*, kemudian dibuka madrasah dengan sistem kelasikal. Pada masa generasi ketiga, nama APIK tidak lagi diartikan sebagai sebuah singkatan melainkan merupakan sebuah ungkapan dalam Bahasa Jawa yang berarti baik dengan harapan agar para santri menjadi santri atau manusia yang baik akhlaknya.

Pondok Pesantren APIK Kaliwungu adalah pondok pesantren milik keluarga, sehinga sejak berdiri hingga sekarang, kepemimpinan pondok dipegang oleh para kyai keturunan atau kerabat dari pendirinya. Sejak tahun

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

1919 hingga sekarang pondok telah mengalami empak kali pergantian kepemimpinan. Diantara periodisasi kepemimpinan pesantren APIK adalah:

1. KH. Irfan bin Musa (1919-1931 M);
2. KH. Ahmad Rukyat (1931-1968 M);
3. KH. Humaidullah Irfan (1968-1985 M);
4. KH. Imron Humaidullah (1985-2003); dan
5. KH Sholahuddin Humaidullah (2003 hingga saat ini).

Visi dan misi Pondok Pesantren APIK Kaliwungu adalah mencetak generasi muslim *alim* yang *amil* dengan melestarikan dan mempertahankan kemurnian ajaran Islam dan paham konsep *ahlussunnah wal jamaah* dan meningkatkan pemberdayaan umat. Sedangkan visinya adalah menyebarkan ajaran Islam dan risalah *nabawiyah* yang *rahmatan li al-'ālamīn.*

Untuk mencapai visi dan misinya tersebut, tujuan Pondok Pesantren APIK Kaliwungu adalah terciptanya muslim yang *'ālim* dan yang *'āmil*, yaitu yang bukan hanya berpengetahuan agama namun juga berakhlak mulia dan dapat mengamalkannya ajaran agama Islam untuk dirinya dan masyarakat luas. Sosok pribadi tersebut diharapkan oleh masyarakat sebagai tokoh spritual panutan umat. Tidak hanya harus mampu memimpin acara-acara keagamaan namun juga harus mampu memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Pengelolaan Pesantren

Pondok Pesantren APIK Kaliwungu merupakan salah pesantren salafiyah yang masih tetap mempertahankan sistem pendidikan berbasis kitab kuning. Keberadaan pesantren ini tidak terlepas dari pengelola, dalam hal ini pimpinan pesantren, dalam mempertahankan eksistensinya. Saat ini, pengelolaan pesantren dipimpin oleh seorang kyai (pengasuh) yang dibantu oleh kepala pondok pesantren (lurah), wakil, dan jajarannya, yang meliputi sekretaris, bendahara, pendidikan, keamanan, perlengkapan, perweselan, Kesehatan, Keselamatan dan Kemaanan (K3), dan tata usaha. Pondok Pesantren APIK Kaliwungu memiliki empat komplek, pada setiap kompleknya dipimpin oleh kepala atau yang sering dikenal sebutan kepala *jam'iyah*.

Sistem pengelolaan pesantren terdiri dari pengasuh atau pelindung dan penasehat. Mereka berasal dari keluarga pendiri pondok pesantren. Sementara lurah atau kepala pondok dan Kepala Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) adalah para alumni atau *mutakharrijin* yang mendapatkan amanah dari para kyai sepuh yang masing-masing memiliki stuktur kepengurusan tersendiri.

Selama proses kegiatan belajar mengajar, baik pengajian di pondok maupun di madrasah, pengurus dan dewan *asatidh* tidak dibebani aturan dari pengasuh atau *dhurriyah*. Mereka diberikan kebebasan untuk melakukan terobosan/inovasi dalam menyelesaikan kepesantrenan dan kegiatan belajar mengajar di madrasah. Hanya saja dengan syarat harus tetap berkoordinasi dengan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

pengasuh. Kebijakan ini harus diselesaikan dalam suasana demokratis. Semua persoalan dapat diselesaikan pada tingkat pengurus (pengajar) sedangkan pengasuh hanya menerima informasi.[4] Sistem pengelolaan Pondok Pesantren APIK Kaliwungu ini menggambarkan telah terjadinya pola pendelagasian wewenang dari pimpinan/kyai kepada para pengusus pondok maupun madrasah yang pada umumnya adalah para alumni pesantren.

Pondok Pesantren APIK Kaliwungu hingga saat ini focus pada pendidikan *tafaqquh fī al-dīn*, sedangkan sistem pendidikannya dilakukan melalui sistem madrasah (kelasikal) secara berjenjang, yaitu jenjang persiapan (SP) selama dua tahun, jenjang MTS selama tiga tahun, dan jenjang MA selama tiga tahun. Selain itu, metode pengajaran dilakukan secara *bandongan* dan *sorogan* (non-kelasikal).

Untuk memenuhi harapan dan keinginan santri atau masyarakat, pesantren juga membuka program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) salafiyah bagi santri yang belum memilki iijazah SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan Paket C (ikut program Kementerian Pendidikan Nasional) bagi santri yang belum memilki ijazah SMA/MA. Bagi pesantren, program ini direspon baik selama tidak menggangu kegiatan utama di pondok pesantren (*tafaqquh fī al-dīn*).

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

4 Wawancara dengan KH Fadlullah Turmudzi, *Pembina/Penasehat Pesantren APIK*, tanggal 1 November 2012

Penopang Kegiatan Pesantren

Sarana pendidikan, selain gedung-gedung madrasah yang menjadi sarana utama, asrama, dan Masjid Jami' al-Muttaqin, Pondok Pesantren APIK Kaliwungu juga mempunyai fungsi yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Pondok pesantren APIK Kaliwungu, khususnya dalam pembinaan kepribadian santri. Di asrama, santri juga belajar hidup secara mandiri dengan mengurus keperluan hidupnya sendiri mulai dari keperluan makan, minum, mencuci pakaian, menyeterika, dan lain-lain. Untuk keperluan makan dan minum, sebagian santri ada yang memasak sendiri dan sebagian lainnya membeli di salah satu dari dua kantin pesantren atau di luar komplek pesantren.

Masjid Jami al-Muttaqien yang terletak di samping pondok adalah milik masyarakat Kaliwungu dan dibangun dengan dana dari masyarakat pula. Di masjid inilah santri beribadah setiap waktu. Peraturan pondok mengharuskan setiap santri untuk mengikuti shalat jamaah lima waktu. Masjid ini juga berfungsi sebagai aula umum bagi aktifitas santri seperti kegiatan *Jam'iyah Kubra*.

PENGUATAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Perpustakaan Pondok Pesantren APIK Kaliwungu yang terletak di dalam pesantren merupakan sarana atau media dalam meningkatkan wawasan keilmuan dilengkapi dengan buku-buku referensi umum (pendidikan, politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan lain-lain) dan juga pendidikan agama, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab yang jumlahnya lebih dari 300 judul buku. Perpustakaan juga sebagai media

untuk menggali khazanah di luar refernsi kitab kuning. Dari segi pengelolaan, terdapat pengurus yang mengatur mekanisme pinjaman atau aturan jam membaca dilengkapi juga daftar berkunjung.

Selain itu, keberadaan koperasi Pondok Pesantren APIK Kaliwungu berfungsi sebagai sarana menyediakan kebutuhan santri baik berupa kebutuhan sehari-hari (alat-alat tulis, buku, dll), maupun kitab-kitab yang digunakan oleh santri dalam belajar. Namun tidak semuanya dikelola secara komersial, sebab koperasi hanya sebagai kegiatan ekstra bagi santri pesantren. Sedangkan hasil koperasi juga digunakan sebagai tambahan biaya operasional bagi santri yang tidak mampu secara ekonomi. Koperasi pesantren juga menjadi jaringan koperasi bagi pesantren-pesantren dan madrasah di Kaliwungu dan di luar Kaliwungu dalam memenuhi kebutuhan kitab kuning.[5]

— – ƒ • Š ƒ ”: ”Tenaga Pengajar Unggul Pesantren

Salah satu pilar utama pesantren adalah tenaga pengajar/ustdaz. Tenaga pengajar Pondok Pesantren APIK Kaliwungu terdiri dari para kyai atau sesepuh pesantren yang merupakan keturunan pendiri pesantren dan para alumni yang diangkat oleh pimpinan pesantren. Para kyai dan keturunan pendiri pada umumnya berlatar belakang pendidikan pesantren yang secara keilmuan masih memiliki *geneologi* keilmuan dari awal para pendiri hingga kepemimpinan saat ini. Mereka umumnya pernah

5 Wawancara dengan KH Fadlullah Turmudzi, *Pembina Pesantren APIK*, Tanggal 1 Nopember 2012

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

belajar di pesantren Lirboyo Kediri, Tegalrejo Magelang, dan lain-lain.

Secara keseluruhan tenaga pengajar di madrasah atau pondok berjumlah 36 ustadz yang seluruhnya di bawah bimibingan dan arahan kyai. Mereka adalah para santri senior yang telah menamatkan pendidikannya di pesantren ini. Menurut pesantren, mengajar merupakan bagian dari pendidikan pondok pesantren sekaligus merupakan wahana pematangan diri baik nalar maupun emosi guna melatih mereka sebelum terjun ke masyarakat. Para ustadz tersebut tidak diberi gaji layaknya di sekolah-sekolah umum, namun cukup sekedar *bisyārah* untuk keperluan keilmuan mereka. Kedudukan *asatidh* dalam pondok memilki dua fungsi pokok, yaitu sebagai latihan penumbuhan kemampuannya untuk menjadi kyai di kemudian hari dan sebagai pembantu kyai dalam mendidik para santri.[6]

Rekruitmen tenaga pengajar/ustadz di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu masih mengandalkan dari kalangan alumni (*mutakharrijīn*). Estafet ini tetap berlangsung hingga saat ini. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian alumni atau *mutakharijin* terhadap almamaternya. Selama pengabdian dalam mengajar mereka diberikan semacam perjanjian mengajar minimal empat tahun, kecuali mereka ada *udhur syar'i* (seperti menikah). Masa empat tahun pengabdian ini menurut para sesepuh dianggap sudah cukup dalam penanaman

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

6 Dokumen Purna Siswa Kelas III Aliyah Tahun 2010

komitmen dan totalitas pengabdian *mutakharrijīn*. Model pengabdian alumni Pondok Pesantren APIK Kaliwungu banyak diminati oleh pondok pesantren lain dalam mengembangkan pesantrennya.

Pada setiap kelas dari tingkatan SP sampai tingkat dua aliyah terdapat *mustahik* (wali kelas) yang berasal dari dewan *asatidh* (alumni). Sedangkan pada kelas tiga aliyah wali kelasnya (*mustahik*) dipegang langsung oleh para pengasuh/pembina pondok. Diantara syarat menjadi tenaga pengajar di MSMH adalah dapat menguasai anak didik sampai kehidupannya dan dianggap seperti orang tua sendiri. Guru mendapatkan pengalaman seluruh pelajaran dari tingkat SP sampai kelas aliyah, karena setiap guru yang menjadi mustahik memegang kelas SP sampai aliyah, tidak berganti-ganti secara tingkatan.[7]

Perekruitan tenaga pengajar diambil dari kalangan sendiri, di satu sisi mempermudah mengetahui kualitas keilmuan maupun personal para ustadz dan pertimbangan biaya operasional yang bisa diminimalisir. Namun di sisi lain, perekrutan ini menjadi kendala, terutama jika merekruit ustadz dari luar, suasana pembelajaran baru yang mungkin bisa dirasakan. Rekruitmen tenaga pengajar dari kalangan sendiri akan bermakna bila para ustadz tersebut kemudian diberdayakan dengan mengikuti program *in service training* dengan lembaga yang berkarateristik sama. Pondok Pesantren APIK

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

7 Wawancara dengan Ustad Abd. Nafi, *Kepala MSMH APIK*, Tanggal 29 Oktober 2012

Kaliwungu juga memberikan beasiswa kepada para ustadz untuk meningkatkan keilmuannya dengan menuntut ilmu di perguruan tinggi sehingga akan membawa pendidikan baru yang berguna bagi pengembangan pembelajaran di lingkungan pondok.

Santri Kauman dan Non Kauman

Pondok Pesantren APIK Kaliwungu dibangun di atas tanah seluas 5.000 m2. Secara keseluruhan jumlah santri tahun 2012 sebanyak 581 orang yang seluruhnya adalah laki-laki. Santri di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu dibedakan dalam dua kelompok santri, yaitu santri kauman dan santri non-kauman. Santri kauman adalah santri yang tinggal di asrama pondok pesantren yang menempati kamar-kamar yang berjumlah kurang lebih 170 kamar. Mereka diorganisasikan dalam beberapa *jam'iyah*, yakni organisasi santri tingkat kompleks. Masing-masing komplek/*jam'iyah* dibawahi pimpinan *jam'iyah* yang merupakan bawahan dari lurah pondok yang dipilih dari para santri yang telah lulus dari aliyah. Masing-masing *jam'iyah* membawahi sekitar 30–40 kamar. Mereka memiliki tugas mengawasi para santri di lingkungan *jam'iyah*nya, khususnya dalam hal penggunaan air, keamanan, ketertiban, kebersihan, tingkah laku, dan sikap sehari-hari santri. Di samping itu juga bertanggungjawab menyelengarakan kegiatan-kegitan santri tingkat *jam'iyah*.

Sementara itu santri *non-kauman* adalah santri yang tinggalnya di luar Pondok Pesantren APIK Kaliwungu, tetapi mereka mengikuti kegiatan belajar di MSMH.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Mereka biasanya terdiri dari penduduk setempat atau santri dari pesantren lain di sekitar Pondok Pesantren APIK Kaliwungu yang tidak menyediakan sistem kelasikal. Santri jenis ini jumlahnya kecil, sekitar 10% dari keseluruhan santri.

Para santri Pondok Pesantren APIK Kaliwungu berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah (Brebes, Tegal, Pemalang, Batang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak), Jawa Barat (Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Subang, Karawang), Banten (Serang, Pandeglang), Jawa Timur (Banyuwangi, Nganjuk, Madura), dan luar Jawa, bahkan luar negeri.

Semua santri yang telah lulus aliyah dapat mengikuti pengajian *muthalaah* bersama kyai. Pengajian ini merupakan kegiatan ekstra kurikuler. Adapun pelaksanaannya berupa *ifadah* dan *istifadah*. *Ifadah* adalah mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama di pesantren dengan cara mengajar para santri. Sedangkan *istifadah* yaitu mengambil faedah dalam mengkaji dan mendalami ilmu yang ada dalam kitab klasik dengan para kyai selama kurang lebih empat tahun. Setelah mengikuti ini para santri boleh memilih apakah masih tetap tinggal di pesantren atau tidak. Jadi bagi para santri yang merasa cukup ilmunya atau sebab lain, boleh meninggalkan pesantren. Tetapi bagi santri yang masih perlu menimba ilmu yang lebih mendalam boleh tetap tinggal selama yang mereka inginkan.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Kurikulum: Perpaduan Sistem Pengajaran Klasikal dan Non-Klasikal

Awalnya sistem pengajaran yang dikembangkan di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu seperti pada umumnya adalah sistem non-kelasikal dengan metode *bandongan* dan *sorogan*. Pada dasarnya kurikulum utama dalam pendidikan pesantren adalah kyai dan kitab kuning, melalui kyai -yang memiliki otoritas keilmuan dalam Islam- kurikulum pendidikan pesantren ditransmisikan kepada para santri atau masyarakat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang kian kritis dan maju yang mengiginkan adanya sistem atau metode pendidikan yang lebih efektif dan efesien, selain itu untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang semakin terpisah dari tuntutan syariat agama (fikih), Pondok Pesantren APIK Kaliwungu merasa terpanggil untuk memfokuskan spesifikasi pendidikan pada fikih. Untuk itu dibentuklah sistem kelasikal dengan didirikannya MSMH pada tahun 1940 dan diperbahariui tahun 1969 dengan tanpa harus meninggalkan sistem lama.

Sistem kelasikal dilaksanakan di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu melalui MSMH yang sepenuhnya mengajarkan kitab kuning dengan maksud agar pesantren ini tetap terjaga kemurnian dan kemandiriannya. Menurut KH. Fadlullah Turmudzi:

"sistem klasikal ini bertujuan agar para santri memenuhi kesungguhan, keseriusan dalam meningkatkan keberhasilan pembelajaran kitab kuning. Dengan sistem kelasikal, para santri harus mengikuti beberapa aturan, jenjang/kenaikan, evaluasi, kompetisi dan sebagainya.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Sebaliknya bila hanya mengaji saja, para santri tidak ada dorongan dan semangat untuk meningkatkan kualitas belajarnya karena bersifat bebas dan sukarela."[8]

Pendidikan MSMH dilakukan secara berjenjang dengan masa tempuh delapan tahun yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu tingkat persiapan/*i'dadiyah* (SP) yang ditempuh selama dua tahun. Pada tingkat ini materi yang diajarkan fokus pada pelatihan membaca al-Qur'an (*qiraati*) ditambah dengan pengamalan ibadah-ibadah keagamaan seperti shalat, puasa, zakat, dan rukun Islam lainnya. Selain itu pada tingkatan ini diajarkan pula dasar-dasar ilmu *Nahwu* dan *sharaf* sebagai bekal nanti jika telah menginjak kelas yang diatasnya. Adapun mata pelajaran yang dikaji adalah sebagai berikut:

Table 1
Kurikulum *I'dadiyah* (SP)

KEILMUAN	TINGKAT PERSIAPAN	
	I	II
Nahwu/Lughat	Sulam alMubtadi dan B. Arab	Matan Jurmiyah (bahasa pengantar Indonesia/Arab pegon) dan Mukhtashar Jiddan
Aqidah	Aqida al-Awām	Kharidat al-Bahiyah
Fiqh	Fashalatan dan Mabādi al-Fikhiyah	Safina al-shalāt
Akhlak	Nadham 'Alāla	Tanbih al-Mata'alim dan Akhlāk li al-Banīn
Tajwid	Tanwir al- Qāri'	Hidāya al-Sibyān
Al-Qur'an	Qiraati Juz I	Qir-ati Juz II

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren APIK Kaliwungu

8 *Ibid.*

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Tingkat selanjutnya adalah tsanawiyah. Tingkat ini ditempuh selama tiga tahun yang lebih difokuskan pada penguasaan tata bahasa arab yang meliputi ilmu *Nahwu, Sharaf, Fiqh* dan Pendidikan Aqidah. Adapun rincian mata pelajarannya adalah sebagai berikut:

Table 2
Kurikulum Tingkat Tsanawiyah

FAN KEILMUAN	TINGKAT TSANAWIYAH		
	I	II	III
Nahwu/ Lughat	Matan Jurmiyah (matan Qaulu), Syarah Asmawī, Awam al-Jurjani	Nadhām Imriti, Fath al-Rab al-Bariyah dan Qawaid al-'irāb	Nadham al-Fiyah ibnu Malik I dan Syarah al-Fiyah Ibn Aqil
Sharaf/ Lughat	Amsila al-Tas-rifiyah II (Tasrif Lughawi)	Nadham Maqsud	--
Aqidah	Jawāhir al-Kalāmiyah	Al-Durār al-Farid	Tijan Darari
Fiqh	Safinat al-Najāh	Bafadhal	Fath al-Qarib
Akhlak	Washaya	Ta'lim al-Muta'allim	--
Tarikh	Khulaṣah Nūr al-Yaqīn	--	--
Tajwid	Tuhfat al-Atfal	Nadham Jazari-yah	--
Kaligrafi	Qawaid al-Khat al-Arabbiy	--	--
Hadits	--	Al-'Arbaīn	Bulūgh al-Marām I
Ushul Fiqh	--	--	Al-Waraqat
Musthola-hul Hadits	--	--	Al-Baiquniyah

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren APIK Kaliwungu

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Sedangkan tingkat paling atas adalah aliyah yang ditempuh selama tiga tahun. Dalam tingkatan ini para santri ditekankan pada pemahaman dan aplikasi (amaliyah) materi pelajaran, disamping ada tuntutan hafalan. Santri harus dapat bisa membaca, memahami, dan sekaligus mengamalkannya. Ilmu *Fiqh* mendapatkan perhatian khusus terutama tentang muamalah dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Disamping itu diajarkan pula tentang ilmu sastra bahasa arab *(balaghah),* ilmu logika *(mantiq),* ilmu aqidah*,* ilmu *ushul al- fiqh dan tashawuf*.

Table 3
Kurikulum Tingkat Aliyah

FAN KEIL-MUAN	TINGKAT ALIYAH		
	I	II	III
Nahwu/ Lughat	*Nadham al-Fiyah Ibn Malik II dan Syarah Dahlan Al-Fiyah*	*Nadham Imriti, Fath al-Rab al-Bariyah* dan *Qawā'id al-I'rāb*	*Nadham Alfi-yah Ibnu Malik I dan Syarah Al-fiyah Ibnu Aqil*
Aqidah	*Kifayat al-Awām*	*Um al-Narahin*	-
Fiqh	*Fath al-Muin I*	Fath al-Muin II	*Kanz al-Roghib-in (Mahalli) Juz 1 -4*
Hadits	*Bulughul Maram II*	--	*Al-Muwatta'*
Ushul Fiqh	*Nadham Tasi-lutturuqat*	*Lub al-Uṣūl*	*Jam'ul Jawami*
Musthalahul Hadits	*Minhatul Mugits*	--	--
Fiqh Mawaris	*Iddat al-Faridl*	-	--

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Balaghah (sastera)	--	*Nadham Jauhar Maknun, Husnu al-Shiyāgh dan Hilya al-Lub al-Mashūn*	*Uqud al-Jumān*
Mantik (Logika)	--	*Sulam al-Manawaraq*	--
Ilmu Bahar	--	*Nadham Arudl*	--
Qawaidul Fiqhiyah	--	*Nadham Farāid al-Bahiyah*	*Al-Baiquniyah*
Tafsir	--	--	*Tafsir Jalalain*
Tasawuf	--	--	*Minhaj al-Abidīn*

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren APIK Kaliwungu

Jenjang atau tingkatan santri ditentukan oleh kemampuan santri itu sendiri. Usia atau pendidikan tinggi tidak menjadi jaminan santri bisa masuk di jenjang dasar atau menengah. Menurut Kepala MSMH Abdullah Nafi, calon santri tidak harus mengikuti pelajaran sejak di SP, namun bisa saja masuk pada tingkat diatasnya, tergantung kemampuan tes pada saat masuk pondok. Untuk tingkat persiapan kelas dua harus hafal *Matan Jurmiyah*, tsnawiyah kelas sastu harus hafal seluruh bait *Awamil*, kelas dua hafal kitab *Imriti* dan kelas tiga hafal kitab *al-Fiyah Ibn Malik*. Untuk masuk kelas satu aliyah harus hafal seluruh bait kitab *Alfiyah*, kelas dua kitab Jauharul Maknun dan membaca kitab *Fath al-Muin*.[9]

Penerapan sistem kelasikal dalam pembelajaran di

9 Wawancara dengan Ustd. Abd. Nafi, *Kepala MSMH APIK*, 29 September 2012

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Pondok Pesantren APIK Kaliwungu ini telah menjadi kelebihan tersendiri, sehingga banyak santri dari pondok pesantren salaf lain yang mengikuti pendidikan di MSMH Pondok Pesantren APIK Kaliwungu. Pembelajaran dengan sistem kelasikal yang diterapkan di pondok pesantren ini secara manajemen mengadopsi sistem kelasikal lembaga atau sekolah umum lainnya namun dari sisi materi yang diajarkan di pondok pesantren tersebut murni materi keagamaan yang bersumber dari kitab kuning. Dalam bidang kurikulum, Pondok Pesantren APIK Kaliwungu yang tetap mempertahankan bahan materi yang bersumber dari kitab kuning didukung metode kelasikal, dinilai cukup efektif dalam menjaring peminat untuk belajar di pondok pesantren tersebut. Menjadi daya tarik bagi para calon santri adalah diterapkannya metode kelasikal dalam pengajarannya dimana pada yang mulanya hanya berupa *sorogan* dan *bandongan*. Sementara program pengajarannya dilaksanakan dengan mengacu pada kalender kerja pondok.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Kegiatan pendidikan di madrasah dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jum'at dari pukul 07.30-11.30 WIB di dalam kelas. Pukul 15.30-17.30 WIB para santri mengikuti kegiatan di kelasnya masing-masing. Pukul 19.30-21.30 WIB mereka mengikuti musyawarah sesuai kelas masing-masing. Kegiatan ini dipimpin oleh *rois* (ketua) kelas dan dibimbing *mustahiq* (wali) kelas dan *munain* (guru mata pelajaran) kelas untuk mendiskusikan berbagai permasalahan berkaitan dengan materi pelajaran yang sudah diterima di kelas, terutama bidang Nahwu dan Fiqh.

Setiap masalah yang muncul dicoba untuk dipecahkan oleh santri. Namun bila tidak terselesaikan maka akan dijawab oleh wali kelas atau guru mata pelajaran.

Selain mengikuti kegiatan kelasikal, para santri juga dapat mengikuti pengajaran bebas yang dilaksanakan di beberapa tempat setelah shalat lima waktu dengan materi yang beragam dan santri dapat memilih sesuai dengan minat mereka masing-masing. Setiap malam Jum'at kliwon dilakukan *jam'iyah kubra* yang diikuti seluruh santri, berisi acara *istighasah, dibaan, barjanzi, yasin, tahlil,* dan sambutan dari ketua *jam'iyah*, kepala pondok, kepala madrasah, dan terakhir *mauidhah* dari pimpinan pesantren. Sedangkan pada Jum'at biasa dilaksanakan *jam'iyah sugra.* Dalam kegiatan ini para santri secara bergiliran menurut komplek asrama mendapat tugas memimpin tahlil, membaca al-Qur'an, *al-Barjanzi* dan latihan pidato. Acara diakhiri dengan ulasan dari ustadz atau pimpinan pesantren.

Kurikulum pendidikan yang ada di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu disusun berdasarkan tingkat kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah-masalah yang dibahas dalam kitab. Sedangkan masa pendidikan yang ada di pesantren ini melalui sistem kelasikal yang berdasarkan tingkat dan jenjang pendidikan dan sistem non-kelasikal yakni membaca kitab klasik dengan metode *sorogan, bandongan/wetonan*. Pimpinan pesantren mengatur pengajian sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh para ustadz. Para santri bebas untuk memilih dan mengikutinya sesuai dengan tingkatan dan kemampuannya.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Bagi santri yang telah lulus (*mutakharrijīn*) dari pendidikan di pesantren, dianjurkan untuk melakukan pengabdian minimal satu tahun. Selama pengabdian itu mereka boleh menetap di asrama pondok pesantren untuk mengikuti pengajian pada kyai dan mendalami ilmu sehingga lebih matang yang disebut *takhasus*. *Takhasus* ini artinya proses pengajian khusus yang diikuti oleh para santri yang telah lulus aliyah dengan jangka waktu satu sampai empat tahun.

Meskipun kurikulum yang dilaksanakan sepenuhnya bersifat keagamaan yang berbasis kitab kuning, ijazahnya dapat diakui (tanpa harus ijazah formal) oleh lembaga pendidikan perguruan tinggi seperti IAIN Walisongo Semarang, Unissula Semarang, Universitas Tribakti Kediri, Unnamas, UNSIQ Wonosobo. Untuk memenuhi harapan masayarakat, pesantren sejak tahun 2006 membuka program wajib belajar pendidikan dasar untuk program *wustha* (setara MTs/SMP) dan tahun 2010 membuka program Paket C bagi santri yang belum memiliki ijazah SMA.

PENGUMPULAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Kitab kuning atau *kutub al-shafra* sebagai sumber utama pendidikan di pesantren dimaknai oleh Pondok Pesantren APIK Kaliwungu sebagai dokumentasi para ulama terdahulu (baik dari kalangan *mutaqadimīn* maupun *mutaakhhirīn*) yang diambil dari sumber al-Qur'an dan hadits yang berisi tentang persoalan keagamaan sebagai ikhtiar untuk menjalani kehidupan sesuai dengan Rasulullah yang isinya berkaitan dengan persoalan ibadah

mahdhah maupun *ghairumahdah*.[10] Pengertian kitab kuning bersifat umum dan longgar. Namun syarat utama dari pemilihan kitab-kitab yang digunakan di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu, yaitu harus kitab *mu'tabarah*. Kitab *mu'tabarah* ini sudah lazim diajarkan di pesantren salafiyah. Kitab *mu'tabarah* yaitu kitab yang diterima atau disepakati di kalangan mayoritas *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah* (aswaja). Kriterianya meliputi tiga aspek, yaitu profil pengarang, isi kitab tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadits, *ijma', dan qiyas*, serta manfaat dari kitab dimaksud.Menurut Imam Nafi', kitab *mu'tabarah* adalah kitab yang sudah diajarkan kepada santri dengan *sanad* yang bersambung sampai kepada nabi Muhammad SAW.[11]

Pengertian *mu'tabarah* ini sejalan dengan hasil para ulama NU dalam musyawarah nasional di Situbondo tahun 1983 yang menetapkan kategori kitab-kitab *mu'tabarah*. Menurut munas tersebut, kitab-kitab *mu'tabarah* haruslah kitab-kitab yang ditulis ulama-ulama madzhab, yakni para alim ulama yang menulis dan mengarang kitab dengan referensi utamanya ajaran madzhab yang empat itu. Apabila keputusan diambil dari sumber kitab selain itu maka ia dinyatakan tidak sah. Hal ini didasarkan pada keterangan yang terdapat dalam Kitab *Bughyat al-Mustarsyidin* halamanan 8, Kitab *I'anah al-Tālibin* Juz I halaman 17,l dan Kitab *Sab'at Kutub al-Mufidah*, halaman

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

10 Wawancara dengan KH Fadlullah Turmudzi, *Pembina Pesantren APIK*, 1 November 2012

11 Wawancara dengan Ustad Abd. Nafi, *Kepala MSMH APIK*, Tanggal 29 September 2012

50 yang arti teksnya adalah sebagai berikut:

"menurut ijma' ulama, sebagaimana dinukil Ibnu Shalah, tidak diperbolehkan bertaklid atau mengikuti pendapat hukum selain empat imam madzhab yang ada walaupun untuk diamalkan bagi dirinya sendiri, apalagi untuk berfatwa karena tidak adanya kredibilitas yang bersangkutan dibandingkan para imam madzhab tersebut" [12]

Dalam penentuan kitab kuning tersebut diatas sebagai sumber pengajaran di pesantren, dapat dikatakan bahwa Pondok Pesantren APIK Kaliwungu berusaha secara konsisten menjaga peran tradisonalnya dalam mentransmisikan ilmu agama Islam (*transmission of Islamic knowledge*) sehingga benar-benar selektif dalam menentukan bahan ajar (kitab kuning). Umumnya kitab-kitab yang diajarkan di pesantren salafiyah adalah kitab-kitab yang bermadzab Syafi'i. Meskipun dalam berbagai pesantren juga mengajarkan kitab yang bermadzab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu ini kebanyakan mengajarkan kitab yang bermadzab Syafi'i, sebagaimana yang terlihat dalam kurikulum yang diajarkan di pesantren ini.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Ekstrakurikuler: Wahana Pengembangan Minat dan Bakat Santri

Kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu merupakan kegiatan yang bertujuan mengembangkan bakat dan kreatifitas para santri. Karena pesantren menyadari meskipun tujuan utamanya adalah

12 Munawir Abdul Fatah. 2011. *Tradisi Orang-Orang NU*. Yogyakarta : LKiS, h. 24-26,

tafaqquh fī al-dīn, pesantren tetap memberikan ruang yang bersifat teknis yang bermanfaat untuk menopang ilmu pokok yang dipelajari, dikaji, dan diamalkan oleh para santrinya. Dengan demikian peranan pesantren di masyarakat tidak dikatakan *jumud (*ortodok) tetapi dinamis, fleksibel, dan selalu *up to date* dari masa ke masa, sesuai dengan semboyan pesantren "*al-muḥafadatu 'ala al-qadim al-ṣālih wa al-ahdu bi al-jadīd al-aslaḥ*".

Kegiatan ekstrakurikuler di MSMH atau Pondok Pesantren APIK Kaliwungu meliputi berbagai bidang yang dapat dipilih para santri sesuai dengan minat dan bakatnya. Diantara kegiatan ekstrakurikuler tersebut adalah:

1. *Bahtsul Masail* dan Musyawarah *Wustha*

   Kegiatan ini bertujuan membahas problematika kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum secara *syar'i* sebagai solusi jawaban dengan cara dimusyawarahkan. Metode yang digunakan adalah secara konvensional dan presentasi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dua minggu sekali. Peserta yang terlibat adalah para santri yang sudah berada pada tingkat aliyah. Sementara santri yang masih berada di bawahnya belum bisa diikutkan dalam forum ini, tetapi ada kegiatan kurikuler lain yang sifatnya sama seperti *bahtsul masail*, yaitu musyawarah *wustha*. Perbedaannya terletak pada materi yang dibahas. *Bahtsul masail* membahas masalah hukum *syar'i* terkait persoalan kehidupan manusia, sedangkan musyawarah wustho membahas

PENGGUNAKAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

materi ilmu *nahwu sharaf*. Kegiatan *bahtsul masail* ini terdiri dari 2 macam, yaitu: *bahtsul masail sugra* yang pelaksanaan dilakukan setiap dua minggu sekali dan *bahtsul masail kubra* yang dilakukan setiap setengah tahun sekali sebelum pelaksanaan tes semester.

2. *Falakiyah*

   Kegiatan ini dibentuk atas dasar tuntutan dari perlunya pengembangan kurikulum yang telah ada, namun tidak efisien bila dimasukkan dalam kurikulum dalam madrasah. Karena merupakan pelajaran baru maka pelajaran ini dilakukan di luar jam sekolah karena bersifat tambahan (ekstra). Kegiatan ini dilakukan tiap tiga minggu sekali dengan pembimbing dari dosen IAIN Semarang dan santri senior yang ahli dalam bidang ini. Kajian yang dibahas berkisar tentang penentuan arah kiblat dengan metode lama dan modern, penentuan jadwal waktu shalat dan imsak, mengadakan praktik *ru'yat al-hilal*, dan merumuskan penenggalan baik hijriyah maupun masehi. Dari hasil kegiatan ini pesantren teelah berhasil menerbitkan kalender sendiri.

3. *Jurnalistik*

   Kegiatan ini diinspirasi oleh para ulama terdahulu yang mengembangkan dan menyebarkan keilmuannya tidak hanya melalui tatap muka (langsung) tetapi menuliskan gagasan dan idenya dalam bentuk kitab. Bahkan semua kitab yang menjadi acuan pembelajaran para santri merupakan bukti konkrit karya ilmiah mereka. Latihan jurnalistik ini melahirkan mading

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

santri, yang berisi artikel, puisi, sastera, karikatur, laporan berita. Selain itu telah terbit buletin /majalah *Fajar Magazine* setiap bulannya. Sementara yang di luar pondok ada sebagian santri yang terlibat dalam jurnal yang diterbitkan RMI PCNU Kabupaten Kendal yang terbit tiga bulan sekali.

Tradisi menulis ini penting dipraktekkan sebagai bagian dari tradisi baca kitab kuning secara maknawi. Karena, tradisi menulis merupakan warisan intelektual Islam yang hampir belum berkembang di dunia pesantren. Padahal, dari tradisi menulis inilah banyak lahir ilmuwan muslim yang bekosentrasi pada segala cabang ilmu sehingga menjadi literatur utama kalangan akademis di barat maupun di timur.

4. *Muhadatsah* (Bahasa Arab)
   Kegiatan berkomunikasi dengan menggunkan bahasa lisan atau percakapan/dialog dengan orang lain. *Muhadatsah* ini merupakan salah satu bentuk program tambahan di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu. Pelaksanaannya membuat sebuah komunitas kecil dari para peserta (santri yang mengikutinya) kemudian menerapkan ketentuan berdialog dengan bahasa Arab atau secara simpel adalah menerapkan percakapan Bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari/sewaktu berlangsungnya kegiatan tertentu.
5. *Pelatihan Komputer*
   Kegiatan ini dilakukan setiap hari setelah kegiatan MSMH pukul 13.00- 15.30 WIB yang dipandu oleh

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

santri senior yag berkopenten. Prioritas mereka adalah menguasai administrasi surat menyurat terutama di organisasi daerah.

Penguatan Metode Pengajaran

Metode pengajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu sebagimana disebutkan di awal adalah menggunakan metode *bandongan, sorogan,* dan hafalan. Setelah berdirinya MSMH pada tahun 1968 diterapkan sistem kelasikal.

Pimpinan pesantren mengatur jadwal pengajian sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh para ustadz. Para santri bebas untuk memilih dan mengikutinya sesuai dengan tingkatan dan kemampuannya. Metode *bandongan* yaitu metode pembelajaran pondok pesantren dimana pengajar (ustadz/kyai) membacakan kitab yang dikaji sedangkan para santri menyimak dan mengabsahinya dengan menuliskan arti, *mufradat* kalimat, dan *tarkiban*nya/struktur kalimat. Metode ini diterapkan di MSHS pada jam ke-3 atau pukul 16.30 WIB. Kitab yang dikajinya adalah kitab penunjang pemahaman (kitab *syarah*) materi pelajaran Nahwu di kelas masing-masing yang menjadi kitab panduan kurikulum madrasah (kitab *al-Muqarrabah*). Sedangkan pada pagi harinya (jam pertama dan kedua) sistem pembelajaran yang diterapkan adalah memadukan antara keduanya. Karena disamping santri *ngabsahi* kitab, ia terlebih dahulu diperintahkan membaca, menarkib dan memaknainya.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Sedangkan metode *sorogan* diartikan sebagai metode pembelajaran pesantren dimana santri dituntut aktif dan kreatif membaca, menarkib, memaknai, dan menginterprtasikan kandungan isi kitab yang dikaji, sedangkan pengajar (ustadz/kyai) menyimak, mengoreksi, dan membenarkan kesalahan yang ditemukan. Di MSMH metode ini disampaikan pada santri di tingkat persiapan kelas I, kelas II, dan MTs kelas I. Metode ini diberikan kepada santri-santri baru yang masih memerlukan bimbingan individual. Sistem ini merupakan sistem yang paling sulit dari keseluruhan sistem pendidikan Islam tradisional, sebab sistem ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi diri santri. Kebanyakan santri gagal dalam pendidikn dasar ini. Disamping itu banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa mereka seharusnya mematangkan diri pada tingkat dasar *sorogan* sebelum dapat mengikuti pendidikan selanjutnya di pesantren.

Selain metode pembelajaran secara *sorogan* dan *bandongan* tersebut diatas, Pondok Pesantren APIK Kaliwungu juga meningkatkan pengajaran yang lebih baik dengan menerapkan model pembelajaran yang lain, yaitu:

1.

dengan tujuan agar tidak lupa. Teknisnya adalah men-*talafud*-kan teks pelajaran bila bentuk materinya *kalam natsar*, dan melagukannya dalam bentuknya *kalam nadham/syi'ir*. Materi pelajaran yang dilalar pada umumnya adalah pelajaran pokok (nahwu). Penekanan pada model ini adalah para santri mampu mengucapkan/melafalkan materi pelajaran dengan lancar tanpa melihat/membaca teks. Dewan Mustahik membuat alokasi waktu untuk setoran para santri yang sudah hafal pelajaran (*khatam*) dengan tuntas (*mastery learning*) secara tatap muka langsung.

Materi pelajaran yang diharuskan (wajib) hafal dan juga anjuran (sunnah) bagi para santri sesuai dengan tingkatan/jenjang dan setiap hafalan akan mendapatkan *syahadah* (sertifikat). Diantara tingkatan dan materinya tersebut adalah: Tingkat I Sekolah Persiapan (SP), materi yang wajib dihafal adalah *Nadham Sullamul Muhtadi* (Nahwu), *Nadham Kifāyatul Awam* (Tauhid), *Nadham Hidayat al-Sibyan* (Tajwid). Sedangkan anjuran hafalannya adalah: *Matan 'Alala, Ra'su Muskilah/Mufradat* (B. Arab). Sedangkan Tingkat II SP, materi yang wajib dihafal adalah *Matan Jurmiyah* (Nahwu), *Kharida al-Bahiyah* (Tauhid), *Tuhfa al-Atfāl* (Tajwid), *Tafsiran Istilahi* (Sharaf), sedangkan anjurannya adalah : *Nadham Tanbih al-Muta'allimīn (*akhlak).

Tingkat I Tsanawiyah, materi wajibnya adalah *Matan Jurmiyah* (nahwu), *Musthalah Tajwid* (Tajwid), *Tasrif*

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Lughawi (sharaf), *sedangkan* anjuran untuk dihafal adalah *'ilal (sharaf)* dan *'Awam al-Jurjani (Nahwu)*. Tingkat II Tsanawiyah II materi wajibnya adalah *Amriti* (nahwu), *Maqsad* (Sharaf), *Jazairiyah Makhraj* (Tajwid), sedangkan anjurannya adalah *Qawaid al-I'rab* (Nahwu). Sedang Tingkat III Tsanawiyah materi wajibnya adalah *Nadham al-Fiyah 1- 500 (Nahwu),* sedangkan anjuran nya adalah *Nadham Baiquniyah* (Ilmu hadits/Musthalahul Hadits).

Tingkat I Aliyah materi yang wajib dihafal adalah *Nadham al-Fiyah* 500 – 1002 bait (Nahwu), sedangkan anjurannya adalah *Lathaif al-Israr* (Ushul Fiqh). Tingkat II Aliyah materi wajibnya adalah *Nadham Jauhar Maknun* (Balaghah), *Sulam al-Munauruq* (Ilmu Mantiq), sedangkan anjurannya adalah *Nadham Faraid al-Bahiyah* (Qaidah fiqh). Sedangkat tingkat III Aliyah adalah hanya berupa anjuran yaitu *Uqud al-Juman* (Balaghah).[13]

PERPUSTAKAAN
BALAI LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

4. **Ngaji Bandongan.**
   Model pembelajaran ini bertujuan untuk membantu penguasaan dan penambahan materi pelajaran pokok (nahwu) yang diajarkan di pagi hari dengan menggunakan kitab *al-Muqarrabah* (kitab yang telah dikodifikasi oleh Kyai sebagai acuan pembelajaran di Kelas). Pengajian bandongan pada prinsipnya sama di

13 Wawancara dengan Ustad Abd. Nafi, *Kepala MSMH APIK*, 1 Nopember 2012

pagi hari tetapi, hanya saja cakupan materinya lebih luas daripada kitab *al-Muqarrabah*. Sistem pengajian ini termasuk kategori metode pembelajaran secara demonstratif yang sangat signifikan hasilnya, karena metode ini menekankan pada praktek pembacaan dan pemahaman isi *tarkiban* teks yang ada di kitab secara benar sesuai dengan kaidahnya, sehingga penguasaan materi pelajaran lughot (nahwu, sharaf dan balaghah) oleh para santri dapat dituangkan langsung dihadapan Kyai/Ustadz. Dengan metode ini lahir pula pola pembelajaran *munaqasah* di pesantren.

Penerapan metode pengajaran yang berlangsung di pesantren selama ini masih cenderung menggunakan pendekatan doktrinal, belum diperkaya dengan berbagai metode instruksional modern, untuk membuka eksplorasi cakrawala pemikiran para santrinya.

Sistem Evaluasi dan Penilaian Santri

Untuk mengetahui tingkat pemahaman para santri, pondok pesantren menyelenggarakan evaluasi pembelajaran selama jangka waktu tertentu, seminggu, sebulan, setengah tahun, dan satu tahun (akhir tahun) ajaran. Pada setiap minggu santri di haruskan tampil untuk dites mengenai semua pelajaran atau pelajaran yang disampaikan para ustadz saat masuk di kelasnya baik yang berkaitan dengan hafalan, pemahaman, interpretasi (diperintahkan untuk menerangkan), atau nahwunya. Evaluasi ini dilakukan pada hari sabtu jam pertama.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Sedangkan untuk tiap bulan evaluasinya adalah ulangan tertulis atau setoran hafalan pelajaran pokok. Dekade setengah tahun ini diselengarakan ulangan semester. Sementara pada akhir tahun dilakukan evaluasi kenaikan kelas.

Evaluasi tes secara tertulis bagi santri SP bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan pada tingkat Tsanawiyah dan Aliyah menggunakan bahasa Arab. Kegiatan Semester dilakukan sebanyak dua kali pada setiap bulan Rabiul Awwal dan Rajab.[14]

Kenaikan Kelas bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Pondok, setiap santri yang naik pada jenjang/tingkatan di atasnya ditetapkan beberapa prosedur kenaikan kelas, baik yang berkaitan dengan hafalan, kedisiplinan, ataupun evaluasi pembelajaran. Diantaranya sebagai ketentuan hafalan adalah: untuk SP I yaitu *Nadham Aqidatu al-Awâm* dan *Sulam al-Mubtadi*, SP II yaitu *Matan Al-Jurumiyah*, MTs I yaitu *Matan al-Jurmiyah, al-Awamil* dan *Tuhfa al-Atfal*, MTs II yaitu : *Nadham Al-Imriti*, MTs III yaitu *Nadham Alfiyah 500 bait*, Aliyah I *nadham Alfiyah 500-1002* bait dan Aliyah II *nadham Al-Jauhar al-Maknun*.

Pada tingkat • ‡ † ‹ • ‹ ’ Ž ‹ dilakukan melalui antara lain: minimal absen 70, ketaatan 60 % dan berkelakuan baik minimal tidak melakukan pelanggaran berat atau selalu melakukan pelanggaran kecil. Sedangkan pada

14 Wawancara dengan Ust. Abd. Nafi, *Kepala MSMH APIK*, 30 Oktober 2012

hasil evaluasi belajar yang menentukan adalah dalam hal: penguasaan materi pelajaran minimal 70 % dan dapat membaca kitab kuning minimal bisa menerapkan tarkib dan i'rabnya.

Mobilitas Alumni Pesantren

Setiap tahun pondok pesantren APIK Kaliwungu mengeluarkan lulusan Aliyahnya rata-rata 70 – 100 orang, belum termasuk yang *drop out*. Jumlah mereka mencapai 2 % per tahun, baik karena alasan biaya, pindah sekolah atau pesantren lain, maupun sudah merasa memperoleh ilmu agama yang cukup sebagai bekal hidup bermasyarakat. Sistem pendidikan pesantren yang fleksibel yang memungkinkan santri mengakhiri pendidikannya dan kembali ke kampung halamannya sewaktu-waktu.

Meskipun kurikulum yang dilaksanakan sepenuhnya bersifat keagamaan yang berbasiskan kitab kuning, Alumni yang memiliki Ijazah Madrasah Salafiyah Miftahul Huda (MSMH) APIK Kaliwungu dapat diakui (tanpa harus ijazah formal) oleh lembaga pendidikan perguruan tinggi seperti IAIN Walisongo Semarang, Unissula Semarang, Universitas Tribakti Kediri, Unnamas, dan UNSIQ Wonosobo.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Dengan sistem pendidikan dan pengajaran yang ada di pesantren APIK saat ini, jika dilihat dari tiga fungsi pesantren dalam transmisi keilmuan, pemeliharaan tardisi dan pembinaan calon-calon ulama masih tetap terjaga dengan konsep *al-muhāfadlatu al- qadim al-shālih wa al-ahdu bi al-jadīd al-aslah*. Menurut KH Fadlullah Turmudzi Alumni APIK dengan sistem yang masih tetap berlangsung

saat ini, keluaran alumninya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan lebih dari cukup. Persoalannya kemudian tergantung pada person santri itu sendiri dalam menggunakan metode yang bervariasi saat berhadapan dengan masyarakat yang cepat berubah (instan, kebutuhan pasar, dan budaya dengar).

Dari hasil didikan pesantren APIK, para alumni banyak berkiprah dan tersebar ke berbagai penjuru Indonesia dengan beragam profesi, menjadi tokoh masyarakat, kyai/ustad pesantren/madrasah, politisi, guru madrasah, PNS dan Lain-lain. KH. Muhtadi, KH. Murtado (Pandeglang), KH. Dimyati Rois (Kaliwungu), KH. Haris Sodakoh, para Kyai Pesantren Benda Kerep Cirebon, dan lain-lain merupakan deretan para alumni yang sekarang banyak berkiprah di masyarakat.

Menimbang Peran dan Fungsi Pondok Pesantren APIK Kaliwungu

Dalam perspektif ini jika dilihat dari tiga fungsi pokok pesantren, yaitu: transmisi keilmuan Islam (*transmission of Islamic knowledge*), memelihara tradisi Islam (*maintenance of Islam tradition*), dan pembinaan calon-calon ulama (*reproduction of ulama*). Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Fungsi pesantren dalam – ” *f* • • • ‹ • ‹ • ‡ ‹ Ž • —.*f* • • Ž *f* •

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkhidmat dan istiqamah dalam pelayanan pendidikan dan dakwah (*tafaqquh fī al-dīn*) umumnya memiliki tradisi keilmuan atau intelektual yang sangat kuat

dan terjaga secara berkelanjutan. Kyai senantiasa mempersiapkan diri dengan tradisi dan pengalaman panjang dalam penguasaan ilmu-ilmu agama (Tafsir, Hadits, Fiqh, Ilmu Alat, Ushul Fiqh, dan sebagainya). Para kyai biasanya telah mempersiapkan siapa-siapa saja yang diharapkan dapat melanjutkan tradisi intelektual tersebut melalui rekruitmen yang hanya diketahui kyai. Menurut Dhafier, sarana utama para kyai dalam melestarikan tradisi (intelektual) pesantren dilakukan melalui rekruitmen keluarga terdekat, mengembangkan jaringan aliansi perkawinan *endogamous* antara keluarga kyai, serta tradisi transmisi pengetahuan, dan transmisi intelektual antar sesama kyai dan keluarganya. Sistem pendidikan di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu masih terus berlangsung hingga saat ini dengan dipelajarinya sumber-sumber keilmuan (kitab kuning) dari para ulama *mutaqoddimin* maupun *mutaakhirīn* yang dianggap kitab *mu'tabarah*. Metode hafalan/*lalaran, sorogan, bandongan,* dan musaywarah menjadi ikon tersendiri di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu. Dengan konsentrasi pada penguatan kemampuan Bahasa Arab sebagai ilmu alat menjadi kekuatan tersendiri bagi Pondok Pesantren APIK Kaliwungu dalam menggali khazanah intelektual Islam yang umumnya berbahasa Arab.

PERPUSTAKAAN
BALAI LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Peran Pesantren dalam Memelihara Tradisi Islam
(*ƒ* ‹ • – ‡ • *ƒ* • ‘.̂. ‡ • Ž *ƒ* • ‹ … **)** *ƒ* † ‹ • ‹ ‘ •

Sebuah pesantren memiliki elemen-elemen, yaitu kyai, santri, masjid, pondok dan kitab kuning. Dengan elemen

yang ada di dalam pesantren, komunitas pesantren membiasakan diri hidup dalam tradisi santri yang sarat dengan nilai-nilai kesucian, acuan moral, dan kesalehan individual. Melalui tradisi yang dikembangakan, pesantren mampu membangun lingkungan sosial-kultural yang memungkinkan santri membiasakan diri untuk berperan sebagai calon ulama dan da'i/*mubaligh*. Ia mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang *tafaqquh fī al-dīn* dengan kesalehannya. Sebagai panutan umat, santri harus berperilaku baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Para santri melalui keteladan dan panutan kyai berupaya membina diri dalam bersikap, berperilaku, dan beribadah sesuai dengan sistem yang berkembang di pesantren sebagai bentuk adaptasi dan sekaligus pengkaderan diri untuk menjadi kader *fāqihu zamanihi*. Melalui interaksi sosial dalam lingkup budaya pesantren yang kental dengan nilai-nilai hidup asketisme, kesalehan individual atas dasar legitimasi teologis menjadikan pesantren memungkinkan menghasilkan calon-calon ulama dan da'i/*mubaligh* yang dibutuhkan umat.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Oleh kerenanya, di luar lembaga pendidikan pesantren tidak terlihat lingkungan kultural yang memungkinkan lahirnya calon-calon ulama dan da'i/*mubaligh* yang mumpuni, menguasai ilmu-ilmu agama yang dibarengi dengan kesalehan, dan berkhidmat bagi pendidikan dan dakwah agama. Karena bagaimana seseorang ulama dan da'i/*mubaligh* akan lahir bila interaksi sosialnya dalam keseharian tidak bersentuhan dengan ulama dan lingkungan yang kondusif bagi lahirnya kader

ulama. Pantaslah bila Gus Dur dalam penelitiannya mengugkapkan, bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan dimana sosialisasi dan penanaman niali-nilai ajaran agama berlangsung dapat memunculkan "*enclave*" dan mengalami proses keterpisahan kultural. Pesantren sub-kultur memiliki keunikan tersendiri dalam berbagai aspek seperti cara hidup yang dianut, pandangan hidup, dan tata nilai atau norma yang diikuti, serta hirarki kekuasaan *intern* tersendiri yang ditaati sepenuhnya.[15]

Fungsi pesantren dalam pembinaan calon-calon ulama (” ‡ ’ ” ‘ † — … – ‹ ‘ • ‘)ˆ — Ž *f* • *f*

Pesantren secara kelembagaan diakui oleh masyarakat sebagai wadah yang melahirkan kepemimpinan agama. Kepemimpinan tersebut selain karena memiliki otoritas keilmuan juga diyakini sebagai pemimpin spiritual keagamaan yang memberikan rasa aman, membantu menyelesaikan masalah-masalah keseharian dibarengi rasa *ta'dhim,* dan kharisma. Kepercayaan dan harapan masyarakat tersebut menuntut pesantren untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan spiritual dan moral agama dengan mempersiapkan calon-calon ulama dan da'i/*mubaligh* yang mumpuni melalui sistem pendidikan dan sesuai dengan harapan masyarakat. Peran tersebut tanpaknya tidak sepenuhnya dapat dilakukan alumni perguruan tinggi agama yang oleh masyarakat sering

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

15 Abdurrahman Wahid, "Pesantren Sebagai Sub Kultur" dalam Dawam Raharjo (Editor). (1974). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta, LP3ES

dianggap lebih dipersepsikan sebagai cendekiawan, sarjana, atau *scholar*.

Imam Ghazali dalam Ihya ulumuddin menyebutkan, bahwa ulama adalah seorang yang rajin beribadah, zuhud, alim dalam berbagai ilmu, khususnya ilmu-ilmu *ukhrawi*, senantiasa ikhlas karena Allah dan fakih dalam segala aspek kemaslahatan umat. *Faqih* secara harfiah adalah seorang yang alim fikih yakni memiliki pemahaman mendalam tentang fikih, sedangkan *mutafaqqih* adalah orang yang menguasai fikih. Kedudukan *faqih* di atas *mutafaqqih*, karena dalam mengkaji masalah-masalah fikih seorang *faqih* tidak hanya memahami teks-teks kodifikasi fikih yang sudah matang, tetapi juga mengkaji suplemen seprti Ushul Fikih, Qawaid Fiqhiyah, istilah al-Fuqaha, dan lain sebagainya. Sedangkan *mutafaqqih* adalah seorang yang hanya menguasai masalah-masalah yang terbukukan dalam kitab fikih yang ada.[16]

Dengan sistem pendidikan dan pengajaran yang ada di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu saat ini, jika dilihat dari tiga fungsi pesantren dalam transmisi keilmuan, pemeliharaan tardisi dan pembinaan calon-calon ulama masih tetap terjaga dengan konsep *al-muhāfadlatu 'alā al-qadimi al-sālih wa al-ahdu bi al-jadīd al- aslah*. Menurut KH. Fadlullah Turmudzi, alumni Pondok Pesantren APIK Kaliwungu, dengan sistem yang masih tetap berlangsung saat ini, keluaran alumninya dapat memenuhi kebutuhan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

16 MA. Sahal Mahfud. (2007). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, h. 295-296

masyarakat bahkan lebih dari cukup. Persoalannya kemudian tergantung pada santri itu sendiri dalam menggunakan metode yang bervariasi saat berhadapan dengan masyarakat yang cepat berubah (instan, kebutuhan pasar, dan budaya dengar).

Dari gambaran peran dan fungsi Pondok Pesantren APIK Kaliwungu tersebut, ternyata pesantren juga tidak hanya mengemban tiga fungsi di atas melainkan juga dapat berperan sebagai basis garda moral bangsa, pendidikan karakter bangsa dan sebagai basis pengembangan sosial ekonomi dan budaya umat dan bangsa, termasuk pengembangan budaya perdamaian, deradikalisasi, dan penangkal budaya materialisme, liberalisme, dan isme-isme lainnya.

***

Sistem pendidikan yang dikembangkan Pondok Pesantren APIK Kaliwungu adalah pendidikan berbasis pada penguatan *tafaqquh fī al-dīn* terhadap kitab-kitab kuning. Sistem pembelajarannya dilakukan melalui pendidikan formal MSMH dan non-formal (*bandongan, sorogan*). Pengajaran kitab kuning yang dikembangkan Pondok Pesantren APIK Kaliwungu melalui MSMH menerapkan sistem kelasikal, berjenjang (SP, Tsanawiyah dan Aliyah). Dengan menerapkan sistem ini tujuan, target dalam KBM dapat tercapai sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan pesantren. Kekhususan dalam penguasan ilmu-ilmu alat merupakan ciri dari pesantren ini.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam, keberadaan pesantren hingga saat ini masih tetap bertahan di tengah modernisasi dunia pendidikan. Hal ini karena lembaga ini masih mendapatkan dukungan masyarakat yang menitipkan anak-anaknya menuntut ilmu di pesantren. Selain itu, kualitas pendidikan dan kualitas alumni yang telah kembali berkiprah di tengah-tengah masyarakat.

Pondok Pesantren APIK Kaliwungu telah memerankan fungsi pesantren sebagai transmisi dan transfer keilmuan Islam, pemeliharaan tradsi Islam, dan penciptaan atau reproduksi kader-kader ulama. Fungsi pesantren ini berkat dukungan lembaga yang ada dipesantren, kurikulum yang dikembangkan, dan sumber daya manusia (pimpinan dan pengajarnya). Walaupun alumni hanya memiliki ijazah pesantren, tetapi alumninya banyak dibutuhkan masyarakat karena mempunyai kualitas yang tinggi dan mempunyai ciri yang khas sebagai pesantren ilmu alat dan fikih. Distingsi lembaga pendidikan inilah yang akan bisa bertahan ditengah gempuran modernisasi.

PENGGUNAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

4 Pembinaan Anak Jalanan di Pesantren Fathul Khair Cimanggis Depok

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Pembinaan Pendidikan Keagamaan Anak Jalanan di Pesantren Fathul Khair Cimanggis Depok[1]

Pendusta agama ini (Islam) bukanlah mereka yang mencaci agama atau enggan menyembah kepada Tuhannya. Pendusta agama ini adalah mereka yang tak peduli pada masa depan anak yatim yang lemah dan tak peduli pada kehidupan kaum papa.
(Qs. al-Mā'ūn [105]: 1-3)

Anak merupakan generasi mendatang yang sangat berharga, baik buruknya generasi sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-tangan penggembannya (keluarga, sekolah, masyarakat). Di tangan merekalah tergenggam masa depan bangsa selanjutnya, oleh karenya wajar bila setiap komponen masyarakat menyadari hal ini dalam mempersiapkan strategi pendidikan yang baik untuk masa depan anak-anak. Tidak hanya proses tumbuh

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

1 Tulisan ini diolah dari penelitian tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terapan (Dikterapan) di Pesantren Fathul Khair Ciamnggis Depok, tahun 2015

dan berkembangnyapun yang perlu diperhatikan dalam rangka mengarahkan dan membimbing mereka sesuai yang diinginkan, melainkan perhatian terhadap hak-hak anak menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu generasi yang berkualitas.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tidak ada perbedaan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan khusus. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dengan jelas menyebutkan, bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Itu berarti, bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab, namun juga pemerintah dan masyarakat.

PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Namun demikian, di masyarakat terdapat sejumlah anak-anak yang seharusnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang, justru telah jauh menjadi anak jalanan. Data sensus nasional tahun 2012 dari perkiraan 61 juta jiwa anak, sekitar 3 juta anak (4,75%) termasuk kategori terlantar, 7,5 juta anak (12,40%) dikategorikan hampir terlantar. Fenomena ini muncul seiring dengan perkembangan budaya yang sudah mulai bergeser dan menyimpang. Pergeseran nilai

dan sikap anak-anak dan remaja saat ini seolah-olah tidak bisa terbendung. Hal ini terjadi seiring dengan derasnya arus informasi yang begitu dahsyat dan masalah lingkungan keluarga dan masyarakat yang sudah mengalami penurunan terhadap penerapan norma dan nilai.

Kurangnya layanan pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan pada kelompok marjinal kerap berdampak buruk terutama bagi anak itu sendiri, seperti terganggunya kesehatan fisik, melemahnya ketahanan mental, menjadi sasaran korban pelecehan seksual, berhadapan dengan hukum, kriminalitas anak, dan tidak menentu masa depannya. Selain itu, kehadiran anak marjinal akan dapat memunculkan sejumlah persoalan sosial yang mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai kalangan baik pemerintah melalui berbagai program kegiatan dengan mengalokasikan anggaran baik Anggaran Belanja dan Pendapatan Nasional (APBN) maupun Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun secara individu berupaya ikut menanggulangi persoalan anak yang kurang menguntungkan, misalnya melalui rumah singgah atau panti asuhan. Pemerintah juga telah menerbitkan UU Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Pendirian Komisi Perlindungan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Anak Indonesia (UU Pendirian KPAI) sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak.

Usaha-usaha yang telah dilakukan tersebut, nampaknya masih belum maksimal dalam menghadapi persoalan anak-anak jalanan/marjinal. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) sejak tahun 2010 telah menyelenggarakan program Pendidikan Terpadu Anak Harapan (dikterapan) melalui lembaga pendidikan keagamaan berasrama, yakni pesantren. Pesantren dianggap penting menjadi tempat yang sesuai bagi anak marjinal. Pesantren, selain sebagai lembaga pendidikan, juga memerankan diri sebagai lembaga sosial, ekonomi bagi masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren sejak lama menjadi lembaga pendidikan khas Indonesia yang telah mendidik masyarakat sebagai penopang dalam pembentukan karakter kehidupan bangsa. Menitipkan anak-anak di pesantren berbeda dan memiliki nilai lebih daripada menitipkan mereka di panti-panti sosial milik pemerintah. Pesantren perlahan-lahan mendapatkan perhatian dan pendidikan lebih dari pengasuh dan para pengurus. Tak hanya pengetahuan moral, mereka juga sedikit demi sedikit mulai ditempa dengan kesadaran beragama. Tak heran jika kemudian anak-anak jalanan merasa lebih nyaman tinggal di pesantren dan menjadi santri serta memilih tinggal lebih lama untuk mengaji dari pada sekedar menjadi titipan sementara aparat

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

keamanan.[2]

Program yang digulirkan Kemenag ini diduga bisa ikut menyelesaikan permasalahan sosial. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dianggap tempat terbaik bagi pendidikan kaum marjinal, karena pembelajaran di pondok pesantren, tak hanya tertuju pada pelajaran agama saja. Peserta juga diberikan pelajaran lain seperti pendidikan lokal, umum, dan keterampilan. Sehingga setelah keluar dari pesantren, peserta bisa mencari nafkah yang lebih baik. Di sisi lain, akhlak peserta akan berubah sedikit demi sedikit dengan adanya pengetahuan agama yang lebih baik.

Penyelenggaraan program dikterapan sampai tahun 2015 telah dilakukan pada 300 pondok pesantren di sepuluh provinsi, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Aceh, dan Jambi. Salah satu pesantren yang menjadi pelaksana program dikterapan adalah Pondok Pesantren Fathul Khair Cimanggis Depok Jawa Barat. Pesantren ini menjadi muara penitipan anak jalanan, anak terlantar, atau anak-anak malam yang berhasil dijaring aparat keamanan dalam operasi razia.

PUSLITBANG
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Pesantren dan Pendidikan Terpadu Anak Harapan

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar sejarah yang panjang di Indonesia.

2 Abi S. Nugraha, Ed. 2015. *Mendidik tanpa Pamrih : Kisah Para Pejuang Pendidikan Islam*, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, h. 207

Lembaga pendidikan ini didirikan oleh umat Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan umat akan pendidikan sekaligus sebagai sumber pengkaderan pemimpin umat Islam yang dikenal dengan sebutan ulama. Karena itu, pondok pesantren sering juga diidentifikasi sebagai lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam.

Pondok pesantren memiliki peran sangat penting dalam dunia pendidikan di tanah air. Terdapat tiga peran pesantren yang sangat mengemuka. *Pertama* sebagai lembaga yang melakukan transmisi pengetahuan keislaman. *Kedua*, sebagai lembaga pemeliharaan tradisi keislaman, dan *ketiga,* sebagai lembaga kaderisasi calon-calon ulama. Dewasa ini, banyak terjadi perubahan dalam masyarakat, pondok pesantren sebagai bagian dari sistem sosial juga mengalami perubahan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan umat yang makin beragam. Orientasi pendidikan di pondok pesantren yang dulunya ditekankan pada pendalaman ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fī al-dīn*) untuk mempersiapkan kader pemimpin umat atau ulama kini mengalami diversifikasi. Sebagian pondok pesantren masih konsisten dengan *tafaqquh fī al-dīn*, dan sebagian lainnya mengembangkan pendidikan madrasah dan sekolah umum sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dihadapinya. Pondok pesantren yang disebutkan pertama dikenal sebagai salafiyah dan yang tersebut kedua disebut sebagai *ashriyah/khalafiah*. Disamping itu, terdapat pula pondok pesantren yang menggabungkan kedua model itu, yang oleh Kemenag dikategorikan sebagai pondok pesantren

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

tipe kombinasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (PMA Pendidikan Keagamaan Islam) disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan. Pesantren sebagai satuan artinya pesantren hanya menyelenggarakan pendidikan sebagai satuan seperti pendidikan muadalah atau diniyah formal, sementara pesantren sebagai penyelenggara pendidikan dimakusdkan pesantren menyelenggarakan berbagai macam satuan pendidikan di pondok pesantren (baik formal maupun non formal).

Selanjutnya, terdapat lima unsur penting sebagai syarat dikatakan sebagai pondok pesantren, sebagaimana disebutkan dalam PMA Pendidikan Keagamaan Islam, bahwa pondok pesantren wajib memilki unsur-unsur pesantren yang terdiri dari kyai atau sebutan lain yang sejenis, santri, pondok atau asrama pesantren, masjid atau mushala, dan pengajian dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Dikterapan adalah proses pendidikan bagi anak jalanan, anak terlantar, dan anak kelompok marjinal lainnya, melalui lembaga pendidikan keagamaan berasrama atau pesantren yang memberikan pelayanan secara terintegrasi dan konprehenshif dalam tiga bentuk.

Pertama, pelayanan pendidikan terpadu meliputi pendidikan umum, pendidikan agama, dan pendidikan ketrampilan sebagai bekal hidup dalam meningkatkan

kesejahteraan.

Kedua, pelayanan pengasuhan melalui kehidupan berasrama untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kemampuan bermasyarakat.

Serta *ketiga*, pelayanan atas hak-hak untuk memperoleh layanan kesehatan, perlindungan hukum dan hak-hak mendasar lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan dari pelayanan dikterapan adalah untuk memberikan pelayanan bagi anak terlantar, anak jalanan, dan anak kelompok marjinal, kelompok masyarakat yang tersisihkan secara sosial baik akibat kemiskinan, konfilk sosial, bencana alam, anak keluarga yang bertempat tinggal tidak layak huni, dan anak dari keluarga miskin untuk memperoleh layanan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan secara terpadu baik pendidikan umum, pendidikan agama maupun pendidikan ketrampilan melalui pendidikan pesantren.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Sementara itu program dikterapan diharapkan memberi manfaat dalam hal sebagai berikut APK dan APM program wajib belajar sembilan tahun, mengurangi kemiskinan, mengurangi anak berhadapan dengan hukum, menekan jumlah pekerja anak dibawah umur, menghindarkan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan, menjamin masa depan anak marjinal supaya lebih baik, memandirikan anak terlantar dan anak jalanan untuk hidup normal di masyarakat dengan kemampuan bekerja dan berusaha,

mengubah status anak jalanan

Potret Pesantren Fathul Khair Cimanggis

Pondok Pesantren Fathul Khair berdiri pada tahun 2002 di Jalan Sumur Badung II, RT 04/07, Harjamukti, Cimanggis Depok. Pondok Pesantren Fathul Khair didirikan oleh Hj. Bariroh, S. Ag. Beliau adalah aktivis dakwah (penyuluh agama PNS Kemenag Jakarta Timur) yang sudah sejak lama berkiprah mendakwahkan ajaran Islam baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun di berbagai tempat terutama melalui majelis taklim. Berbagai ujian dan tantangan ia hadapi dengan penuh kesabaran dan tekad juang yang tinggi. Cacian, makian, bahkan teror fisik kerap ia terima. Namun dengan niat ikhlas karena Allah ia tak bergeming hingga berdirilah pesantren ini.

Salah satu alasan utama yang menjadi latar belakang berdirinya pesantren ini adalah realitas kemiskinan dan kaum dhuafa yang ada di sekitar Cimanggis dimana pesantren saat ini berada. Kesulitan ekonomi yang dihadapi kelompok ini tidak hanya membuat mereka sulit menghadapi hidup tetapi juga menyebabkan berkembangnya berbagai masalah dan penyakit sosial. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah faktor pendidikan. Mereka tidak hanya tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, tetapi juga telah kehilangan motivasi dan merasa tak perlu untuk menyekolahkan mereka. Anak-anak mereka terlantar menjadi anak jalanan. Sebagiannya bahkan telah ditinggalkan orangtua mereka.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Realitas inilah kemudian yang membuat Ustadzah Bariroh menjadikan kaum dhuafa sebagai tujuan utama penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Fathul Khair. Menyelenggarakan pendidikan gratis bagi kaum dhuafa adalah sasaran utama didirikannya pesantren ini. Mengacu pada data base pesantren, jumlah keseluruhan santri sebanyak 311 santri, terdiri dari santri yang tinggal di pesantren (mukim) sebanyak 137 dan santri yang tidak tinggal (non-mukim) di pesantren sebanyak 174. Hampir seluruh santri adalah kaum dhuafa. Kebanyakan dari mereka, terutama santri yang mukim, adalah anak jalanan.

Program utama yang diselenggarakan adalah pendidikan, baik formal maupun non formal. Namun di luar itu pesantren juga mengadakan progam pelatihan keterampilan (*life skill*) bagi para santri. Di luar itu, untuk menunjang kegiatan utama juga menggarap beberapa usaha di sektor ekonomi yaitu produksi kecap dan distributor kerupuk udang dan terasi udang. Di area pesantren juga didirikan koperasi.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Seiring dengan berjalannya waktu, Pondok Pesantren Fathul Khair kian berkembang. Masyarakat baik sekitar maupun dari luar kota berdatangan baik untuk belajar, menitipkan anak mereka, maupun menjadi donator. Masyarakat sekitar yang tadinya risih dan menentang lambat-laun berubah dan kini telah menerima dan mendukung serta merasakan manfaat kehadiran pesantren ini. Di samping bekerjasama dengan masyarakat, Pondok Pesantren Fathul Khair juga menjalin kemitraan dengan pemerintah. Kepercayaan masyarakat semakin hari

semakin bertambah. Kehadiran Pondok Pesantren Fathul Khair kini ibarat oase di tengah gurun terutama bagi kelompok marjinal perkotaan.

Kegiatan Pendidikan

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, Pondok Pesantren Fathul Khair memilki visi dan misi. Visi dari pesantren Fathul Khair adalah:

"*menjadi lembaga kemanusiaan dan keagamaan yang tangguh dalam akhlakul karimah terdepan dalam prestasi, dan sukses dalam pengelolaan".*

Sementara itu misi Pondok Pesantren Fathul Khair adalah:

1. Mendirikan dan mengelola panti asuhan yatim piatu, anak terlantar, anak jalanan, dan kelompok anak marginal lainnya;
2. Mendirikan lembaga formal dan non formal;
3. Memberikan santunan kepada lanjut usia, tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
4. Mendirikan sarana peribadatan;
5. menyelenggarakan program pondok pesantren dan madrasah; dan
6. Melaksanakan syiar keagamaan.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Melalui visi dan misi ini dapat diketahui dengan jelas karakteristik Pondok Pesantren Fathul Khair yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan yang diorientasikan bagi kaum dhuafa (miskin, yatim, anak jalanan). Inilah yang menjadi karakteristik dan kekhasan pesantren ini.

Pondok Pesantren Fathul Khair menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan baik formal maupun non-formal. Pendidikan formal yang diselenggarakan pesantren adalah Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). RA berdiri pada tahun 2004, kurikulumnya menerapkan kurikulum Kemenag yang menitikbertkan pada nilai-nilai pendidikan agama Islam. MI berdiri pada tahun 2012, kurikulumnya mengikuti kurikulum Kemenag yang dirancang sesuai dengan standar isi atau kurikulum MI.

Sementera itu, program pendidikan non-formalnya adalah pendidikan pondok pesantren, program wajib belajar pendidikan dasar salafiyah tingkat *'ūlā* dan *wusṯā* yang berdiri pada tahun 2004, pendidikan anak usia dini (PAUD) berdiri pada tahun 2004, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) tahun 2002, paket kesetaraan (paket A, B, dan C) tahun 2004, keaksaraan fungsional tahun 2004, dan program pendidikan terpadu anak harapan (dikterapan) dibuka 20 Februari 2012, dan majelis taklim.

Pondok Pesantren Fathul Khair termasuk penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar salafiyah tingkat *ula* dan *wustha* yang dibuka sejak tahun 2004 dan merupakan satu-satu podok pesantren di Kota Depok yang masih menyelenggarakan program ini. Wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

dengan biaya dibebankan pada APBN dan APBD serta sumber lain yang tidak mengikat.[3] Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) yaitu pondok pesantren yang masih tetap mempertahankan sistem pendidikan khas pondok pesantren, baik kurikulum, metode, maupun bahan ajarnya. Bahan ajar yang diberikan meliputi ilmu agama Islam dengan menggunakan kitab-kitab klasik berbahasa Arab, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing santri, dan pembelajarannya masih mempertahankan metode *bandongan* dan *sorogan*.[4] Program wajib belajar pada PPS ini dikhususkan untuk para santri yang belum mendapatkan pendidikan dasar. Kurikulum program ini terdiri dari pendidikan Keagamaan Islam dan empat mata pelajaran umum yang harus diberikan yaitu Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

TPA yang dibuka sejak tahun 2002, kurikulumnya lebih fokus pada pembelajaran al-Qur'an, praktek ibadah, hafalan al-Qur'an, doa-doa sehari-hari yang diberikan pada usia sebelum sekolah. MDA berdiri pada tahun 2002 diperuntukan bagi siswa-siswa sekolah umum (SD) yang belajar pendidikan agama, mereka tinggal di sekitar pondok pesantren. Tujuan pendidikan *diniyah* adalah menambah dan melengkapi pendidikan agama yang diberikan di sekolah yang pelaksanaanannya dilakukan

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

3 Impres No 1 Tahun 1994,15 April 1994 tentang *Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar*

4 Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama. 2001. *Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah.*

pada siang hari. Oleh karena itu kurikulum pendidikan *diniyah* ini seluruh materi ajarnya adalah mata pelejarana agama, seperti pelajaran al-Qur'an dan hadits, Fikih, Sejarah Islam, Bahasa Arab, Aqidah, dan Akhlak.

Program paket kesetaraan, baik paket A, B, dan C dibuka sejak tahun 2004 diperuntukan bagi siswa atau masyarakat yang tidak termasuk usia wajib belajar, oleh karenanya program ini tidak dilakukan seperti halnya pendidikan non-formal lainnya. Kurikulum program pendidikan ini sepenuhnya menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sesuai dengan tingkatan dan jenjang pendidikan.

Sementara itu program pendidikan terpadu anak harapan (dikterapan) yang mulai dibuka sejak 2012, kurikulumnya dilakukan secara terintegrasi dan konprehenshif melalui asrama atau pesantren dengan memberikan mata pelajaran pendidikan umum, pendidikan agama, dan pendidikan keterampilan sebagai bekal hidup dalam meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan ini disesuaikan dengan tingkat jenjang dan usia peserta didik.

PUSLITBANG PENDIDIKAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Disamping kegiatan yang terdapat dalam satuan program pendidikan di atas, Pondok Pesantren Fathul Khair menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dianggap menjadi ciri khas pesantren, yaitu *Pertama* shalat jamaah. Semua santri diwajibkan untuk melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah. Bagi santri yang tidak melakukan shalat jamaah dan tidak ada halangan yang bisa dimaklumi maka akan diberikan sanksi. *Kedua*, shalat tahajud. Setiap pukul 02.00 WIB semua santri

dibangunkan untuk menjalankan shalat sunah tahajud. Program ini juga diwajibkan untuk semua santri dan bagi yang tidak ada halangan dan tidak mengikuti kegiatan ini juga akan diberikan sanksi. *Ketiga*, puasa Senin-Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis semua santri diharuskan menjalankan puasa sunah. Sama seperti kedua kegiatan sebelumnya, bagi santri yang tidak menjalankan puasa maka akan dikenakan sanksi.

Keempat, tahfidz al-Qur'an. Semua santri diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an, terutama juz 30. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi pukul 06.00 – 06.30 WIB. Bagi santri yang telah hafal juz 30 disilahkan (tidak wajib) untuk melanjutkan hafalan, mulai dari juz satu dan seterurnya. *Kelima*, pengajian kitab kuning. Program ini diberikan kepada santri berdasarkan kemampuan mereka. Dengan mengikuti program ini para santri diharapkan dapat membaca Bahasa Arab tanpa harakat. Selain itu melalui belajar kitab kuning santri dapat memperoleh pengetahuan ilmu-ilmu agama yang lebih baik. Adapun kitab-kitab yang dipelajari adalah Jurumiyah, Amtsilatu Tashrif, Safinah, Akhlakul Banin. UqudullujAin, dan Tafsir. *Keenam*, khitobah (latihan pidato). Kegiatan ini dilakukan setiap Sabtu malam. Santri dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok maju secara bergiliran. *Ketujuh*, kultum (kuliah tujuh menit). Kegiatan ini dilakukan setiap *ba'da* shalat tahajud dan *ba'da* shalat subuh. Untuk *ba'da* shalat tahajud, kultum lebih sering disampaikan oleh pengasuh. Jika kebetulan tidak ada maka diganti ustadz/ustadzah yang lain.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Kedelapan, keterampilan (*life skill*). Pendidikan keterampilan yang diberikan meliputi tata rias pengantin (khusus santri putri), keseninan (marawis, drum band, dan kasidah), dan produksi kecap. Khusus untuk keterampilan yang terakhir diberikan untuk santri yang telah menyelesaikan SMA dan sedang melakukan pengabdian selama satu tahun. Berikut ini jadwal kegiatan (*schedule time*) santri dalam sehari:

Tabel 1
Jadwal Kegiatan Harian Santri Fathul Khair

Waktu	Kegiatan	Tempat
02.00 – 05.30	Tahajud, Subuh, Ta'lim Subuh	Mushala
05.30 – 07.00	Piket, persiapan sekolah, sarapan	Gedung Asrama
07.00 – 13.00	Kegiatan belajar, shalat dzuhur	Gedung Sekolah, Mushala
13.00 – 13.30	Makan siang	Dapur
13.30 – 15.00	Istirahat	Gedung Asrama
15.00 – 17.00	Shalat Ashar, MDA	Mushala
17.00 – 17.30	Piket, mandi	Dapur
17.30 – 19.30	Shalat maghrib, tadarus, isya	Gedung Asrama
19.30 – 20.00	Makan malam	Gedung Asrama
20.00 – 21.30	Belajar malam	Gedung Asrama
21.30 – 22.00	Persiapan tidur	
22.00 – 02.00	Tidur	

Sumber : Dokumen Pondok Pesantren Fathul Khair 2015

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Pengelolaan Pendidikan

— ” ‹ • — Ž — •

Kurikulum yang dimaksudkan di sini meliputi seluruh aspek kegiatan pokok yang diarahkan untuk tercapainya tujuan pendidikan dan sejumlah mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Mengingat banyaknya program kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Fathul Khair maka kurikulum untuk masing-masing kegiatan ini disesuaikan dengan setiap program kegiatan pendidikan yang ada. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2
Jadwal Kegiatan Pengajian Kitab Kuning

No	Nama Kitab	Pengajar	Waktu
1	*Jurumiyah*	Hj. Bariroh	Ba’da Isa
2	*Amthilatu Tasrif*	M. Iqbal	Ba’da Isa
3	*Safinah*	Agus Sholeh	Ba’da Isa
4	*Akhlak al-Banīn*	M. Iqbal	Ba’da Subuh
5	*Uqud al-Lujain*	Muh. Iqbal	Sabtu Malam
6	*Tafsir al-Qur’an*	Mas’adah	Minggu Pagi

Sumber : Dokumen Pesantren Fathul Khair 2015

Untuk kitab *Jurumiyah, Amtsilatu Tashrif, Safinah*, dan *Akhlak al-Banin* pesertanya adalah para santri sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Peserta pengajian kitab *Uqūd al-Lujain* khusus para guru. Sedangkan pengajian Tafsir al-Qur’an pesertanya para guru dan

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

jamaah umum, baik masyarakat setempat atau pun yang datang dari luar.

Tabel 3
Jadwal Kultum dan Tahfid

	Hari	Pemateri
MINGGU KE I	Minggu (Tahfidz)	
	Senin	Ust. M. Iqbal
	Selasa	Usth. Iis Siti Rohimah
	Rabu	Ust. Wasiyanto
	Kamis	Usth. Khaerani
	Jumat (Tahfidz)	
	Sabtu	Usth. Bariroh
MINGGU KE II	Minggu	
	Senin	Usth. Khaerani
	Selasa	Ust. Basith
	Rabu	Usth. Romlah
	Kamis	Ust. Agus Soleh
	Jumat (Tahfidz)	
	Sabtu	Usth. Bariroh
MINGGU KE III	Minggu	
	Senin	Ust. M. Iqbal
	Selasa	Usth. Warakatul Fitria
	Rabu	Usth. Iis Siti Rohimah
	Kamis	Ust. Suratman
	Jumat (Tahfidz)	
	Sabtu	Usth. Bariroh
MINGGU KE IV	Minggu	
	Senin	Usth. Syarifah
	Selasa	Ust. Wasiyanto
	Rabu	Ust. Suratman
	Kamis	Ust. M. Iqbal
	Jumat (Tahfidz)	
	Sabtu	Usth. Bariroh

Sumber : Dokumen Pesantren Fathul Khair 2015

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

‡ ƒ † ƒ ƒ • › ƒ ‹ á • – ƒ † — ” — † ƒ • ƒ • – ” ‹

Pondok Pesantren Fathul Khair dikelola di bawah Yayasan Fathul Khair. Yayasan inilah yang bertanggungjawab secara umum atas seluruh proses penyelanggaraan pendidikan di pesantren ini. Berikut ini bagan struktur pengurus harian Pondok Pesantren Fathul Khair:

1. Ketua Umum: Hj. Bariroh, S.Ag
2. Ketua Operasional: Khaerani, S.sos.I
3. Sekrtetaris Umum: Eka sulistiana, SE
4. Sekertaris: Siti Nur Romlah
5. Bendahara: Saparwati
6. Kabid Pendidikan: Titin Upit Kartinah
7. Kabid Advokasi: Rochibun
8. Kabid SDM: Drs. Muhitul
9. Humas: Abdul Basith

Para pengurus yayasan sebagian besar juga sebagai pengajar di pesantren ini. Diantara mereka ada yang tinggal di luar pesantren, ada juga yang tinggal di dalam komplek pesantren. Para ustadz/ustadzah yang tinggal di dalam komplek pesantren inilah yang bertugas mendampingi para santri secara intensif. Para ustadz/ustadzah yang tinggal di komplek pesantren berjumlah 11 orang, yaitu Hj. Bariroh, S.Ag., Khaerani, S.Sos.I., Saparyati, Siti Nur Romlah, S.E., Eka Sulistiana, S.E., Rochibun, Muhmmad Iqbal, Asih Kunanti, S.Pd.I, Yayan Sugiyanto, Abdul Basith, dan Agus.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Ustadz dan ustadzah ini secara intensif memantau dan membimbing santri. Untuk beberapa kegiatan misalnya bangun malam dan *khitabah* mereka bergiliran satu sama lain. Adapun pendidikan mereka, sebagaimana terlihat pada gelar di atas, berfariasi, umumnya berlatar belakang ekonomi dan pendidikan. Selain itu ustadz yang membimbing keseharian adalah lulusan pondok pesantren, misalnya Ustadz Muhammad Iqbal dan istrinya merupakan lulusan salah satu pesantren di Kediri dan Jombang, sementara Ustad Agus adalah lulusan pesantren Buntet dan Lirboyo Kediri.

Siswa/santri yang belajar di Pondok Pesantren Fathul Khair seluruhnya bejumlah 482 orang terdiri dari santri laki-laki dan santri perempuan. Mereka terdistribusi ke dalam berbagai satuan pendidikan yang ada sesuai minat dan jenjang usia. Kebanyakan santri adalah dari kaum dhuafa, baik anak yatim, anak terlantar, maupun anak jalanan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini tabel data/ jumlah santri berikut jenjang pendidikannya.

BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel 3
Jumlah Santri di Satuan pendidikan

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel	Jumlah Santri
1	MDA/TPA	6	85
2	Raudhatul Athfal	2	25
3	PAUD	1	6

4	Madrasah Ibtidaiyah	6	104
5	Wajar Dikdas Ula	1	18
6	Wajar Dikdas Wustho	3	96
7	Kesetaraan Paket A	1	9
8	Kesetaraan Paket B	3	23
9	Kesetaraan Paket C	3	31
10	Keaksaraan Fungsional	5	85
Jumlah		31	482

Sarana dan Prasarana

Sarana-prasarana merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Sarana prasarana yang baik dan memadai sangat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Demikian juga sebaliknya. Dukungan sarana dan prasarna juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang akan menitipkan ke lembaga pendidikan pesantren. Saat ini fasilitas yang dimiliki Pondok Pesantren Fathul Khair adalah tanah seluas 2.000 m2 dengan luas bangunan 1.500 m2, mushala yang menampung sekitar 200 orang, aula pertemuan, 1 ruang perpustakaan, 3 wisma guru, gedung sekolah 3 lokal, 7 lokal asrama santri, 1 lokal lapangan olah raga, 1 ruang tata usaha, 1 ruang tamu, 10 ruang kamar mandi, 1 ruang kamar dapur.

Masih minimnya sarana asrama santri dan ruang belajar menjadi kendala tersendiri. Ruang asrama yang terbatas menyebabkan adanya para santri yang rela

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

tinggal di ruang yang tidak memenuhi standar. Selain itu proses pendidikan pesantren tidak seluruhnya terpenuhi dengan baik. Saat ini pihak pengurus terus melakukan upaya ke berbagai pihak untuk menambah fasilitas pesantren terautama asrama, perluasan lahan dan lain-lain, harapannya proses pendidikan di pesantren berjalan dengan baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Sumber Pembiayaan

Sumber pendanaan Pondok Pesantren Fathul Khair sebagian banyak didapat dari para donatur dan para dermawan. Ini menggambarkan bentuk partisipasi dan kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap pesantren. Karenanya tanpa dukungan dan partisipasi masyarkat, pesantren ini tidak akan berkembang. Sebagian yang lain didapat dari mitra kerjasama, baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Beberapa instansi pemerintah yang selama ini bekerjasama dengan pondok pesantren adalah Kemenag melalui program dikterapan, dana bantuan operasional sekolah (dana BOS) untuk program wajar dikdas salafiyah tingkat *'ūlā* dan *wusthā*, serta siswa MI, Kementerian Sosial (Kemensos) dengan program pengelolaan LKSA. Kemendikbud melalui program Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program LM3.

Sementera itu sumber dana pembiayaan dari kalangan swasta berasal dari perusaahaan maupun perorangan. Mereka memberikan bantuan atas dasar kepedulian, kepercayaan mereka terhadap pengabdian Pondok Pesantren Fathul Khair yang telah memberikan pelayanan

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

pendidikan bagi kalangan marjinal. Bentuk bantuan mereka tidak hanya berupa dana, tetapi juga ada tenaga ahli. Bagi perorangan yang memiliki keahlian tertentu untuk diberikan kepada pesantren, seperti *skill* tata boga, tat arias, dan lainnya. Mereka datang seminggu sekali memberikan pelatihan kepada para santri secara gratis.[5]

Bagi santri yang tinggal di asrama, seluruh santri termasuk kelompok marjinal atau *mustad'afīn*, maka seluruh pembiayaan santri seluruhnya gratis dan ditanggung pesantren. Demikian pula ustadz dan ustadzah yang tinggal di pesantren seluruhnya mendapatkan tunjangan dari pesantren termasuk makan setiap harinya dari pesantren.

Selain sumber pembiayaan dari instansi pemerintah yang memang rutin diberikan, pesantren juga menerima bantuan tetap maupun tidak tetap dari para donatur yang setiap saat datang secara langsung maupun melalui rekening. Sumber pembiayaan juga diperoleh dari usaha ekonomi pesantren, yaitu produksi kecap, distribusi kerupuk udang padi kapas, sirup Tjampolay dan terasi udang. Dana yang terkumpul digunakan untuk operasional pembiayaan kegiatan belajar dan untuk kehidupan sehari-hari. Para ustadz/ustadzah juga digaji oleh pesantren. Masing-masing orang sebesar Rp 500.000/bulan ditambah beras dan biaya sehari-hari, termasuk biaya anak-anak mereka yang berkenaan dengan kebutuhan pokok.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

5 Wawancara dengan Ibu Hj, Bariroh, *Pimpinan Pesantren Fathul Khair*, Tanggal 15 Oktober 2015

Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu Anak Usia Harapan

‡ • ‡ ” – ƒ ” ‘ ‰ ” ƒ •

Program pendidikan terpadu anak usia harapan (dikterapan) di Pondok Pesantren Fathul Khair dilaksanakan sejak tahun 2007. Program ini adalah hasil kerjasama antara pesantren dengan Kemenag. Kemenag selaku representasi dari pemerintah bertindak sebagai penyandang dana dan monitoring program, sedangkan pesantren bertindak sebagai pengelola program. Pondok Pesantren Fathul Khair adalah salah satu pesantren dari 300 pesantren se-Indonesia yang diberi amanah untuk menyelenggarakan program ini.

Jumlah santri yang mengikuti program ini sebanyak 137 orang dengan katagori 81 orang terdiri dari anak yatim/piatu dan 56 orang anak jalanan. Usia mereka berkisar antara 8 – 16 tahun. Semua santri tinggal di pesantren. Para santri ini berasal dari berbagai daerah, sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel
Asal Daerah Santri Program Dikterapan

No	Asal Daerah	Jumlah
1	Karawang	24
2	Jakarta	46
3	Cirebon	16
4	Palembang	2
5	Tangerang	5
6	Kebumen	3
7	Depok	31

8	Lampung	2
9	Bandung	1
10	Bekasi	3
11	Pasuruan	3
12	Serang	1
13	Bogor	12
14	Ciamis	1
15	Garut	1
16	Sukabumi	1
17	Yogyakarta	2
Jumlah		137

Sumber : Dokumen Pondok Pesantren Fathul Khair 2015

Santri-santri ini sebagian adalah pindahan dari tempat lain, ada yang sengaja diambil langsung dari jalanan, dan ada pula yang diantar oleh orangtua mereka ke pesantren. Bagi yang masih punya orangtua, setelah berada di pesantren umumnya diserahkan sepenuhnya pada pesantren. Orangtua mereka seperti tak peduli[6].

Tinggal di pesantren ternyata tidaklah mudah. Pada awal kedatangan, kebanyakan memang terlihat senang mendapatkan tempat yang lebih nyaman daripada tempat mereka sebelumnya. Tapi pada gilirannya, berbagai aturan yang ada membuat beberapa di antara mereka tidak betah di pesantren. Sebagian bahkan ada yang kabur dari pesantren.[7] Untuk itu pesantren punya strategi untuk mengatasi hal ini. Pada saat mereka baru datang

6 Wawancara dengan Ibu Bariroh, *Pengasuh Pondok Fathul Khair*, 15 Oktober 2015

7 *Ibid.*

biasanya tidak diwajibkan mengikuti kegiatan secara langsung. Mereka dibiarkan untuk sekedar ikut-ikutan dan melihat-lihat teman mereka. Ini dimaksudkan agar mereka beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan baru mereka.

Namun demikian, tetap saja diantara mereka ada yang tetap tidak betah memilih pergi dari pesantren. Bahkan ada yang nekad kabur. Mengatasi hal ini, pesantren mencoba untuk mengembalikan mereka. Bahkan dalam beberapa kesempatan, pengasuh turun ke jalan untuk menjemput langsung mereka agar kembali ke pesantren. Pada kondisi ini, peran masyarakat yang turut andil mengawasi mereka sangat membantu. Masyarakat sering memberi laporan misalnya ada anak yang berada di luar pesantren saat kegiatan atapun mencoba kabur dari pesantren. Dari jumlah yang ada, hingga saat ini yang masih tinggal di pesantren sebanyak 120 orang santri.

Suatu ketika datang petugas dari Dinas Sosial dan Kepolisian datang ke Pondok Pesantren Fathul Khair untuk menengok dan mengecek apakah anak jalanan yang dititipkan ke lembaga ini masih ada atau tidak, tanpa diduga saat petugas itu mengabsen satu persatu, anak-anak titipan mereka itu menolak dipanggil anak jalanan. "Jangan panggil kami anak jalanan lagi. *Udah ngga* ada itu anak jalanan. Kami ini santri Fathul Khair". Demikian seperti yang diungkapkan Hj. Bariroh sangat berkesan di benak beliau[8].

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

8 *Ibid*, 1 Oktober 2015

Bentuk Pendidikan yang Diikuti

Para santri yang tinggal di Pondok Pesantren Fathul Khair semuanya s diwajibkan mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan tingkatan usia dan kemampuan masing-masing santri. Ada santri yang mengikuti satuan pendidikan di MI, sebagian mengikuti program wajar dikdas salafiyah (tingkat *ula* dan *wustha*), sebagian lagi mengikuti Paket C, dan ada yang mengikuti pendidikan di MAN di luar pondok pesantren.

Selain mengikuti sekolah formal, mereka juga diwajibkan mengikuti berbagai kegiatan lain di pesantren, yaitu *ta'lim* (kultum) setiap *ba'da* subuh dan tahajud. Shalat tahajud (dilakukan setiap malam, mulai dari pukul 02.00–selesai), hafalan al-Qur'an, khitabah (latihan pidato) setiap malam Minggu, puasa Senin-Kamis, *ngaji* kitab kuning (pilih kitab sesuai kemampuan santri), shalat berjamaah, membaca *rawi* pada setiap malam Minggu. Ada juga kegiatan seni yang terdiri dari *drumb-band*, marawis, dan kasidah.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel
Jadwal Rutin Kegiatan Santri sehari-hari

Waktu	Kegiatan	Tempat
02.00 – 05.30	Tahajud, Subuh, Ta'lim Subuh	Mushala
05.30 – 07.00	Piket, persiapan sekolah, sarapan	Gedung Asrama
07.00 – 13.00	Kegiatan belajar, shalat dzuhur	Gedung Sekolah, Mushala
13.00 – 13.30	Makan siang	Dapur
13.30 – 15.00	Istirahat	Gedung Asrama

15.00 – 17.00	Shalat Ashar, MDA	Mushala
17.00 – 17.30	Piket, mandi	Dapur
17.30 – 19.30	Shalat maghrib, tadarus, isya	Gedung Asrama
19.30 – 20.00	Makan malam	Gedung Asrama
20.00 – 21.30	Belajar malam	Gedung Asrama
21.30 – 22.00	Persiapan tidur	
22.00 – 02.00	Tidur	

Sumber : Dokumen Pondok Pesantren Fathul Khair 2015

Di samping itu, beberapa diantara mereka juga mengikuti kursus keterampilan atau *life skill*. Untuk santri putri diadakan kursus tata rias pengatin, tata rias rambut, dan perawatan tubuh. Kursus ini dilakukan satu kali seminggu, setiap hari Minggu sore (*ba'da* asar). Sementara itu, pemberian *life skill* bagi santri putra beragam sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, diantaranya kegiatan seni *marawis*/*barjanzi*, *drumb-band*, kursus elektronik selama satu bulan bekerjasama dengan perusahaan.[9]

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Hari demi hari perkembangan santri semakin baik. Mereka mulai terbiasa dengan kegiatan pesantren. Motivasi yang terus-menerus diberikan oleh para ustadz/ustadah, khususnya Ustadzah Hj. Bariroh (pengasuh) lama-lama mereka hayati dan membuat mereka berubah. Beberapa santri yang peneliti wawancarai dengan mantap

9 *Ibid*,

menyebutkan cita-cita dan harapan mereka di masa depan. Mereka telah mengalami perubahan yang signifikan.

Misalnya saja santri Amran (22 tahun), sudah empat tahun bergabung di Pondok Pesantren Fathul Khair. Saat ini dia telah menamatkan program paket C, telah menghafal al-Qur'an 5 Juz. Amran ini sejak awal asli dari anak jalalan. Berkat kesungguhan dan tidak kembali lagi ke jalanan orang tidak menyangka dia anak jalanan. Tatkala melafalkan al-Qur'an suaranya persis dengan seorang tahfidz pesantren lain. Beliau sekarang diberikan amanah untuk tinggal di cabang Pondok Pesantren Fathul Khair Cileunsi Bogor. Setiap Sabtu dan Minggu datang ke Cimanggis.

Lain halnya Sabran (13 tahun), sekarang duduk di kelas 6 MI. Sudah tiga tahun bergabung di Pondok Pesantren Fathul Khair r. Sebelum bergabung dia pernah bergabung di master (masjid terminal) Depok sebuah lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap anak-anak jalanan. Dia bergabung ke Pondok Pesantren Fathul Khair karena terjaring pihak keamanan yang selanjutnya di titipkan ke Pondok Pesantren Fathul Khair. Saat ini Sabran termasuk santri khusus, karena suatu ketika pernah kembali ke jalanan lagi kemudian dicari oleh Ibu Bariroh dan sekarang diatangani secara ekstra dan tinggal bersama pengasuh, tidak diketahui keberadaan orangtuanya. Dia sebenarnya adalah anak cerdas, mahir, dan suaranya enak dalam melantunkan *burdah*/salawat, *marawis*, karena memeang dia anak jalanan yang terbiasa menyayi. Sekarang beliau sedang mengahaf al-Qur'an Juz

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

30[10], dia juga dengan lincah menghafal syair lagu *marawis* di luar kepala. Menurut Sabran, dia diperlakukan beda dengan santri yang lain. Jika santri lain habis belajar paket atau sekolah istiraht sampai menjalang 'Ashar, dia justru ikut les[11]. Baginya tidak masalah bersusah dahulu biar nanti jadi orang sukses.

Sementara itu santri M. Erlian (15 tahun) dan Debbi (15 tahun) merupakan santri pindahan dari pesantren lain di daerah Jalan Baru Depok. Keduanya masih bersaudara yang berasal dari Palembang dan sudah satu tahun di Pondok Pesantren Fathul Khair. Awalnya merela bertiga namun hanya dua orang yang betah tinggal. Mereka diantarkan orangtuanya dari Palembang untuk belajar di Pondok Pesantren Fathul Khair. Saat ini keduanya mengikuti program wajar dikdas salafiyah kelas IX (kelas 3), mereka sudah betah tinggal di pesantren ini, mendapatkan bimbingan keagamaan dan pendidikan yang nantinya menjadi bekal setelah keluar.

Haryadi (22 tahun) alumni master (masjid terminal) di Stasiun Depok ini telah menyelesaikan program paket, dia juga sudah empat tahun tinggal di Pondok Pesantren Fathul Khair. Selain santri dia juga membantu kegiatan yang ada di pesantren yaitu di MI Fathul Khair.

PUSAT PENELITIAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

10 *Ibid*,

11 Wawancara dengan Sabran, *Santri Dikterapan*, 1 Nopember 2015

pendidikan. Tak satu pun diantara mereka yang punya *background* psikologi. Padahal yang dihadapi mereka adalah anak-anak bermasalah yang dalam penanganannya sangat membutuhkan penguasaan di bidang psikologi. Faktor inilah kiranya yang menjadi salah satu penyebab kenapa semangat mereka sering kendur. Kesulitan dalam menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini membuat mereka patah semangat. *Keempat*, otoritas yang sentralistik. Meskipun secara tertulis sudah ada pembagian tugas sedemikian rupa, tapi pada praktiknya pengaruh dan otoritas pengasuh masih terlalu dominan. Di sinilah kemudian rasa memiliki (*sense of belonging*) para ustadz/ustadzah kurang.

***

Penyelenggaraan program dikterapan di Pondok Pesantren Fathul Khair diikuti oleh 137 orang dengan katagori 81 orang terdiri dari anak yatim/piatu dan 56 orang anak jalanan. Usia mereka berkisar antara 8-16 tahun. Semua santri tinggal di pesantren. Para santri ini berasal dari berbagai daerah. Santri-santri ini sebagian adalah pindahan dari tempat lain, ada yang sengaja diambil langsung dari jalanan, dan ada pula yang diantar oleh orangtua mereka ke pesantren.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Bentuk pendidikan yang diikuti para santri meliputi, pendidikan formal terdiri dari 12 orang yang duduk di bangku SD, 125 orang duduk di bangku SMP/MTs. Seluruh kegiatan pesantren, meliputi *ta'lim* (kultum) setiap *ba'da* subuh dan tahajud. Shalat tahajud (dilakukan setiap

malam, mulai dari pukul 02.00 WIB-selesai). Hafalan al-Qur'an, *khitabah* (latihan pidato) setiap malam Minggu, puasa Senin-Kamis, *ngaji* kitab kuning (pilih kitab sesuai kemampuan santri), shalat berjamaah, membaca *rawi* pada setiap malam Minggu. Ada juga kegiatan seni yang terdiri dari *drumb-band*, *marawis*, dan *qasidah*. Di samping itu, diantara mereka ada juga yangn mengikuti kursus keterampilan. Untuk santri putri diadakan kursus tata rias pengatin, potong rambut, dan perawatan tubuh. Kursus ini dilakukan satu kali seminggu, setiap hari Minggu sore (*ba'da* asar).

Faktor pendukung berjalannya program ini adalah:

1. Semangat dan loyalitas pengasuh yang senantiasa bersikap pantang menyerah, ulet, disipilin, menjadi teladan, dan senantiasa memotivasi baik bagi para santri maupun para ustadz/ustadzah;
2. Adanya para ustadz/ustadzah (11 orang) yang tinggal di komplek pesantren. Para ustadz inilah yang berperan langsung dan turut memantau dan membimbing secara langsung para santri;
3. partisipasi masyarakat. Masyarakat sekitar yang telah sadar dan merasakan menfaat hadirnya pesantren di tempat tinggal mereka. Secara tak langsung, masyarakat mengawal para santri. Ini tampak misalnya dengan adanya laporan-laporan dari mereka pada saat ada santri yang meninggalkan kewajiban, keluar dari pesantren, atau pun bahkan ingin melarikan diri dari pesantren.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Sementara itu, faktor kendala pelaksanaan program ini adalah masalah pola asuh. Para santri adalah anak-anak yang mempunyai latar belakang khusus sehingga penangannya tidaklah mudah. Hal ini ditambah lagi dengan tidak adanya ustadz/ustadzah yang berlatar belakang pendidikan psikologi yang notabene sangat dibutuhkan dalam menangani/mengasuh anak-anak ini. Hal ini juga yang menjadi salah satu sebab sering menurunnya semangat sebagian ustadz/ustadzah.

Pondok Pesantren Fathul Khair perlu mempertimbangkan kembali jumlah dan kepadatan kegiatan. Melihat jadwal yang ada, kegiatan pesantren sangat padat siang malam. Terutama untuk pelaksanaan shalat tahajud mungkin bisa lebih diakhirkan pelaksanaannya mulai dari 1/3 akhir malam atau sekitar setengah jam atau maksimal satu jam sebelum pelaksanaan shalat subuh. Selain itu, perlu diadakan kegiatan-kegiatan *refreshing* bagi santri maupun para guru, kegiatan ini bisa dikemas dengan berbagai kegiatan edukatif misalnya *out bond* dan lain-lain. Hal lain yang perlu diadakan adalah penambahan ustadz/ustadzah yang punya latar belakang psikologi, atau kerjasam dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi seperti UIN Jakarta melalui program magang. Pesantren penyelenggara dikterapan hendaknya dilakukan secara khusus untuk anak marginal/jalanan bukan dicampur dengan santri yang lain (yang membayar).

PUSAT PENELITIAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Kemenag perlu memberikan penyuluhan/pelatihan bagi para ustadz/ustadzah berkenaan dengan masalah pengasuhan anak-anak terlantar. Pemberian *supporting* pelatihan-pelatihan khusus yang bekenaan dengan keterampilan, mengingat kegiatan ini di pesantren masih kurang dan pentingnya keterampilan untuk mendukung kemandirian hidup para santri nantinya. Kemenag juga perlu mempertimbangkan kembali bagi penyelenggara program yang santrinya bukan dari kelompok marginal terutama anak jalanan. Peningkatan sinergi antar lembaga sehingga program ini akan berjalan baik []

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

5 Formulasi Keberagamaan Muslim Minoritas di Tabanan Bali

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Formulasi Keberagamaan Muslim Minoritas di Tabanan Bali[1]

Karena keterbatasan waktu, kau dapat mengajarkan sebuah pelajaran pada seorang siswa selama sehari; tapi jika kau mengajarinya belajar dengan menciptakan keingintahuan, dia akan lanjutkan proses belajarnya selama dia masih hidup.

Pelayanan negara terhadap rakyatnya dalam bentuk layanan pendidikan sudah dirancang sangat optimal, tidak saja mendorong anak-anak peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang cerdas, kreatif dan dinamis, tapi juga diharapkan mereka menjadi manusia yang memiliki integritas keimanan dengan konsistensi artikulasi ketakwaan yang kuat. Bukan hanya itu, negara juga telah memfasilitasi agar semua warga negara memperoleh layanan pendidikan agama yang diberikan guru yang

1 Tulisan ini pernah dimuat pada Jurnal Edukasi Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, tahun 2008.

seagama. Bersamaan dengan itu, negara memfasilitasi rakyatnya untuk mempelajari agama secara mendalam, melalui pendidikan keagamaan, sehingga, tidak saja cukup untuk membekali diri mereka dalam upaya mencapai kualifikasi ketakwaannya yang ideal, tapi juga bisa menjadi ahli agama yang dapat memberikan layanan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan keagamaan kepada masyarakat melalui pendidikan non-formal sebagai wujud dari prinsip pendidikan sepanjang hayat.[2]

Persoalan pelayanan pendidikan (agama dan keagamaan) akan melibatkan banyak unsur dimana satu sama lainnya harus bisa memiliki pemahaman yang sama. Unsur-unsur besar yang masih belum padu adalah pemerintah daerah (pemda), kementerian agama (kemenag), dan lembaga pendidikan itu sendiri. Pemda memiliki tugas menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.[3] Salah satu urusan wajib pemda adalah menyelenggarakan pendidikan. Kenyataannya, belum semua pemda bisa berlaku adil dalam urusan pendidikan terutama pendidikan agama. Diskriminasi sudah berlangsung sejak zaman penjajahan.[4]

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

2 Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 30 (2) Undang Undang NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3 Undang Undang Nomor 32 (2) Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Untuk urusan wajib Pemerintah daerah lihat pasal 13 dan 14.

4 Lihat Husni Rahim, 2001, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Logos,. Kutipan ini untuk menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan (termasuk lembaganya; madrasah dan pesaantren) sejak zaman penjajahan tidak pernah mendapat bantuan, malah selalu diawasi

Perdebatan terakhir berkaitan dengan diskriminasi pendidikan keagamaan adalah diberlakukannya Surat Edaran Kementerian Dalam Negara Nomor 903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006, tertanggal 21 Setember 2005. Terdapat pernyataan yang memperkuat diskriminasi tersebut yakni pada lampiran II SE tersebut. Dikatakan bahwa:

"Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengalokasian anggaran APBD yang diperuntukkan membantu institusi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah tidak diperbolehkan".

Padahal, lembaga pendidikan keagamaan berhubungan secara vertikal dengan kemenag.[5] Ini artinya pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengalokasikan anggarannya untuk lembaga pendidikan keagamaan.

Indonesia merupakan sebuah negara multi etnis, multi bahasa, multi budaya dan multi agama. Dari sisi etnis terdapat kurang lebih 1,000 etnis atau sub-etnis tersebar di wilayah Indonesia ini.[6] Dari sisi agama terdapat lima

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

dan dihambat perkembangannnya. Menurut catatan Husni Rahim, perlekuan diskriminasi itu tertuang dalam Ordonansi Guru th. 1905 No. 550, dan Ordonansi Guru th. 1925, h. 50-51

5 Ahmad Choirul Fata, *Anak Tiri itu Bernama Madrasah*, Republika, 13/2/2006. Ada statemen yang memperkuat Husni Rahim dalam tulisan Choirul Fata yaitu "Selama beberapa dekade pasca-kemerdekaan, lembaga pendidikan di bawah Depag mendapat jatah anggaran jauh di bawah anggaran yang diterima lembaga pendidikan yang dinaungi Diknas.

6 M Ainul Yaqin, 2005, *Pendidikan Multi Kultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, h. 206

agama yang diakui negara sebagai agama resmi (dan masih banyak lagi agama-agama yang belum diakui negara), juga menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Demikian halnya dengan keanekaragaman bahasa dan budayanya. Keadaan ini harus disadari menyimpan potensi besar timbulnya pertentangan satu sama lainnya. Hal lain yang juga harus dicermati adalah secara kuantitatif antar etnis, bahasa, budaya dan agama juga tidak imbang. Di sini yang kemudian memunculkan apa yang disebut mayoritas-minoritas. Penyebaran yang tidak imbang tersebut mempunyai implikasi terhadap pemerataan pendidikan.

Masalah mayoritas dan minoritas di Indonesia masih berkisar pada masalah bagaimana perlakuan pemerintah pusat daerah dan masyarakat sekitar (warga mayoritas) terhadap komunitas minoritas yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi pelayanan pendidikan keagamaan minoritas muslim di Tabanan, bentuk-bentuk pelayanan pendidikan keagamaan yang diberikan, serta hambatan, dan harapan masyarakat tentang pendidikan keagamaan bagi masyarakat minoritas muslim di Tabanan.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Layanan Pendidikan Minoritas

Menurut Azra, studi tentang masyarakat minoritas-mayoritas sebenarnya telah dilakukan sejak dekade 1950-an dan 1960-an. Pada dekade 1950-an, perhatian diawali adanya ketertarikan para ahli politik di Barat untuk mulai meneliti pengaruh formasi negara bangsa di

negara-negara yang baru merdeka terhadap pergeseran dan pengelompokan etnik di wilayah geografisnya. Pada tahun 1960-an, muncul negara-negara baru merdeka dimana isu-isu nasionalisme begitu didengungkan. Isu ini (nasionalisme) sekaligus menggerogoti identitas etnis, ras dan bahkan agama di masing-masing negara baru itu. Proses ini oleh Azra disebut sebagai pembongkaran batas-batas etnis oleh nasionalisme dan regionalisasi yang membentuk negara bangsa yang akhirnya memicu lahirnya golongan mayoritas dan minoritas.[7]

Studi M. Ali Kettani barangkali merupakan studi paling komprehensif berkaitan dengan tema minoritas muslim di dunia dewasa ini. Studi ini dilakukan di berbagai negara seperti Eropa, Uni Soviet, China, India, Afrika, Amerika, Pasifik, dan di bagian Asia lainnya. Kettani mendefinisikan minoritas dikaitkan dengan istilah muslim, sehingga minoritas muslim adalah bagian penduduk yang berbeda dari penduduk lainnya karena anggota-anggotanya mengakui Muhammad, putra Abdullah, menjadi utusan Allah terakhir dan meyakini ajarannya adalah benar, dan yang sering mendapat perlakuan berbeda dari orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan seperti itu.[8] Mason memaknai kelompok minoritas dilihat dari segi jumlah yang relatif kecil. Minoritas ditandai dengan angka, suara politik dan moral, sehingga ini semua menyebabkan

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

7 Azyumardi Azra, *Wacana tentang Minoritas Muslim*, dalam Kata Pengantar Buku M. Ali Kettani, *Minoritas di Dunia Dewasa ini*, h. xx

8 M. Ali Kettani, 2005, *Muslim Minoritas di Dunia Dewasa ini*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 3

berkurangnya pengaruh terhadap keputusan mayoritas.[9]

Pelayanan pendidikan pada hakekatnya sama dengan pelayanan pada umumnya. Pelayanan pada hakekatnya merupakan sebuah pekerjaan; yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Ada juga yang memberi makna kegiatan melaksanakan tugas untuk membantu orang lain. Maka, kemudian, layanan dibedakan dengan produk, dimana produk, mengacu pada *out-put* seperti barang. Sementara pelayanan mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan untuk menghasilkan produk atau perilaku penyedia layanan, yang berkaitan dengan sikap melayani seperti; memberi saran/informasi atau melayani pengobatan pasien. Dengan demikian, pelayanan merupakan dukungan yang diberikan bagi optimalisasi produk, perbantuan bagi pelanggan atau pengerjaan tugas lapangan.

Menurut Parasuraman, terdapat lima kriteria untuk menilai apakah kualitas layanan dapat disebut baik atau tidak, yaitu (1) kekonkretan, yang menyangkut fasilitas fisik, perlengkapan, petugas dan sarana komunikasi; (2) keterandalan, berkaitan dengan kemampuan dan ketepatan dalam memberikan layanan sesuai dengan apa yang dijanjikan; (3) tanggap, yaitu kesigapan dan kecepatan petugas dalam memberikan layanan; (4) jaminan, yakni

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

9 Sebagaimana dikutip dalam Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI (2005), *Studi Kelompok Keagamaan Minoritas di Berbagai Daerah*, h. 4., M. Ali Kettani, 2005, *Muslim Minoritas di Dunia Dewasa ini*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 3

layanan yang mampu memberikan kepastian keamanan, kebebasan dari mara bahaya dan resiko lainya; (5) empati, yakni memberikan kemudahan komunikasi, memberi perhatian (secara) pribadi serta memahami petugas terhadap kebutuhan pelanggan.[10]

Pengertian minoritas dalam kajian ini dibatasi dalam pengertian jumlah (kuantitas). Artinya, kajian dilakukan pada lingkungan masyarakat muslim yang secara kuantitas lebih kecil dibanding komunitas agama lain. Sedangkan pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam kajian ini adalah konsep yang dipergunakan dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, *pasraman, pabhaja samanera,* dan bentuk lain yang sejenis. Karena kajian ini belum bisa mencakup seluruh agama, maka pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah diniyah dan pesantren.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Potret Minoritas Muslim Tabanan

Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, jumlah penduduk kabupaten Tabanan sebanyak 397.673 jiwa, terdiri 197.122 jiwa penduduk laki-laki dan 200.551 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah penganut menurut agama, sebagian besar penduduknya beragama Hindu yaitu 97,3%. Kemudian disusul agama Islam sebanyak 1,93% , Budha (0,3%) , Protestan (0,23%) dan terakhir agama Katolik (0,16%). Untuk mendukung

10 *Ibid.*

pelayanan umat beragama di Kabupaten Tabanan, terdapat sarana tempat ibadah yaitu sebanyak 1.129 buah tempat peribadatan umat Hindu (Pura), 43 buah peribadatan umat Islam, empat buah untuk umat Katolik, dua buah untuk agama Budha dan sembilan buah untuk peribadatan agama Protestan.

Jumlah lembaga pendidikan umum di kabupaten Tabanan meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 186 buah, Sekolah Dasar (SD) 334 buah. SLTP jumlah murid sebanyak 14.924. Tingkat SMU/SMK terdapat 15.003 orang. Dan tiga PT swasta yaitu Universitas Tabanan, IKIP Saraswati Tabanan dan STISIP Margarana Tabanan.

Lembaga pendidikan Islam (Madrasah) umumnya di kelola oleh swasta, Jumlah lembaga pendidikan agama (Madrasah) di kabupaten Tabanan terdiri dari RA/BA sebanyak lima buah dengan jumlah murid sebanyak 208 siswa. Jumlah MI sebanyak dua buah dengan jumlah murid 445 orang. Jumlah MTs sebanyak tiga buah dengan jumlah murid sebanyak 254, Madrasah Aliyah (MA) sebanyak satu buah. Sedangkan lembaga pendidikan keagaman seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) sebanyak 18 buah dengan jumlah santri sebanyak 963 orang dan jumlah guru sebanyak 65 orang. Kemudian Madrasah Diniyah Wustha (MDW) sebanyak empat buah dengan jumlah santri sebanyka 15 orang. Sedangkan jumlah Pondok pesantren di Kabupaten Tabanan sebanyak lima buah dengan jumlah santri 339 orang dan tenaga guru/ ustadz sebanyak 23 orang. Profil institusi pendidikan Islam tersebut merupakan produk Islamisasi di Bali.

PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Islam di Bali tidak lepas dari sejarah dan perkembangannya. Hal ini terkait dengan kapan Islam datang, di daerah mana saja yang dimasuki Islam, dan siapa pembawa Islam pertama kali. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Islam masuk ke Bali terjadi pada abad XIV, tepatnya di wilayah Gelgel, Klungkung (pusat kerajaan Bali sejak abad XIV) bersamaan dengan kedatangan orang Islam yang mengaku sebagai penggiring "Dalem dari Majapahit". Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Raja Gelgel kedua (1480-1550 M), terjadi pengislaman oleh para pedagang dari Gujarat. Dari pusat kerajaan Gelgel inilah kemudian Islam berkembang di seluruh Bali (abad XVII-XX). Diantaranya, dari Gelgel Islam berkembang ke Kampung Lebah dan Kampung Jawa di Kecamatan Klungkung, Kampung Kusamba di kecamatan Dawan, dan Toyapakeh, Nusa Penida. Tidak berbeda dengan di Klungkung, di Badung Islam masuk berawal dari Anak Agung Ayu Rai bertolak ke tanah Jawa dengan pengiring-pengiringnya, sekembalinya dari Jawa para pengiring ini telah memeluk agama Islam.

PUSLITBANG
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Selanjutnya Islam mulai berkembang pada masa pemerintahan Cokorda Pemecutan III (sekitar tahun 1669 M). Hubungan dan kerjasama yang baik antara pihak kerajaan Pemecutan dan para saudagar dari Bugis Makasar di Jembrana merupakan bagian dari fakta sejarah yang berpengaruh terhadap perkembangan Islam di kabupaten Badung. Diantara mereka adalah orang Islam Bugis yang bermukim di Serangan. Selain itu, bangsawan Madura Raden Sosroningrat yang telah menjadi keluarga Puri

Pemecutan juga menjadi cikal bakal Islam di Badung dan kota Denpasar. Kampung Kepaon, Petang, dan kampung Jawa menjadi kawasan kosentrasi Islam. Selain orang Bugis, di Petang dihuni oleh suku Sasak.[11]

Islam di Tabanan diperkirakan mulai berkembang pada masa pemerintahan raja Betara Ngeluhur (1808). Pembawa Islam pertama ke Tabanan di prediksi adalah orang biasa yang karena jasanya menterjemahkan surat dari bahasa Jawa ia beri anugerah oleh raja Batara Ngluhur kemudian dijadikan juru bahasa istana. Pemuda itu beranama Aryo Nur Alam, kelak kawin dengan seorang gadis Bali, memperoleh keturunan bernama Raden Mustofa, yang kemudian menurunkan Raden Saleh. Sejak itu beserta istrinya dan anak cucunya dianggap orang–orang yang menyampaikan ajaran Islam di Tabanan. Makamnya ada di Tabanan dengan batu nisan bertarikh wafatnya tahun 1284 H atau tahun 1873 M. Seandainya ia berumur 80 tahun maka diperkirakan ia dilahirkan pada tahun 1793 M, dan seandainya ia sangat muda, kira-kira baru umur 15 tahun waktu datan ke Tabanan, maka kedatangannya di Tabanan sekitar tahun 1808 M. jadi masuknya Islam ke Tabanan kira-kira pada awal abad ke 19 M. itulah-satu-satunya sumber sejarah tentang masuknya Islam di Kab. Tabanan.[12]

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

11 Lihat buku *Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali* yang disunting oleh Prof. Drs. H. Shaleh Saidi dan Drs. Yahya Anshori, Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan MUI propinsi Bali bekerjasama dengan Pemda Tk.I Bali tahun 1979.

12 HM Shaleh Saidi, *Perkembangan Akulturasi Islam dan Hindu di*

Hal yang perlu dicatat di sini adalah pola perkembangan Islam di Bali yang prosesnya berlangsung secara adaptif. Islam masuk ke Bali melalui jalan damai karenanya umat Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan struktur kehidupan masyarakat Bali yang mayoritas menganut Hindu. Hubungan umat Islam dan umat Hindu Bali berlangsung secara harmonis. Hal ini menurut sesepuh umat Islam Bali, KH HS Habib Adnan, ada empat faktor yang menyebabkan Islam dapat berkembang di Bali. *Pertama*, adanya kesamaan model Islam Bali dan Hindu Bali yang khas Indonesia. *Kedua*, para penyebar Islam di Bali cenderung menyebarkan Islam secara persuasif dan humanis. *Ketiga*, sejak zaman kerajaan dulu tidak terjadi konflik antara kerajaan-kerajaan Jawa dan Bali. *Keempat*, adanya kemiripan antara umat Islam dan umat Hindu di Bali dalam cara pandang kulturalnya.

Sejak peristiwa bom Bali I dan Bom Bali II terjadi sedikit ketegangan antara pribumi dan pendatang. Misalnya, adanya penertiban terhadap pendatang yang datang ke Bali (Tabanan). Kaum pendatang yang menjadi sasaran utama penertiban adalah kaum pendatang yang muslim, karena secara kebetulan para pelaku pengeboman diidentifikasi sebagai muslim. Akibatnya, upaya penertiban meluas terhadap kaum muslim pendatang yang sebelumnya sudah tinggal lama di Bali. Kaum muslim ini seperti yang telah disebutkan adalah mereka yang sejak lama telah menjalin

PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Bali, Dalam Aswab Mahasin (ed.); *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa*: Jakarta, Yayasan festival Jakarta, 1996), h. 253

hubungan baik dengan kaum pribumi dan kehidupan antar mereka harmonis.

Potret Pendidikan Keagamaan Tabanan

Lembaga pendidikan keagaman di kecamatan Kediri meliputi pesantren sebanyak 1 lembaga yaitu Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz dan 1 lembaga Madrasah Diniyah yaitu Madraasah Diniyah Miftahul Huda. Selain dua lembaga pendidikan keagamaan di atas, terdapat juga lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang berkembang pesat yaitu: *Pertama,* lembaga pendidikan keagamaan nonformal seperti; Taman Kanak-Kanak al-Qur'an (TKA/TPQ) bagi usia dini dan SD/MI, seluruhnya berjumlah 10 lembaga. Lembaga ini berkembang di setiap mushala-mushala, masjid dan rumah-rumah ustadz yang terdapat di perkampungan atau warga muslim dimana komunitas muslim berada. *Kedua,* lembaga pendidikan keagamaan Majelis Taklim bagi usia remaja/pemuda maupun majelis taklim kaum Bapak dan Ibu. Secara keseluruhan majelis taklim di kecamatan Kediri terdapat 17 lembaga, majelis taklim ini berkembang subur terutama dari kalangan Ibu-Ibu baik yang dilaksanakan oleh ormas-ormas Islam seperti NU (Fatayat, Muslimat), Muhammadiyah (NA, Aisiyah) maupun kelompok yang lainnya.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Sarana dan prasanana Ibadah terdapat masjid 3 buah, mushala 4 buah, 2 buah langgar. Selanjutnya terdapat 8 Yayasan Islam. Untuk tenaga penyuluh agama terdapat 6 orang, 18 da'i dan daiyah, 26 Imam Masjid, 17 Khatib Jum'at, dan sebanyak 4 ormas Islam yaitu Muhammadiyah

dan Aisyiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muslimat NU. Komposisi warga muslim menurut haluan ormasnya adalah NU dan Muhammadiyah. Sedangkan mata pencaharian umat Islam sebagian besar adalah Pedagang, petani dan sebagian lagi pegawai PNS.

Jumlah penduduk di kecamatan Kediri pada tahun 2004/2005 sebanyak 64.003 jiwa. Penduduk yang beragama Islam sebanyak 5.016 jiwa atau 7,8 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Walaupun demikian data ini diambil berdasarkan data warga muslim yang memiliki KTP, menurut penuturan warga muslim masih banyak warga muslim yang belum tercatat.

Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz

Pondok pesantren Raudlatul Huffadz terletak di Jl. Banjar Baru Taman Surodadi desa Abian Tuwung Kecamatan Kediri kabupaten Tabanan Propinsi Bali. Lokasi pesantren sangat strategis dan mudah dijangkau oleh kendaraan umum baik dari arah Denpasar maupun dari arah sebaliknya. Pesantren ini juga terletak dijalur jalan raya yang menghubungkan kabupaten Badung dengan kabupaten Tabanan sehingga Pesantren mudah dikenal dan sering disingggahi oleh para peziarah yang berasal dari jawa dan kota lainnya.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Pesantren ini didirikan pada tahun 1980 M /1401 H oleh KH Noor Hadi alumni dari Pondok pesantren tahfidzul Qur'an Yanbaul Qur'an Kudus Jawa Tengah. Beliau termasuk salah satu murid lansung dari Kyai Arwani Kudus (seorang ulama terkenal dalam bidang tahfidz al-Qur'an).

Sesuai dengan namanya Raudlatul Huffadz pesantren ini oleh para pendirinya diharapkan menjadi tempat taman atau kebun yang akan melahirkan para penghafal/huffadz al-Qur'an.

Secara kelembagaan pondok pesantren Raudlatul Huffadz menyelenggrakan Pendidikan Diniyah non formal, dengan jenjang pendidikan tingkat *Ula* dan *Wustha*. Sedangkan ciri khas sistem pembelajarannya (KBM) adalah melalui pengajian kitab Salafi dengan menggunakan metode Sorogan, dimana santri membaca kitab dan Kyai/ustadz menyimak sambil mengevaluasi dan memperbaiki bacaan dan kemampuan santri dan Tahfidz /hafalan al-Qur'an.

Santri yang telah menempuh pendidikan tahfidz dan berhasil menghatamkan al-Qur'an 30 Juz, mereka berhak mendapatkan Sertifikat/Syahadah (Tahfidz Qur'an) dari lembaga Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz. Sertifikat dari PP Raudlatul Huffadz mendapatkan pengakuan/ *mu'adalah* dari Ponpes di Yanbaul Qur'an Kudus Jawa Tengah (Pimp. Almarhum KH. Arwani) karena KH. Noor Hadi sendiri merupakan murid langsung dari KH Arwani Kudus, dengan demikian lulusan alumni atau tamataan PP Raudlatul Huffadz sama dengan Pondok Pesantren Yanbaul Qur'an di Kudus.

Jumlah santri PP Raudlatul Huffadz berjumlah 104 santri. Mereka berasal dari dalam kabupaten (Tabanan) sebanyak 36 santri terdiri dari 24 laki-laki dan 12 Perempuan, dan dari kabupaten dalam propinsi sebanyak 26 santri yang terdiri dari 11 santri laki-laki dan 16

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

santri perempuan. Sedangan jumlah santri yang berasal dari luar propinsi Bali sebanyak 41 santri terdiri dari 30 santri laki-laki dan 11 santri perempuan. Dari asal santri tersebut terlihat bahwa jumlah santri yang berasal dari luar propinsi Bali lebih banyak dibandingakan dengan santri dari propinsi Bali. Jumlah santri yang hanya belajar di Diniyah di pondok pesantren ada 68 santri, sedangkan santri yang hanya belajar mengaji saja berjumlah 37 santri.

Dari segi ketenagaan, jumlah personil yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar di pesantren berjumlah 18 orang, terdiri dari: Kyai satu orang, Nyai 1 orang, badal kyai 1 orang, Ustadz 8 orang, Ustadzah 3 orang, tata usaha 2 orang dari laki-laki dan perempuan, dan keamanan/pesuruh sebanyak 1 orang. Berdasarkan latar belakang pendidikan Ketenagaan adalah tamatan setingkat SLTA sebanyak 6 orang, Sarjana strata satu (S1) sebanyak 11 orang, sedangkan ketenagaan berdasarkan status kepegawaianya adalah sebagian besarnya adalah non PNS sebanyak 16 orang, sedangkan sisanya sebagai PNS hanya 1 orang.

Pesantren ini menempati lahan seluas 1.500 m^2. Sarana prasana yang dimiliki antara lain; Asrama putera dengan luas 260 meter, asrama puteri 240 meter, ruang belajar 120 meter, ruang Kyai 36 meter, Masjid/mushala 36 meter, Aula/serbaguna 48 meter, ruang kegiatan santri 48 meter, WC Ustadz 12 meter, WC santri 10 meter. Dari sarana tersebut di atas kondisi ruangan/bangunaan semuanya baik. Sedangkan sarana yang belum dimiliki pesantren adalah ruang guru, dan perpustakaan yang sementara ini

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

masih menempati rumah pimpinan pesantren (KH Noor Hadi).

Proses belajar mengajar dilaksanakan setiap hari, kecuali hari jum'at semua aktifitas diliburkan dan diganti dengan kegiatan pembacaan surat yasin dan tahlil sesudah shalat magrib, Pembacaan *dibaan* setelah shalat Isya', pembacaan Surat yasin, al-Waqiah dan al-Mulk setelah shalat Shubuh dan kegiatan tadarus al-Qur'an bersama setelah shalat Jum'at. Kegiatan harian ini dimulai dari pukul 04.00 sampai jam 21.30 WITA. Selain itu terdapat juga kegiatan ekstrakurikuler seperti karate, Qosidah yang dilakukakan pada hari Sabtu dan Selasa.

Pesantren Roudlotul Huffadz memiliki sejumlah potensi yang telah dikembangkan dan bahkan harus dipertahankan baik dari segi keilmuan maupun ketrampilan, diantara potensi di bidang keilmuan adalah; *pertama*, pendalaman ilmu-ilmu agama terutama dibidang pembinaan tahfidz al-Qur'an (hafalan al-Qur'an) yang menjadi *trademark* pesantren ini, *kedua,* pendalaman dalam kitab-kitab kuning (ilmu-ilmu alat dan keilmuan lainnya). Dalam bidang keterampilan potensi yang dikembangkan PP ini diantaranya; dalam bidang perbengkelan otomotif, komputer, seni kaligrafi, dan potensi ekonomi berupa industri kecil (jasa) yaitu penggilingan bakso.

PUSLITBANG PENDIDIKAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Madrasah Diniyah (MD) Miftahul Huda

MD Miftahul Huda didirikan pada tahun 1979 dengan dimotori para tokoh masyarakat kediri diantaranya KH Noor Hadi (alumni Pondok Pesantren Yanbaul Qur'an

Kudus Jawa Tengah), Ust. Sonhadji, H. Sohib (pensiunan Kandepag Kab. Tabanan) dan Rohadi adib. MD Miftahul Huda terletak di jalan Raya Kediri Tabanan tepatnya di jalan A. Yani Gg. Kamboja I kecamatan Kediri kabupaten Tabanan (sekitar 5 Km dari Kota Tabanan), Didirikan pada tahun 1972 oleh sebuah badan yang bernama Pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Huda. Berdasarkan tipologi lokasi, sistem pengelolaan MD Miftahul Huda berada di luar pondok pesantren, sedangkan berdasarkan penjenjangan MD Miftahul Huda termasuk Tipologi MD berjenjang. Dilihat dari tipologi MD berdasarkan fungsinya sebagai MD Suplemen yakni Madrasah Diniyah yang sebagian besar siswanya berasal dari Madrasah atau Sekolah umum.

Proses belajar mengajar dilakukan pada siang hari dengan jam belajar sebanyak 12 jam perminggu. Sedangkan kurikulum menggunakan kurikulum modifikasi yaitu kurikulum berasal dari departemen agama dengan kurikulum yang disusun sendiri dari sekolah/kurikulum lokal.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Jumlah siswa/santri MD Miftahul Huda berdasarkan jenis kelamin kelas MDA (Madrasah Diniyah Aliyah) berjumlah 84 laki-laki dan 83 perempuan. Jumlah kelas MDW (Madrasah Diniyah Wustha) sebanyak 9 laki dan 8 perempuan. Sedangkan jumlah siswa berdasarkan tipologi Madarsah Diniyah adalah MD suplemen/Komplemen di tingkat MDU (Madrasah Diniyah Ula) sebanyak 159 orang dan ditingkat MDW sebayank 11 santri. Tipologi Madin murni di tingkat MDU sebanyak 8 santri dan di tingkat MDW sebanyak 6 santri. Sedangkan asal siswa yang belajar

di MD miftahul huda berasal dari Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung. Siswa sebagian besar berasal dari sekolah formal mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, sampai SMU.

Jumlah tenaga pengajar MD Miftaul Huda sebanyak 7 orang dengan 5 orang laki dan 2 orang perempuan. Pensisikan formal tenaga pengajar 3 orang sarjana S1 dan 4 orang tingkat SMA/MA. Madrasah Diniyah Miftahul Huda menempati lokasi tanah seluas 300 meter persegi, luas bangunan sebanyak 221,5 meter persegi dengan status tanah atau bangunan adalah wakaf. Kondisi bangunan MD sudah tua atau rusak ringan yang terdiri dari 3 ruang belajar, 1 ruang guru dan kantor dengan kondisi darurat, dan 1 ruang WC untuk guru dan siswa. Sarana MD yang belum dimiliki adalah ruang perpustakaan, tempat ibadah, buku teks siswa dan alat peraga.

Pelayanan Pendidikan Keagamaan Minoritas

Dalam konteks penyelenggaran pendidikan agama dan keagamaan, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan agama antara daerah mayoritas dan minoritas pemeluknya mengalami perbedaan dalam penekanan pendidikannya, hal ini terjadi karena lembaga pendidikan keagaman di daerah minoritas memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah yang Islamnya mayoritas, misalnya lembaga pendidikan pesantren di Bali tidak saja memainkan peranan yang sama seperti pesantren-pesantren yang ada di jawa sebagai pencetak kader-kader ulama. Tetapi juga mencetak ulama-ulama

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

yang tangguh dalam ilmu keislaman. Selain itu lembaga pesantren di Bali juga dijadikan sebagai institusi pelestarian identitas keislaman yang kental di tengah-tengah komunitas Hindu yang mayoritas, orang Islam di Bali merumuskan pendidikan ke-Islaman dalam kaitannya untuk memperkuat identitas ke-Islaman. Motivasi santri sekolah atau ke pondok pesantren adalah motivasi untuk mempertahankan identitas keislaman. Identitas tersebut salah satunya bersifat nilai moral yang mungkin berbeda dengan masyarakat Hindu.[13]

Jika ditelusuri lebih jauh, munculnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam di Bali, tidak terlepas dari peran dan kontribusi para pendatang beragama Islam dari Jawa, Madura, Makasar dan lain-lain yang datang ke Bali untuk mengais rezeki. Dengan hadirnya para pendatang ke daerah Bali, secara tidak langsung fungsi sosial lembaga Islam seperti Masjid dan pesantren menjadi tempat persinggahan yang sangat penting. Seperti halnya fungsi lembaga *al-Junaid* dan *al-Kaff* di Singapura yang menjadi tempat singgah orang-orang Yaman yang datang ke Asia Tenggara, banyak pesantren dan Masjid di Bali menjadi tempat singgah para pendatang dari Jawa dan Madura.[14] Sambil mereka belajar di pesantren mereka melirik peluang untuk mendapatkan kerja di Bali. Sebagian ada yang sambil mengajar di pesantren atau menjadi petugas

PUSLITBANG
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

13 Jajat Burhanuddin, 2006, *Mencetak Muslim Modern: Peta pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan – 1, h. 175

14 Ibid. h. 177

masjid untuk menunggu pekerjaan di tempat lain. Hal ini juga ditemukan beberapa santri yang belajar di PP Roudlotul Huffadz.

Memang akhirnya masjid dan pesantren menjadi tempat sosialisasi maupun tempat pertemuan antar kaum pendatang. Pada hari jum'at, masjid menjadi tempat penting untuk saling tukar pengalaman dan informasi kerja bagi orang Islam. Sementara itu pesantren juga menjadi tempat yang aman bagi pendatang untuk membiasakan diri dengan budaya bali sambil melihat peluang pekerjaan yang mungkin dapat dikerjakan. Akibatnya banyak orang Islam di bali cenderung taat melakukan ibadah di masjid, karena ritual dijadikan sebagai media untuk memperkuat ikatan sosial diantara mereka. Fenomena ini membuat suburnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Bali walaupun jumlah pemeluknya relatif sedikit.[15]

Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kediri Tabanan Tahun 2004 menyebutkan jumlah penduduk yang beragama Islam di kecamatan ini masing-masing Desa adalah: Bajar Anyar 795 66 jiwa, Abian Tuwung 2.324 jiwa, Kediri 137 jiwa, Pondok Bandung 137 jiwa, Nyambu 12 jiwa, Kaba-Kaba 38 jiwa, Cepaka 0 jiwa, Buwit 11 jiwa, Pandak Gede 119 jiwa, Beraban 39 jiwa, Belalang 0 jiwa, Pangkung Tibah 23 jiwa, Bengkel 0 jiwa, Pejaten 263 jiwa, dan Nyitdah 670 jiwa. Jika data kasar itu dibandingkan dengan jumlah keberadaan tempat ibadah, tempat pengajian (majlis taklim), lembaga pendidikan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

15 Ibid.

formal seperti sistem madrasah, dan madrasah diniyah terlihat ketidakmerataan antara jumlah umat Islam di satu desa/kelurahan dan satu desa/kelurahan yang lain dengan keberadaan institusi keagamaan tersebut. Walaupun masih hipotesa, berikut penulis gambarkan bagaimana masyarakat muslim minoritas di kecamatan kediri Tabanan dalam mendapatkan pelayanan keagamaan termasuk pelayanan pendidikan. *Pertama*, lembaga pendidikan keagamaan Madrasah Diniyah, pesantren, TKA/TPA, Majelis Taklim berada di wilayah komunitas muslimnya banyak seperti di Abian Tuwung, Banjar Anyar, Kediri. *Kedua*, desa-desa yang komunitas muslimnya sedikit hanya ada lembaga TKA/TPA yang terdapat di Mushalah-mushalah atau di rumah Ustadz.

Dari data-data tersebut penulis mengasumsikan bahwa pada masyarakat minoritas akan terjadi kurangnya pelayanan terutama pelayanan pendidikan keagamaan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa fokus penelitian ini adalah pendidikan keagamaan berupa pesantren dan madrasah diniyah maka yang akan dianalisa adalah kedua bentuk kegamaan tersebut yaitu MD Miftahul Huda dan PP Raudlatul Huffadz.

Pelayanan pendidikan pada hakekatnya merupakan sebuah pekerjaan, yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Pelayanan mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan untuk menghasilkan produk atau perilaku penyedia layanan yang dalam hal ini pengelola pendidikan madrasah diniyah dan pesantren yang berkaitan dengan sikap melayani seperti memberi saran

PENGGUNAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

atau informasi. Dengan demikian, pelayanan pendidikan keagamaan merupakan perbantuan bagi pelanggan dalam hal ini masyarakat minoritas muslim di kecamatan Kediri Tabanan.

Lembaga MD dan Pesantren merupakan gabungan antara penyedia jasa dan pelanggan. Karena lahirnya MD berasal dari umat, untuk umat, dan oleh umat. Kepala, guru, staf administrasi adalah kumpulan pelayanan, sedangkan orang tua murid, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya adalah kumpulan pelanggan. Jika kita melihat fenomena lahirnya MD, sulit dipisahkan satu sama lain karena misalnya seorang kepala MD, guru MD disamping sebagai penyedia layanan, mereka juga pengguna jasa tersebut dengan anaknya belajar di MD bersangkutan. Meskipun tidak mudah untuk membedakan siapa penyedia layanan dan siapa pengguna jasa dalam kasus pelayanan pendidikan MD, indikator-indikator baik buruknya sebuah pelayanan sebagaimana telah disebutkan dapat menjadi alat analisa.

Pertama, dikatakan baik pelayanan pendidikan MD dan pesantren jika memiliki keandalan, yaitu kemampuan tenaga kependidikan MD dan pesantren untuk memberikan jasa sesuai yang dijanjikan. Profil tenaga guru pada MD Miftahul Huda berjumlah 7 orang, sedangkan Pesantren Raoudlatul Huffadz sebanyak 18 orang. Dilihat dari latar belakang pendidikan di MD Miftahul Huda mereka terbilang kurang *qualifed* sebagaimana yang dikehendaki undang, mereka pada umumnya berpendidikan MA/SMA, dan sebagian kecil lulusan S1. Sedangkan latar belakang

PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

pendidikan di Pesantren Roudlatul Huffadz cukup *qualified* karena mayoritas tenaga guru adalah lulusan S1 (11 orang) dan sisanya lulusan SMA/Aliyah/Pesantren.

Seberapa besar ketercukupan dan keandalan tenaga guru tersebut di MD dan Pesantren masing-masing dalam melayani pendidikan anak didiknya. Sebagian wali murid menilai bahwa keadaan guru MD Miftahul Huda dalam bidang agama cukup baik, pendidikan agama telah memberikan peran positif terhadap anak didik di keluarga maupun di sekolah, mereka memiliki kemampuan seperti mengaji, menguasai bahasa arab, terbiasa mengamalkan ibadah dan mantap dalam bidang akidah. Drs. Sulaiman salah seorang wali murid juga mengatakan bahwa lulusan MD Mifathul Huda dapat bersaing ketika mengikuti test ujian di pesantren Jawa dengan santri dari daerah lain dalam hal penguasaan ilmu-ilmu agama. Bagi santri yang sekolah formal (SD dan SMP), mereka sangat membantu sekali dalam penguasaan pelajaran agama, merasa tidak ketinggalan bahkan berprestasi walaupun lulusan dari SD. Hal lain yang menjadi harapan pengelola MD Miftahul Huda tentang tenaga pengajar yaitu masih minimnya kesejahterahan tenaga pengajar, sehingga ada dampak sedikit terhadap proses belajar mengajar. Belum cukupnya tenaga guru juga disampaikan para orang tua murid MD, Drs. Purwanto. Memang di MD Miftahul Huda hanya ada 6 orang guru padahal kelasnya ada tiga. Menurut para orang tua murid bahwa guru MD Miftahul Huda tidak bisa tamatan Madrasah Aliyah. Guru-guru di MD ini harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat

PERPUSTAKAAN
BALAI LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

yang cukup berpendidikan baik dengan minoritas muslim maupun mayoritas Hindu. Walaupun hanya enam orang guru, pelayanan pendidikan keagamaan sudah baik dari segi kualitas.

Bagaimana ketercukupan dan keandalan tenaga guru dipesantren Roudlatul Huffadz. Drs.Sulaiman menilai keadaan ustadz/guru sudah cukup, tenaga pendidik sudah bisa melayani pendidikan. Keadaan guru di pesantren ini juga dikatakan H. Imam Mawardi cukup baik dalam melayani pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat dari output lulusan dari PP Raudlatul Huffadz banyak santri-santrinya telah hafal al-Qur'an 30 Juz, terlibat aktif dalam lomba kegiatan MTQ baik tingkat daerah maupun nasional, disamping hafal al-Qur'an para santri/almni PP Raudlatul Huffadz juga menguasai kitab-kitab klasik (kitab kuning).

Pesantren Raudlotul Huffadz disamping memberikan pembinaan pendidikan terhadap para santri sebagai tugas utamanya, pesantren Roudlatul Huffadz juga telah memberikan pelayanan berupa pembinaan baik dalam bidang ta'lim maupun ubudiyah terhadap masayarakat sekitar. Sebagaimana disebutkan oleh KH. Noor Hadi, pelayanan dalam bidang *ta'lim* diantara pelayanan yang diberikan pesantren terhadap masyarakat sekitar antara lain; Pengajian majelis taklim untuk kaum bapak maupun kaum Ibu, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) bagi para santri yang telah menyelesaikan/tamat TPA, Lembaga Tahfidz Qur'an, Pesantren kilat. Dalam bidang ubudiyah pelayanan pesantren terhadap masyarakat diantaranya; kegiatan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

bimbingan tilawatil Qur'an, Kelompok zikir, kegiatan manasik haji, penyelenggaraan janazah, bantuan hukum/ konsultasi hukum Islam, keluarga (faraid, nikah, talak), kegiatan mushala sekitar, dan lain-lain.

Kedua, dikatakan baik pelayanan pendidikan MD dan pesantren jika memiliki daya tanggap, yaitu kemampuan tenaga administrasi dan atau karyawan untuk membantu masyarakat pengguna lembaga MD dan pesantren secara cepat dan bermakna. Di MD Miftahul Huda tidak ada peran khusus diposisikan sebagai tenaga administrasi. Sedangkan di Pesantren Raodlatul Huffadz sudah ada walaupun masih sangat minim kemampuannya (para santri). Individu atau kelompok yang membantu masyarakat pengguna MD dan pesantren adalah seluruh masyarakat muslim sendiri. Mereka saling bertukar pikiran seputar perencanaan, harapan dan target yang hendak dicapai. Selain itu juga mereka bersama-sama meyakinkan bahwa usaha-usaha yang direncanakan itu akan tercapai targetnya. Karenanya sesuai dengan indikator pelayanan yang *ketiga* yakni dikatakan baik pelayanan pendidikan MD dan pesantren jika memiliki kepastian yaitu tenaga administrasi dan karyawan memiliki kemampuan untuk meyakinkan bahwa janji yang disampaikan adalah benar akan terpenuhi. Dari indikator kedua dan ketiga pelayanan dapat dikatakan bahwa pelayanan pendidikan MD sudah tergolong baik.

Begitu juga dengan indikator yang *keempat* dapat dikatakan baik pelayanan pendidikan MD dan pesantren, karena semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan MD dan pesantren peduli atau bisa memberikan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

perhatian secara individual kepada pengguna lembaga. Baik di MD Miftahul Huda maupun Pesantren Raudlatul Huffadz antara penyelenggara MD dan pengguna MD menjadi satu komunitas muslim yang berbeda dengan komunitas Hindu.

Indikator *kelima* adalah dikatakan baik pelayanan pendidikan MD dan pesantren jika fasilitas-fasilitas kependidikan bisa dilihat mulai dari fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan komunikasinya. Umumnya para orang tua murid mengatakan bahwa untuk daerah minoritas, fasilitas-fasilitas kependidikan MD dan pesantren sudah memadai. Namun, mereka berusaha bersama-sama dengan penyelenggara MD dan pesantren untuk menambah ruang belajar, menambah ruang mushala, melengkapi fasilitas buku pelajaran dan merenovasi ruang-ruang yang sudah rusak.

Sedangkan sarana-prasarana lembaga pendidikan keagamaan lainnya seperti TKA/TPA ditemukan kondisinya sangat terbatas, bahkan boleh dikatakan darurat, tempat pembelajaran mereka di mushala-mushala/masjid, rumah-rumah warga/ustadz dimana para siswa belajar al-Qur'an belajar sesuai dengan kondisi apa adanya. Hal ini juga terkait dengan masih sulitnya membangun tempat yang permanen dan mahalnya harga tanah di Bali disebabkan karena persoalan dana, dan yang lebih sulitnya pendirian tempat ibadah/pendidikan Islam bagi umat islam di Bali, karena harus melalui persyaratan-persyaratan yang sulit bagi minoritas Islam di bali, terlebih lagi setelah adanya peristiwa bom Bali satu dan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

dua yang menimbulkan kecurigaan yang berlebihan bagi umat Islam Bali sendiri.

Di tengah kondisi keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, bagi masyarakat muslim tidak mengurangi atau mengendorkan semangat masyarakat muslim / orangtua menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan keagamaan TKA/TPQ dan Madrasah Diniyah untuk belajar ilmu-ilmu agama. Di beberapa tempat ditemukan beberapa lokasi dimana komunitas muslim berada (Kampung muslim), mulai pagi hari, siang dan sore terdapat beberapa pengajian al-Qur'an (TPA/TPQ) bagi anak-anak, dan pengajian orangtua (majelis taklim) dan lain-lain.

Harapan Pelayan Pendidikan Keagamaan

Harapan adalah ambisi dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang dimiliki saat ini, atau keinginan untuk meraih cita-cita. Keinginan yang kuat dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang kurang diminatinya, semata-mata demi terwujudnya hal-hal yang diinginkannya. Setiap orang memiliki tingkat keinginan sendiri, yaitu tingkat yang diinginkan dapat tercapai. Biasanya, tingkat harapan yang realistis adalah yang sepadan dengan kemampuan sendiri dan keadaan seperti ini memberikan peluang yang lebih besar untuk tercapainya hal-hal yang diinginkan. Jika seseorang mempunyai tingkat harapan yang jauh di atas kemampuannya, besar kemungkinan bahwa ia akan gagal dan mengalami frustasi. Seseorang yang kurang berani

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

menghadapi kegagalan cenderung untuk mempunyai tingkat harapan yang rendah.[16]

Setidaknya kerangka definisi di atas dapat digunakan dalam menggambarkan harapan masyarakat muslim minoritas di kecamatan Kediri Tabanan. Dari beberapa informan seperti tokoh masyarakat, orangtua murid yang kami wawancarai, terlihat ada keinginan dan harapan terhadap lembaga Pesantren dan MD.

Bentuk Lembaga Pendidikan Keagamaan

Berdasarkan wawancara terhadap sejumlah tokoh masyarakat baik dari tokoh ulama, ormas Islam maupun wali murid santri dapat diperoleh informasi bahwa pada dasarnya mereka sangat membutuhkan kehadiran lembaga pendidikan keagamaan yang memadai; mulai dari tingkat pendidikan formal seperti RA/TK Islam, MI, MTs, dan MA. Mereka berharap lembaga pendidikan keagamaan ini memiliki kualitas yang lebih baik dari segi sumber daya manusia (tenaga pengajar), sarana prasarana, manajemen lembaga dan output lulusannya.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Pendidikan keagamaan di pondok pesantren, menurut H. Shohib salah satu tokoh muslim masyarakat Tabanan berharap agar lembaga pendidikan keagamaan di pondok pesantren lebih memfokuskan pada penguatan *tafaquh al-fiddin* (ilmu-ilmu alat dan tahfidzul qur'an), hal senada juga diamini oleh Drs. Sulaiman wali murid dan salah seorang tenaga pengajar di SMKN dan SMPN Tabanan, beliau

16 Dikutip dari Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 2, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1988, h. 373.

mengharapkan agar pendidikan di madrasah diniyah dan pesantren lebih memprioritaskan pada pendidikan agama yang lebih mendalam lagi, hal ini penting dalam rangka membentengi umat Islam sebagai minoritas dari pengaruh iman (keyakinan) dan budaya dari luar.

Sedangkan lembaga pendidikan keagamaan di Madrasah Diniyah, mereka berharap agar Madrasah Diniyah tidak perlu diformalkan, sebagaimana keinginan dan harapan dari pengelola MD Miftahul Huda. Mereka berpendapat apabila Madrasah Diniyah berubah menjadi formal maka akan memperlemah lembaga pendidikan agama yang sudah ada (berdiri) seperti Madrasah Ibtidiayah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), hal lain yang menjadi ketidaksetujuan MD menjadi formal, karena sebagian besar siswa MD berasal dari sekolah formal (SD/MI, SMP/MTs), jika MD diformalkan, mereka menilai MD tidak akan laku lagi, karena adanya pengulangan-pengulangan mata pelajaran umum yang telah diajarkan di sekolah. Menurut Drs. Sulaiman, boleh saja MD diformalkan apabila siswa-siswinya hanya belajar di diniyah/tidak sekolah formal.

LITBANG DIKLAT
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Harapan masyarakat lainnya terhadap bentuk-bentuk pendidikan keagamaan yaitu adanya lembaga pendidikan yang dapat menampung seluruh lapisan masyarakat mulai dari usia dini sampai lanjut usia seperti TPA/TPQ bagi anak-anak usia dini, MD, majelis taklim, pondok pesantren, hal ini akan dapat menjamin pembinaan dan pelayanan umat Islam secara baik dan berkualitas.

Jenis Pendidikan Keagamaan

Terkait dengan jenis pendidikan keagaman yang diharapkan oleh warga minoritas, berdasarkan hasil wawancara pada sejumlah nara sumber seperti tokoh masyarakat, pimpinan ormas NU, Muhammadiyah, MUI, mereka mengharapkan bahwa jenis pendidikan keagamaan yang sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas utama adalah pendalaman/penanaman nilai-nilai agama terutama dalam bidang akidah, mereka berpandangan bahwa dengan penanaman akidah yang kuat diharapkan umat Islam dapat membentengi imannya ditengah-tengah kehidupan sekitar. Kemudian jenis pendidikan tentang pendidikan baca tulis al-Qur'an, Praktek ibadah (shalat, puasa, zakat, haji) dan sebagainya. Hal yang lebih penting juga jenis pendidikan keagammaan di ajarkan adalah seperti yang di ungkapkan H. Isro'i, SAg (Kabid Pendais dan PK Pontren Kanwil Depag propinsi Bali) dan Drs. HM Shaleh (ketua MUI kabupaten Tabanan) tentang perlunya penanaman nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah *wathaniyah* dan ukhuwah *basyariyah* (kesalehan lokal/sosial) dikalangan warga muslim, melalui pemahaman nilai-nilai kesalehan sosial ini diharapkan warga muslim Bali dapat memahami perbedaan yang ada sehinga dapat memperkuat rasa persatuan sebagai bangsa, sesama warga Indonesia, juga agar umat Islam lebih bijaksana dalam menyampaikan ajarannya dan tidak terjadi *offer acting* dalam menyampaikan ajaran agamanya di lingkungan mayoritas beragama Hindu.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Sarana Prasarana

Sebagai masyarakat yang relatif sedikit pemeluknya, pada umumnya mereka mendambakan lembaga pendidikan Islam yang lengkap mulai dari sarana dan prasana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecamatan Kediri. Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama dan wali santri terungkap bahwa mereka mendambakan sarana gedung yang permanen baik gedung maupun sarana belajar lainnya. Menurut tokoh masyarakat Kediri Drs. Purwanto masyarakat di Tabanan menginginkan lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki fasilitas yang memadai mulai dari sarana, tenaga dan fasiltas lainnya, karena dengan fasiltas yang baik akan cepat menyerap pelajaran bagi para anak didik/siswa.

Dalam bidang kurikulum, pada umumnya masyarakat mengharapkan kurikulum yang digunakan adalah dalam bentuk kurikulum kombinasi yakni kurikulum yang tidak hanya berasal dari pemerintah (depag) saja tetapi juga ada kurikulum dari yayasan/lokal dengan memperhatikan tuntutan perkembangan zaman/ merespon perekembangaan zaman dan wilayah yang ada, hal ini penting dalam rangka memperkuat identitas keislaman bagi warga muslim yang minoritas di Bali.

PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

***

Implementasi pelayanan pendidikan keagamaan madrasah diniyah, pesantren di minoritas muslim Tabanan hampir seluruhnya atas inisiatif masyarakat muslim Posisi pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang

membidangi urusan keagaman Islam di Kandepag sebagai fasilitator. Secara umum seluruh masyarakat minoritas muslim telah dapat terlayani dalam pendidikan kegamaan dari usia dini sampai orang tua, walaupun masih terbatasnya sarana-prasarana, kurangnya kesejahterahan tenaga guru, tetapi itu semua tidak mengurangi semangat masyarakat muslim untuk belajar agama.

Bentuk bentuk pelayanan pendidikan keagamaan di daerah Tabanan mulai dari usia dini sampai orang tua, yaitu berupa TKA/TPA bagi usia dini dan anak sekolah Dasar (SD/MI), majelis taklim (Remaja/Pemuda, kaum bapak dan kaum Ibu) Madrasah Diniyah (*Awaliyah*, *Wustha* dan '*Ulya*), dan Pondok Pesantren. Harapan masyarakat muslim sebagai minoritas menginginkan pelayanan pendidikan keagamaan yang berkualitas. Sedangkan hambatan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan keagamaan di masyarakat minoritas, seperti masih sulitnya mendirikan tempat ibadah/pendidikan dan mahalnya tanah di Bali.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

6 Merancang Masa Depan Model Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Merancang Masa Depan Model Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini[1]

Jika kalian tidak lagi mendengarkan riang tawa dan canda anak-ana kecil di dalam masjid, maka waspadalah berarti kalian dalam bahaya
(Muhammad al-Fatih, Penakluk Konstantinopel)

Upaya masyarakat untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan agama anak usia dini (PAAUD) merupakan fenomena positif keberagamaan masyarakat. Menanamkan nilai-nilai agama kepada anak bagi seorang muslim merupakan kewajiban pertama dan utama sebelum mengajarkan yang lain. *"awwalu waajibin 'ala al-insaani, ma'rifatun Ilahi bi istiqaani*" (kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhan dengan

1 Tulisan ini diolah dari hasil penelitian tentang baseline pengembangan pendidikan keagamaan PAUD, tahun 2010.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

yaqin). Pengenalan awal terhadap Tuhan diharapkan dapat menjadi fondasi pengembangan emosional, sosial dan kognitif anak dalam perkembangan selanjutnya. Pendidikan al-Qur'an termasuk core pendidikan agama, karena pengenalan al-Qur'an merupakan pembuka jalan menuju pengenalan terhadap Tuhan melalui ibadah shalat.

Pendidikan agama pra sekolah seperti Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-Kanak Islam (TKI), Taman Kanak-Kanak al-Qur'an (TKA) akan sangat membantu mempersiapkan anak-anak memperoleh pendidikan agama yang ada di SD. Bukankah usia pra sekolah merupakan usia emas (*golden age*) yang menentukan keberhasilan masa selanjutnya. Pendidikan agama di sekolah dengan kurikulum yang padat materi, waktu terbatas serta lingkungan yang kurang mendukung, merupakan kendala yang tidak pernah terpecahkan. Anggapan tersebut didasarkan pada banyaknya siswa yang tidak mampu shalat secara benar, tidak dapat membaca al-Qur'an atau prilaku menyimpang lainnya.

PENELITIAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Masyarakat bersama pemerintah dan Pemerintah daerah berupaya membangun lembaga Pendidikan Agama dan keagamaan lainnya agar dapat memberikan pelayanan pendidikan agama kepada anak usia dini secara lebih baik. Dengan bekal pengenalan agama dan baca tulis al-Qur'an anak-anak yang masuk SD atau MI akan membantu keberhasilan pendidikan agama pada jenjang berikutnya.

Selama ini pendidikan agama dan pengenalan baca-tulis al-Qur'an merupakan kegiatan keagamaan masyarakat yang kondisinya sangat beragam, sesuai dengan kondisi

dan kemampuan masyarakat. Melalui bimbingan orangtua atau anggota keluarga yang ada di rumah anak-anak mulai dikenalkan dan dibiasakan "ngaji" al-Qur'an dan shalat berjamaah. Sebagian anak-anak memperoleh pendidikan agama pada seorang ustadz di surau, langgar atau masjid terdekat. Bagi keluarga tertentu khususnya keluarga kelas menengah keatas di perkotaan sebagian mengundang guru privat untuk mengajar agama dan baca tulis al-Qur'an untuk anak-anaknya dan mereka sendiri ikut belajar agama dan baca al-Qur'an.

Pada dasawarsa 80-an mulai berkembang lembaga pendidikan agama usia yang bersifat formal RA/BA dan nonformal Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKA) dan TPA. Sistem pendidikannya sudah bernuansa pendidikan formal, belajar secara Kelasikal, menggunakan alat-alat belajar, dengan kegiatan belajar yang terjadwal, memiliki pakaian seragam bahkan sering dilepas dengan wisuda layaknya sebuah perguruan tinggi. Berkembangnya LPAAUD tersebut selain karena tuntutan masyarakat akan pentingnya pendidikan agama juga karena ditemukannya metode baca Al-Qur'an yang memungkinkan anak lebih cepat membaca al-Qur'an dibandingkan dengan metode Bagdadiyah. Seperti metode "Iqra" yang dirintis oleh Ustadz As'ad Humam antara 1983-1988 dan dikembangkan melalui Team Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Mushala Yogyakarta (Team Tadarrus AMM).

Jumlah Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA/TPQ), Taman Kanak-Kanak al-Qur'an (TKA/TKQ) menurut data Statistik Pendidikan Agama dan keagamaan tahun 2005-

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

2006 sebanyak 127.441 lembaga, dari jumlah tersebut sebanyak 10.361 atu 8,1% dikelola organisasi, 12.466 atau 9,8% dikelola Yayasan dan 11.936 at 9,4% dikelola oleh lembaga lainnya. Sementara asebanyak 92.678 atau 72,7% dikelola oleh masyarakat. Hal ini menandakan bahwa masyarkat sangat berperan penting dalam hal pendidikan keagamaan. Jumlah santri secara keseluruhan berjumlah 3.649.901 0rang atau 47,2 % santri laki-laki, sementara jumlah santri perempuan lebih banyak dibandingkan santri laki-laki, yaitu sebanyak 4.076.383 atau 52,8 %.

Sementara itu jumlah RA/BA tahun 2005-2006 berjumlah 18.413 lembaga terdiri dari 10.712 memiliki ijin operasional dan sisanya 7.701 tidak memliki ijin operasional. Jumlah murid sebanyak 682.407 siswa terdiri dari 340.473 (49,9%) laki-laki, sedangkan murid perempuan berjumlah 341.931 (50,1%). Jumlah rombel yang ada sebanyak 33.999, dan rasio murid : rombel sekitar 20,4.

Permasalahannya adalah apakah dengan jumlah LPAAUD yang ada baik formal maupun non formal sudah menjangkau semua anak usia dini? Berapa banyak mereka yang belum memperoleh pendidikan agama termasuk pengenalan terhadap baca al-Qur'an? Dengan kata lain tetap diperlukan data yang lengkap, akurat dan komprehensif tentang peta pendidikan agama untuk PAUD masyarakat di masyarakat. Data dan informasi tersebut mencakup; kelompok sasaran yang perlu memperoleh pelayanan pendidikan agama, model-model LPAAUD yang selama ini memberikan pelayanan, berapa

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

banyak anggota masyarakat yang belum memperoleh pelayanan pendidikan agama, dan permasalahan apa saja yang dihadapi LPAAUD dan bagaimana mempersiapkan LPAAUD agar dapat memainkan peran strategis sebagai lembaga pendidikan agama dimasa mendatang.

Kajian ini mencoba memperoleh data dan informasi tentang LPAAUD yang diperlukan (relevan) untuk perencanaan pengembangan LPAAUD di masa mendatang dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataaan pelayanan pendidikan agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mencakup; a) Perkembangan pendidikan agama anak usia dini (LPAAUD); b) Data jumlah anak usia pra sekolah yang belum menerima pelayanan pendidikan agama sebagai target group; c) Peta perkembangan dan karakteristik LPAAUD mencakup; d) Peran Pemerintah dan Pemda terhadap pelayanan pendidikan agama PAUD; e) Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengembangkan LPAAUD.; kelembagaan, kurikulum, guru, strategi pembelajaran, sarana fasilitas, pembiayaan, sistem pengelolaan dan jaringan dan peran pemerintah dan Pemda.

PUSLITBANG
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Perkembangan LPAAUD

LPAAUD khususnya TKA/TKQ ternyata mengalami perkembangan yang cukup signifikan terlihat pertambahan dari tahun 2003-2004 berjumlah 78.548 dengan santri 2.335.562 orang (47,3 % laki-laki dan 52,7 % perempuan) pada 2005-2006 berkembang menjadi 127.441 buah dengan santri 3.649.901 orang (47,2 % laki-

laki dan 52,8 % perempuan). Jumlah RA/BA tahun 2005-2006 mencapai 18.413 dengan siswa 682.407 (49,9 % laki-laki dan 50,1 % perempuan).

Perkembangan LPAAUD terlihat dari tahun berdirinya. *Booming* kehadiran LPAAUD setelah tahun 2000 terjadi antara 2000–2005 sebesar 28,7 %, setelah itu terlihat mengalami perkembangan yang melambat. Secara komparasi jumlah TKA/TKQ jauh melampaui perkembangan RA/BA/TKI

Tabel 1:
Tahun Berdiri RA/BA

Jawaban	F	%	Keterangan
Seb. Tahun 2000	241	63,9	Booming TKA/TKQ setelah ada metode Iqra. Pengolahan disatukan antara RA,BA, TKI, TKA/TKQ
2000 – 2002	50	13,3	
2003 – 2005	58	15,4	
Ses. 2005	28	7,4	
Jumlah	377	100	

Sumber : diolah dari Baseline

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Hal tersebut mudah difahami bagaimana pendidikan nonformal dengan segala kelonggaran dan berbasis budaya masyarakat sangat akrab tradisi mengaji. Sementara RA/BA sebagai lembaga pendidikan formal relative ketat dengan berbagai persyaratan dan tata aturan sebagaimana layaknya pendidikan formal, termasuk pembiayaan dan sebagainya.

Tabel 2: Peta Peserta Didik LPAAUD

No.	Propinsi Sasaran	RA/BA	TKA/ TKQ	Siswa RA/BA	Santri TKA/ TPA
1.	Babel	32	318	1.960	19.312
2.	Banten	614	2.086	20.189	146.723
3.	Bengkulu	62	1735	3.198	75.267
4.	Yogyakarta	1009	3.084	24.095	143.785
5.	Gorontalo	32	664	777	33.874
6.	Kalteng	111	829	5.944	42.965
7.	Kaltim	62	1.505	3.459	90.265
8.	Lampung	347	3.765	7.513	222.604
9.	Maluku	4	1.151	101	79.811
10.	NTB	112	4.210	2.611	261.551
11.	Sumut	747	1.231	29.093	56.848
12.	Sultra	70	2.369	1.124	105.595

Latar belakang berdirinya LPAAUD tampaknya faktor dominan adalah keprihatinan maasyarakat atas kurang memadai dan efektifnya pendidikan agama anak usia dini. Sementara untuk TKA/TKQ jaringan BKPRMI menjadi efektif dalam pengembangan LPAAUD di daerah. Dalam konteks ini betapa peran TKA/TKQ cukup signifikan dalam memberikan pelayanan pendidikan agama anak usia dini. Munculnya Perda di beberapa kabupaten/kota untuk meningkatkan pemerataan pendidikan agama anak usia dini dapat difahami.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel 3: Latarbelakang Berdirinya LPAAUD

Jawaban	F	%	Keterangan
Keprihatinan	110	39,2	
LPTA kurang efektif	13	4,7	
Prakarsa Pemda	5	1,8	
Tradisi Ngaji	23	8,3	
Ormas Islam	14	5,1	
BKPRMI	112	40.9	Khusus TKA/TKQ
Jumlah	277	100	

Capaian Pelayanan Pendidikan Al-Qur'an

Berapa besar angka riel Anak Usia Dini yang belum memperoleh pendidikan agama? Sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab, karena belum ada data yang valid dan sulit diprediksi. Kenyataan terdapat sangat beragamnya pola pendidikan Agama yang diselenggarakan LPAAUD baik formal maupun nonformal, disamping tradisi ngaji yang cukup strategis dalam pelayanan pendidikan agama khususunya baca tulis al-Qur'an. Di bawah ini angka perkiraan yang dipilih para pejabat terkait di daerah sample yang tingkat akurasinya masih patut dipertanyakan. Opsi yang diberikan mulai dari < 25 %, 25-50 %, >50%-75 % sampai >75 %.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel 4: Peta Peserta Didik dan Angka Capaian

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

%) dan guru privat (5,2 %) dan dirumah sendiri (26,2 %) yang selama ini dominant bergeser ke RA/BA dan TKA/TPQ. Artinya secara sistemik telah terjadi pergeseran dari sistem pendidikan agama informal kearaha non formal dan formal. Meskipun demikian tradisi ngaji di masjid, di rumah ustadz ataupun les privat masih berlangsung namun jumlahnya semakin berkurang.

Tabel 5: Tempat Belajar Agama selama ini

Opsi	Jawaban	F	%
a.	Di Masjid	135	26
b.	Rumah ustadz	129	33,5
c.	Privat	20	5,2
d.	Di Rumah	101	26,2
	Jumlah	385	100

Siapa yang belum tercover oleh LPAAUD yang ada, kemungkinannya karena hambatan cultural, social (kelompok masyarakat yang termajinalkan) dan hambatan geografis (*outreach areas*).

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Santri

Berapa jumlah siswa/santri masing-masing LPAAUD? LPAAUD yang terbanyak memiliki lebih dari 100 orang (30,8 %), disusul antara 51-75 santri (24,8 %), antara 20-50 santri (19,6 %), antara 76-100 santri (15,9 %) dan terakhir kurang dari 20 santri (4,7 %). Penyebaran besaran jumlah siswa/santri bukan hanya menunjukkan betapa beragamnya kuantiutas mereka yang dilayani tetapi juga menunjukkan batapa akrabnya LPAAUD dengan

masyarakat yang dilayani, khususunya bagi TKA/TKQ.

Usia siswa/santri LPAAUD umumnya (60 %) berusia 4-5 tahun dan sebagian (34 %) berusia kurang 4 dan sisanya 6 % lebih dari 5 tahun.

Tabel 6: Usia siswa/santri RA/BA dan TKA/TKQ

Opsi	Jawaban	Jumlah	%
a.	<4 tahun	48	12,9
b.	4-5 tahun	93	25
c.	5-6 tahun	177	47,6
d.	>6 tahun	54	14,6
	JUmlah	372	100

Jumlah santri dalam suatu kelompok belajar antara 15-20 orang (46,6 %), disusul lebih dari 20 orang (32,1 %) dan terakhir kurang dari 15 orang (11,3 %). Meskipun idealnya jumlah santri per rombongan kelas menurut responden dalam jumlah kecil atau kurang dari 15 santri (44,8 %), atau antara 15-20 orang (41 %) dan sisanya 14,2 % boleh lebih dari 20 orang.

Namun karena terbatasnya tenaga pengajar serta tradisi ngaji berapa saja jumlahnya, maka jumlah santri per rombongan belajar tetap besar. TKA/TKQ namun dalam system pembelajarannya masih tetap menganut system ngaji biasa. Artinya berapa saja jumlah santrinya tetap dijadikan satu kelas dan diajar beberapa guru yang saling mengawasi.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Tujuan dan Kurikulum

Para penyelenggara LPAAUD secara kreatif mendisain kurikulumnya secara kombinasi (53,3 %), artinya disesuaikan dengan visi dan misi penyelenggara. Sebagian diambil dari buku panduan RA Depag, sementara yg lain mengacu kepada panduan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRMI) yang berpusat di Istiqlal, dari Team Tadarrus AMM Kota Gede Yogyakarta, dari Lembaga Pengemabngan Tilawah Quran (LPTQ) Depag dan Yayasan sendiri. Sebagian yang lain (34,4 %) yayasan penyelenggaran menyusun sendiri kurikulum yang diajarkan dan sisanya 11,3 % menggunakan kurikulum Departemen Agama. Namun dalam kenyataannya semua LPAAUD mengajarkan: Membaca al-Qur'an, bacaan shalat, hafalan surat pendek, latihan praktek shalat, do'a sehari-hari, akhlakul karimah, menulis ayat dan sebagian sudah mengajarkan tajwid.

Kurikulum yang akan datang menurut responden sebaiknya mencakup: Kemampuan membaca Al-Qur'an (16,9%), Baca al-Qur'an dan Shalat (49,5 %), Akhlkakul Karimah (23,1 %) dan Kemampuan Dasar (10,5 %).

INKLAS BERAMAL
PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel 7: Kurikulum LPAAUD sekarang dan mendatang

Opsi	Jawaban	Sekarang (%)	Yang Akan Datang (%)
a.	Kemampuan baca Al-Qur'an	54,4	16,9
b.	Shalat	20,7	49,5

c.	Akhlakul karimah	12,3	23,1
d.	Kemampuan dasar	12,6	10,5
		100	100

Dengan materi kurikulum tersebut terlihat LPAAUD sebenarnya bukan hanya mengajarkan bagaimana anak-anak mampu membaca Al-Qur'an, tetapi lebih dari itu berperan sebagai wadah penanaman nilai-nilai Islam, meletakkan fondasi tradisi keagamaan dan sekaligus pengenalan identitas cultural mereka. Dan kurikulum yang diajarkan sekarang diakui oleh para penyelenggara (44 %) masih relevan untuk dipertahankan di masa mendatang. Usulan-usulan untuk penyempurnaan memang terlihat seperti perlunya menulis huruf Arab/ khat, tahsinul qiraah, penyeragaman kurikulum.

Lama Belajar dan Waktu Penyelenggaraan

LPAAUD terbanyak (41,5 %) menyelenggarakan pendidikannya setiap hari atau 6 hari dalam seminggu, di susul urutan kedua 5 hari (26,7 %), 3 hari (22,3 %) dan ada yang 4 hari (10 %). Adanya perbedaan jumlah hari belajar perminggu nampaknya merupakan kesepakatan antara para penyelenggara dan masyarakat atau orang tua santri baik disebabkan adanya kegiatan les anak SD, tradisi yang sudah lama berlaku serta ketersediaan tenaga pengajar. Khusus RA/BA sebagai lembaga pendidikan formal tentunya mengacu kepada kalender pendidikan yang ada.

Tabel 8: Jumlah hari Belajar sekarang dan yang akan datang

Opsi	Jawaban	Sekarang (%)	Yang akan datang (%)
a.	6 hari	41,5	53,1
b.	5 hari	26,2	28
c.	4 hari	10	8,5
d.	3 hari	22,3	10,4
		100	100

Kedepan para responden mengharapkan anak-anak mereka dapat belajar 6 hari (53,1 %) , disusul 5 hari (28 %) atau paling sedikit 4 hari (8,5 %). Disini terlihat para penyelenggara menginginkan agar lebih banyak waktu untuk anak-anak belajar, mengingat harapan orang tua dan masyarakat agar anaknya lebih mengenal dan memahami ajaran agama dan mampu baca al-Qur'an semakin meningkat. Bahkan LPAAUD bukan saja dianggap sebagai lembaga Ngaji tetapi lebih dari itu sebagai lembaga sosialisasi nila-nilai dan ajaran agama.

Berapa lama PAAUD sebenarnya yang diperlukan sebelum mereka masuk pendidikan dasar? Ternyata ada kecenderungan kearah 2 tahun meskipun juga ada toleransi sampai 3 tahun, khususnya bagi TKA/TKQ.

Tabel 9: Lama Penddikan LPAAUD
Sekarang dan Yang akan Datang

Opsi	Jawaban	Sekarang (%)	Yang akan datang (%)
a.	1 tahun	25,3	23,4
b.	2 tahun	41,9	44,2

PERPUSTAKAAN BALAI PENELITIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA RI

c.	3 tahun	19,8	32,4
d.	>3 tahun	13	-
		100	100

Adapun waktu belajar, LPAAUD yang ada sekarang dan yang akan datang menunjukkan kecenderungan pagi hari.

Tabel 10: Waktu Belajar sekarang dan Yang akan datang

Opsi	Jawaban	Sekarang (%)	Yang akan datang (%)
a.	Pagi	35,4	38,7
b.	Siang	16,4	16,1
c.	Sore	23,9	26,3
d.	Malam	24,3	18,9
		100	100

Penentuan waktu belajar juga sering mengalami perubahan disebabkan kegiatan sekolah anak. Bagi anak-anak yang sekolah sore, pengelola TKA membuka pelajarannya pagi hari. Bagi anak-anak yang tidak sempat siang hari, TKA diselenggarakan pada malam hari sesudah Maghrib sampai Isya. Ada keuntungan tersendiri karena anak-anak dapat shalat berjamaah bersam-sama orang tua mereka.

PUSAT PENELITIAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Guru atau Ustadz

Salah satu kelemahan penyelenggaraan pendidika Al-Qur'an adalah kurang memadainya tenaga guru baik kuantitatif maupun kualitas dan kompetensinya. Jumlah guru di masing-masing LPAAUD, khususunya TKA/TKQ

tertihat “seadanya” dan siapa saja yang mau dan sempat mengajar. Berapa rata-rata jumlah jumlah guru pada satu LPQ, berapa ratio antara guru dengan santri/murid? LPQ yang gurunya kurang dari 3 orang sebanyak 15,4 %, sedangkan antara 3-5 orang mencapai 54, 6 % dan sisanya lebih dari 5 orang sebanyak 30%.

Selain itu tingkat kehadiran guru juga ternyata “masih rendah” karena status mereka guru sukarela/honor dan hanya memperoleh imbalan tidak memadai. Seorang guru dengan mudah meninggalkan tugasnya, seperti pulang kampong berbulan-bulan, bahkan ada pimpinan LPAAUD meninggalkan tugasnya untuk khuruj lebih dari 1 tahun dan kemungkinan tidak kembali. Pergantian guru juga terjadi kapan saja dan oleh siapa saja yang sempat. Untuk TKA/TKQ yang “baik” kondisinya lebih teratur. Kehadirannya diabsen dan diberikan imbalan. Artinya setiap datang ada uang transportr di luar gaji bulanan. Untuk RA/BA sebagai lembaga pendidikan formal dapat dipastikan tentunya lebih baik dan memadai secara kualifikasi, kompetensi maupun disiplin kehadirannnya.

PENDIDIKAN DAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Berapa besar imbalan guru LPAAUD? Lebih dari setengahnya (56,2 %) memperoleh imbalan kurang dari Rp 100.000,- sebagian kecil (29,8 %) antara >Rp 100.000,- sampai Rp 500.000,-. Yang memperoleh antara >Rp 500.000,- s/d Rp 750.000,- hanya 19,3 % dan sisanya yang memperoleh lebih dari Rp 750.000,- Rp 1000.000,-sebanyak 3,1 % dan yang lebih dari Rp 1000.000,- (0,6 %).

Berapa besar honor yang diharapkan responden bagi seorang guru LPAAUD? 35,4 % mengharapkan honor guru antara Rp 100.000,- s/d Rp 500.000,- disusul 29,6 % sebesar antara antara Rp 500.000,- s/d Rp 750,000,- dan 26,5 % antara Rp 750.000,- s/d Rp1.000.000,- dan masih ada 7,5 % yang menjawab kurang dari Rp 100,000,-jumlah terkecil 1.2 %. diatas Rp 1.000.000,-,

Tabel 11
Honor guru PAAUD sekarang dan Yang akan datang

Opsi	Jawaban	Sekarang (%)	Yang akan Datang (%)
a.	< Rp 100.000	56,2	7,5
b.	100.000, - 500.000	29,8	35, 2
c.	>500.000- 750.000	19,3	29,6
d.	>750.000,- 1000.000.-	3,1	26,5
e.	> 1000.000,-	0,6	1,2
Jumlah		100	100

Untuk membayar honor guru umumnya penyelenggara memperolehnya melalui; SPP (44,3 %), uang pendaftaran (29,6 %), donator (14,1 %), pemerintah/Depag (6,9 %) pemda (5,1 %). Dengana polaa masukan yang ada para pengurus sendiri sering nombok untuk memenuhi keperluan penyelenggaraan LPAAUD khususunya TKA/ TPA. Di masa mendatang sebaiknya dana pemda (44 %), pemerintah/depag 30 %, sementara uang pendafataran 11,2 %, SPP (9,8 %) dan donator (4,2 %). Artinya masyarakat menghendaki agar pembiayaan pendidikan al-Qur'an menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemda.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel 12:
Sumber Pembiayan LPAAUD sekarang dan yang Akan Datang

Opsi	Jawaban	Sekarang (%)	Yang akan datang (%)
a.	Uang pendaftaran	29,6	11,2
b.	SPP	44,3	9,8
c.	Pemda	5,1	44
d.	Donator	14,1	4,2
e.	Pemerintah/depag	6,9	30,8
Jumlah		100	100

Harapan tersebut cukup beralasan karena sumber dana dari SPP sangatlah tidak memadai, sebab besarnya SPP kurang dari Rp 10.000,- perbulan (58,1 %), hanya 25,6 % yang membayar antara Rp 10.000,- s/d Rp 15.000,- , dan hanya 8,4 % yang membayar SPP lebih dari Rp 15.000,- Karenanya para penyelenggara mengharapkan agar di masa mendatang besarnya SPP lebih dari Rp 15.000,- (46 %), antara Rp 10.000,- s/d Rp 15.000,- (45,6 %), dan sisanya 8,4 % mempertahankan kurang dari Rp 10.000,- Keragaman pembiayaan, sumber pendapatan dan harapannya kedepan sebenarnya menggambarkan betapa beragamnya kondisi LPAAUD tertmasuk TKA/TPA baik secara social, cultural maupun financial. Tetapi itulah realitas dan sekaligus tantangan ke depan.

Pengadaan sarana pendidikan LPAAUD selama ini lebih banyak di lakukan oleh masyarakat atau yayasan, sementara sumber lain tidak memungkoinkan. Kedepan

para penyelenggara mengharapkan perubahan yang lebih berorientasi kepada anggaran pemerinrtah atau pemda.

‡ • „ ‹ • ƒ ƒ •

Para penyelenggara mengakui bahwa pembinaan LPAAUD khususnya TKA/TKQ selama ini dilakukan oleh Departemen Agama (60,8 %), disusul kedua LPPTKA atau BKPRMI (31,1 %), dan ormas (5,6 %) dan dinas/pemda 2,5 %. LPPTKA/BKPRMI merupakan lembaga mitra pemerintah yang selama ini mengembangkan jaringan perluasan pendirian TKA dan TPA di sejumlah daerah. Bahkan secara structural di masing-masing daerah ada Badan Kordinansi (Badko LPPTKA/BKPRMI) yang sering memperoleh dukungan dari Pemda/Bupati/Walikota. Tapi masing-masing daerah memiliki kebijakan tersendiri.

Tabel 13: Pembinaan LPAAUD sekarang dan Yang akan datang

Opsi	Jawaban	Sekarang (%)	Yang akan datang (%)
a.	Depag	60,8	75,7
b.	Dinas/Pemda	2,5	8,8
c.	Ormas	5,6	1,1
d.	LPPTKA/BKPRMI	31,1	14,4
Jumlah		100	100

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Para penyelenggara sebenarnya berharap Departemen Agama (75,7 %) melalui LPTQ mengambil peran aktif dalam pengembangan dan perluasan TKA/TKQ, karena menurut mereka pembinaan TKA/TQ termasuk tugas

Departemen Agama. Sebagian lagi (14,4 %) masih melihat LPPTKA/BKPRMI sebagai lembaga Pembina TKA/TPA, meskipun kemampuannya sangat tergantung dengan dukungan Pemda (Gubernur, Bupati/Walikota) yang tidak selamanya mendukung penuh pendidikan Al-Qur'an. Dan hanya 8,8 % yang berharap kepada pemda sebagai Pembina, sementara Ormas menduduki peringkat terbawah 1,1 %.

Pemerintah diharapkan berperan penyandang dana (47,6 %) dan sarana (42 %) bantuan guru (6,1 %) juga sebagai supervisor (4,3%). Artinya kebutuhan utama bagi LPAAUD khususnya TKA/TKQ adalah dalam pembiayaan, pengadaan sarana dan supervise/pembinaan berjharap banyak dari pemerintah dan pemda.

Tabel 14: Peran Pemda Sekarang dan Yang Akan Datang

Opsi	Jawaban	Sekarang (%)	Yang akan datang (%)
a.	Bantuan sarana	28,6	42
b.	Bantuan dana	40,6	47,6
c.	Bantuan guru	9,9	6,1
d.	Supervisi	20,9	4,3
		100	100

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Aspek-Aspek yang Perlu Dikembangkan

‡ • ‰ — ƒ – ƒ • ‡ Ž ‡ • „ ƒ ‰ ƒ ƒ •

Salah satu aspek yang sangat strategis dikembangkan adalah penguatan kelembagaan LPAAUD baik formal RA/

BA maupun non formal TKA/TKQ dengan mempertahankan keragaman yang ada sesuai dengan potensi, kondisi dan tradisi masyarakat. Meskipun mengembangkan diversifikasi kelembagaan namun secara kualitas perlu adanya standar baku untuk menjamin kualitas lulusan LPAAUD. Penguatan kelembagaan sebaiknya masyarakat tetap sebagai subjek, pemerintah dan pemda berperan sebagai supervisor dan fasilitator. Penguatan kelembagaan juga dapat dilakukan dengan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pusat BKPRM. Penguatan dan perluasan kelembagaan juga harus memperhitungkan target group yang menjadi sasaran program penguatan LPAAUD. Namun memperoleh angka pasti berapa jumlah anak usia dini yang belum memperoleh pendidikan agama ternyata mengalami kesulitan. Upaya yang dapat dilakukan adalah perluasan pelayanan PAAUD di daerah-daerah terpencil, masyarakat marginal yang selama ini nyaris tak tersentuh pelayanan keagamaan. Bila saja masjid dijadikan pusat PAAUD, maka pengembangan kelembagaan PAAUD ke depan pada hakekatnya upaya perluasan peran masjid sebagai lembaga pendidikan agama. Hal itu sudah dilakukan bagaimana mengembangkannya agar mampu menjangkau komunitas yang terabaikan.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Penguatan kelembagaan juga apakah harus sudah ada kejelasan antara RA/BA/TKI dengan TKA/TKQ dst. Karena semuanya hasil swadaya masyarakat, sehingga masyarakatlah yang paling mengetahui mengapa munculnya wajah ganda, dsb.

‡ • ‡ • — Š ƒ • † ƒ • ’ ‡ • ‹ • ‰ • ƒ – ƒ • • — ƒ Ž ‹ – ƒ • — ” –
† ƒ • ‡ • ‰ ‡ Ž ‘ Ž ƒ ä

Untuk memenuhi kebutuhan guru perlu kebijakan pemerintah/pemda untuk rekrutment Guru pendidikan agama PAAUD, atau mengangkatnya sebagai penyuluh agama dengan honor pemerintah. Masyarakat telah berbuat banyak dalam memberikan pelayanan. Sebaliknya pemerintah seyogyanya menyautinya dengan sejumlah kebijakan yang mendorong dan mendukung inisiatif masyarakat, khususunya bantuan guru serta menyelenggarakan pelatihan yang inovatif.

Banyak alumni pesantren dan perguruan agama selama ini mengajar di LPAAUD. Pemerintah dan Pemda sangat memungkinkan merekrut mereka, serta memberikan berbagai pelatihan untuk guru dan pengelola melalui jaringan LPTK, BKPRM ataupun lembaga PAAUD yang berhasil sebagai pembina. Dengan ketersediaan guru berkualitas tentunya pengembangan kualitas PAAUD akan semakin meningkat. Jangan lagi ada perlakukan diskriminatif pemda yang sangat merugikan PAAUD.

PERPUSTAKAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN AGAMA RI

‡ • ‰ ‡ • „ ƒ • ‰ ƒ • — ” ‹ • — Ž — •

Kurikulum LPAAUD sekarang ini semakin padat, tidak hanya membaca dan menulis Al-Qur'an tetapi sudah terjadi penambahan yang cukup signifikan. LPAAUD tak ubahnya seperti Madrasah Diniyah yang mengajarkan baca-tulis al-Qur'an, praktik dshalat, do'a-do'a sehari-hari, akhlakul karimah, hafalan surat-surat pendek, khat, ditambah lagi muatan lokal (bahasa Arab, Inggris, kreatifitas seni, olah

raga dan bela diri. Perlu dirumuskan ulang, apakah LPAAUD memerlukan kurikulum yang demikian padat, ataukah lebih focus kepada kemampuan baca-tulis al-Qur'an dan beberapa materi sebagai pengamalan al-Qur'an. Untuk RA/BA sebagai pendidikan formal memiliki panduan tersendiri, meskipun secara kurikuler sebenarnya TKA/TKQ atau berstatus ganda?

Ataukah akan tetap LPAAUD merupakan jalur sosialisasi nilai-nilai Keislaman yang tidak terbatas pada baca tulis al-Qur'an tetapi juga semua yang terkait dengan kebutuhan keagamaan seperti kecensderungan sekarang, bahkan dengan tambahan muatan local. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi formalisasi pendidikan anak usia dini yang bermuara kepada rumusan kompetensi yang harus dicapai yang lebih terukur.

‡ • „ ‹ ƒ › ƒ ƒ •

Pembiayaan selama lebih bertumpu pada kemampuan masyarakat seperti melalui SPP, uang pendaftaran, donatur, pengurus yayasan, dsb. Kedepan seharusnya peran pemerintah dan pemda seyogyanya menjadi sumber pembiayaan melalui APBD. Bila MTQ selalu masuk dalam APBD melalui LPTQ, maka melalui LPTQ dapat diupayakan agar LPAAUD adalah bagian dari kegiatan LPTQ. Pada sisi lain LPAAUD sebagai bagian dari kegiatan masjid maka sebagian keuangan masjid dapat membiayai operasional LPAAUD.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

f ”f • f †f • f • ‹ Ž ‹ – f •

Sarana dan fasilitas LPAAUD umumnya memanfaatkan sarana masjid. Sebagian menggunakan emperan masjid, yang lain menggunakan ruangan tempat shalat, atau membangun beberapa lokal di lingkungan masjid. Tapi secara umum sarana dan fasilitas yang ada masih memerlukan peningkatan. Pertanyaannya darimana mereka memperoleh dana pembangunan sarana tsb. Mungkin kemampuan masyarakat terbatas, maka pemerintah sebaiknya membantu pengadaan sarana dan fasilitas tsb. Apalagi di daerah-daerah pemukiman kumuh, miskin, tempat komunitas muslim berdomisili sangat mengharapkan bantuan pemerintah.

Bila kita menargetkan peningkatan akses dan pemerataan pendidikan agama anak usia dini, maka pengadaan sarana menjadi penting dan strategis untuk diprioritaskan. Seperti mushala, ruangan belajar di rumah guru, dsb. Merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan, namun perlu peningkatan melalui standarisasi sarana yang mendukung kelayakan sebuah lembaga pendidikan, meskipun tidak seperti yang diminta oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

‡ • ‹ • ‰ • f – f • ‡ ”f • ‹ † f • ‰ ‡ • • ‹ ‡ • f ’ ‘ • – ” ‡ •

Untuk mengawal program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan Pendidikan agama, khususnya pendidikan Al-Qur'an, Kanwil dan Kandepag harus respontif dan proaktif (menjemput bola). Intansi Departemen Agama perlu memerankan diri sebagai lembaga supervisi,

pendamping dan advokasi bagi kelangsungan PAAUD. Lembaga ini merupakan pusat layanan, pelatihan, supervise maupun bantuan-bantuan alat-alat pendidikan. Lembaga ini sebaiknya melibatkan unsur LPTQ, pemda, peguruan tinggi (PTAI), penyelenggara, MUI, ormas Islam, pengurus masjid dan tokoh masyarakat. Adanya perda tentang kemampuan baca tulis al-Qur'an atau tamat TKA/TKQ bagi anak yang akan masuk pendidikan dasar, cukup menarik sebagai bahan kajian kita kedepan, sejauhmana efektifitasnya.

***

LPAAUD baik formal maupun non formal secara kuantitatif "berkembang pesat" baik pada tingkat lokal maupun nasional. Namun perkembangan tersebut apakah sudah melayani semua anak usia dini. Perkiraan angka anak yang telah memperoleh pendidikan al-Qur'an "cukup baik". Namun angka anak yang belum memperoleh masih banyak. Mereka menjadi sasaran pogram "pendidikan al-Qur'an untuk semua anak" Untuk itu setiap daerah baik oleh Kantor Wilayah maupun Kantor Departemen Agama bekerjasama dengan masyarakat sebaiknya melakukan pendataan ulang, berapa banyak anak usia dini yang belum menerima pelayanan pendidikan agama. Mereka sebaiknya dijadikan target group/sasaran program pengembangan LPAAUD.

Untuk mengatasi kenyataan tersebut perlu penguatan, perluasan dan pengembangan LPAAUD dengan tetap mempertahankan keragaman dengan melibatkan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Pemerintah (Depag dan Pemda) dan memberdayakan masyarakat. Masyarakat semakin mengharapkan peran Departemen Agama/Pemda baik untuk pembinaan/ supervisi, bantuan sarana maupun dana pendidikan. LPTQ perlu dioptimalkan perannya bukan terbatas pada ceremonial MTQ, tapi juga masuk wilayah pendidikan kader-kader MTQ.

Aspek yang harus dibenahi adalah; rekrutmen tenaga guru, pelatihan guru dan kepala LPAAUD, bantuan sarana dan dana operasional serta jaringan dan kerjasama. Penguatan kelembagaan memberikan peluang adanya diversifikasi LPAAUD yang ada namun dengan target capaian yang lebih terukur. Bantuan sarana fasilitas, khususnya untuk kesejahteraan guru kemungkinan melalui anggaran Depag, melalui jabatan penyuluh agama Islam.

Telah terjadi pergeseran model pembelajaran PAAUD dari bentuk non formal ke arah formal sesuai dengan perubahan kultur masyarakat. Namun relitas menunjukkan proses penguatan bentuk formal LPAAUD menjadi TKA/TPA. Meskipun demikian terdapat keragaman (diversifikasi) model-model LPQ mulai dari bentuk metode pengajarannya, kurikulum, sistem penyelenggaraannya, sarana fasilitas sampai kualitas guru dan imbalan yang diterima. Realitas tersebut merupakan cerminan keragaman sosial dan kultural maasyarakat []

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

7 Belajar Pendidikan Islam Alternatif Pada SD Plus Islamic Center Manado

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Belajar Pendidikan Islam Alternatif Pada SD Plus Islamic Center Manado[1]

Di saat sekolah konvensional tak lagi mencetak manusia mulia seutuhnya (dihadapan manusia dan Tuhannya), hadirnya lembaga pendidikan Islam alternatif yang menawarkan berbagai keunggulan yang kompetitif merupakan harapan dan cita-cita umat Islam.

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat *long life education* atau dalam terminologi Islamya adalah *min al-mahdi ila al-lahdi*. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dalam arti menguasai Iptek dan mampu

1 Tulisan ini pernah dimuat pada jurnal Edukasi Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2013.

bersaing, berbudi pekerti luhur serta memiliki akhlak mulia.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan dari pendidikan nasional diharapkan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, cerdas intelektual, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin dan bermoral tinggi, toleran dan demokratis.

Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan semestinya dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Pendidikan yang menghasilkan *output* yang baik dan mampu bersaing dengan kebutuhan zaman merupakan harapan semua masyarakat, karenanya lembaga pendidikan mau tidak mau harus memiliki nilai daya saing. Kompetisi dunia pendidikan tidak bisa terelakan, hal ini menuntut adanya perbaikan mutu. Keberadaan pendidikan pada dasarnya akan tetap bertahan dan diminati oleh masyarakat apabila pendidikan tersebut dapat memenuhi eskpektasi dan dambaan masyarakat sebagai pengguna pendidikan

Di Indonesia dikenal berbagai bentuk dan jenis pendidikan Islam, seperti Pondok Pesantren, Madrasah, Sekolah Umum bercirikan Islam, sebagaimana juga dikatakan Karel Steenbrink bahwa keberadaan pendidikan Islam di Indonesia cukup variatif. Ia mengkategorikan pendidikan tersebut dalam tiga jenis, yaitu pendidikan Islam yang berbasis pada pondok pesentren, madrasah dan sekolah. Variasi lembaga pendidikan Islam tersebut menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat muslim. Sebagian besar masyarakat muslim banyak memilih jalur pendidikan pesantren dan madrasah, sedangkan sebagian ada pula yang memilih lembaga pendidikan sekolah Islam (selain lingkup kemenag).

Seiring dengan perubahan yang terjadi, lembaga pendidikan Islam terus melakukan perubahan dalam berbagai bidang, hal ini sebagai upaya menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang mengitarinya. Tantangan bagi lembaga pendidikan Islam semakin komplek yaitu tidak hanya sekedar mentransmisikan ilmu-ilmu kepada siswa, tetapi tidak kurang pentingnya mengembangkan pendidikan Islam yang lebih berkualitas bagi anak-anak bangsa sehingga memiliki keunggulan kompetitif di era globalisasi kini dan mendatang.[2]

Hadirnya lembaga pendidikan Islam yang menjadi harapan masyarakat muslim merupakan sebuah

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

2 Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosia-Historis*, dalam kata Pengantar Buku Jajat Burhanuddin dkk. 2006. *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 1

kemestian. Di beberapa kota di Indonesia telah muncul fenomema baru dalam dunia pendidikan Islam yang menjadi alternatif/pilihan masyarakat muslim, yakni dengan berdirinya sekolah Islam Unggulan seperti Al-Azhar, Al-Izhar, Muthahari, MAN Insan Cendekia dan beberapa Sekolah Islam Terpadu. Sekolah ini tumbuh sejalan dengan terbentuknya masyarakat Muslim Kelas menengah perkotaan. Di Kota Manado Sulawesi Utara, trend sekolah Islam ini bisa di lihat antara lain dengan berdirinya Lembaga pendidikan SD Plus Islamic Center yang didirikan Yayasan Karya Islamiyah. Sekolah ini karena lembaga pendidikan ini memiliki kekhususan dan keunggulan tersendiri, baik dari kelembagaan, visi dan misi, manajemen, sarana dan prasarana yang dibangun serta lingkungan budaya sekolah yang lebih Islami. Berbeda dengan sekolah publik yang ada umumnya lebih bernuansa budaya Kristen, karena memang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen. Dalam tulisan ini difokuskan tentang bagaimana latar belakang munculnya pendidikan agama Islam alternatif, bagaimana strategi yang dikembangkan dalam upaya meningkatkan pendidikan agama, serta bagaimana model penyelenggaraan pendidikan Islam altenatif yang diharapkan di masa yang akan datang.

PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Pendidikan Agama Islam Alternatif

Saat ini telah berkembang di masyarakat jenis atau bentuk pendidikan yang memiliki nilai keunggulan-keunggulan baik dari segi manajemen, metode pembelajaran, kurikulum dan pendekatan lainnya yang

memilki nilai kompetitif. Istilah jenis dan atau bentuk pendidikan ini, ada yang menyebut *sekolah plus, sekolah unggulan, sekolah alternatif,* dan sejenisnya. Terminologi ini berkembang dan dikembangkan pada awal dekade 1990-an dengan semakin banyaknya bermunculan sekolah-sekolah unggul di berbagai daerah. Munculnya pendidikan alternatif dapat disebabkan faktor kultural, sosial maupun keagamaan. Terminologi lain yang lazim digunakan untuk penyebutan unggulan adalah sekolah plus, seperti Sekolah Muthahari Bandung, al-Azhar, Al-Izhar, Sekolah Taruna Nusantara, dan lain-lain.

Istilah pendidikan alternatif sendiri merupakan istilah generik dari berbagai program pendidikan yang dilakukan dengan cara berbeda dengan cara konvensional/ tradisional. Secara umum pendidikan alternatif memiliki persamaan; pendekatan bersifat individual, memberi perhatian basar kepada peserta didik, orangtua/keluarga, pendidik dan dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman. Yusuf Hadi Miarso[3] menyebutkan bahwa pendidikan alternatif adalah istilah dari berbagai program pendidikan yang dilakukan dengan cara berbeda dari cara tradisional. Tipologi pendidikan alternatif dapat mengembangkan paradigma baru yang dianggap dapat dijadikan jalan keluar sebagai lawan dari tipologi belajar konvensional. Pendidikan alternatif membangun pembelajaran yang faktual, konseptual, dan konstektual.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

3 Yusuf Hadi Miarso. 1999. *Pendidikan Alternatif Sebuah Agenda Reformasi*. Jakarta: Jurusan Teknologi Pendidikan UNJ, h. 1

Sebagaiamna yang dijelaskan oleh Johar, pendidikan alternatif adalah Pendidikan yang berorientasi kepada proses pendidikan yang mengembangkan kompetensi: 1) metodologi, 2) konseptualisasi, 3) pemahaman konsep, 4) aplikasi, dan 5) nilai (value).[4]

Bentuk-bentuk pendidikan alternatif, menurut Jery Mintz yang dikutip oleh Miarso[5], Pendidikan alternatif dapat dikategorikan dalam empat bentuk pengorganisasian, yaitu: **a) Sekolah Publik Pilihan** (*public choice);* contoh: SMP Terbuka, SMU Terbuka, Universitas Terbuka. **Sekolah/Lembaga, b) Pendidikan Publik** untuk Siswa Bermasalah (*student at risk*), contoh: tinggal kelas karena lambat belajar, nakal, korban penyalahgunaan narkoba, dll, c) **Sekolah/Lembaga Pendidikan Swasta** *(independent)*; contoh program pendidikan bercirikan agama seperti pesantren & sekolah Minggu, pendidikan usia dini seperti penitipan anak, kelompok bermain dll, dan d) pendidikan di rumah (*home schooling).*

Pemerintah memberi peluang kepada masyarakat untuk melembagakan pendidikan dengan kriterium yang mereka ciptakan, namun tetap berada dalam garis kebijakan nasional pendidikan. Oleh Karena itu pendidikan alternatif merupakan pendidikan yang diorganisasikan secara khas versi penyelenggara melalui pola pendidikan yang kurikulumnya bersifat desentralistik, dimana anak

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

4 Johar. 2008. *Kurikulum yang mencerdaskan. Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif* . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, h. 149

5 Yusuf Hadi Miarso, *Loc. Cit.*

didik dapat memilih materi pembelajaran sesuai dengan minatnya, atau materi yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan anak didik, biayanya murah, sederhana, luwes dan menempatkan anak sebagai subjek.[6]

Penggunaan istilah plus, alternatif atau unggulan memiliki makna tersendiri yaitu secara operasional dalam penyelenggaraan pendidikannya memiliki nilai plus/ tambah atau keunggulan tertentu yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah sekolah lain. Keunggulan tersebut boleh jadi terwujud pada kurikulum pendidikan, visi pendidikan, dan lain-lain. Dapat dipastikkan bahwa salah satu nilai plus Sekolah Islam Unggulan adalah kurikulum pendidikan agama yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya.

Konsep Pendidikan agama dapat difahami sebagai "lembaga" yang menyelenggarakan pendidikan agama plus, tetapi juga dapat difahami sebagai bobot mata pelajaran pendidikan agama Islam yang didisain sesuai dengan visi dan misi lembaga masyarakat pendukungnya. Pengertian Pendidikan agama menurut Peraturan pemerintah No. 55 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun 2007 Pasal 1 adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

6 Bunga Rampai kajian Pendidikan Nasional. 1998. *Pendidikan Alternatif sebagai proses pemanusiaan*. Jakarta: Depdiknas, h. 142

pendidikan.[7]

Dengan demikian pendidikan agama dapat dimaknai bahwa pendidikan agama diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pendidikan agama dapat dipahami; *pertama*, sebagai proses (tanggung jawab keluarga, sekolah dan masyarakat; UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat (1). *Kedua*, sebagai lembaga/satuan pendidikan yang menempatkan pendidikan agama sebagai dasar visi dan misinya *(education for religion). Ketiga*, sebagai mata pelajaran dari kurikulum yang diajarkan pada jenjang/satuan pendidikan *(subject matter).*

Dengan demikian yang dimaksud dengan pendidikan agama alternatif dalam tulisan ini adalah pilihan-pilihan layanan pendidikan agama pada sekolah umum berciri khas Islam yang ada dalam masyarakat dengan sistem pendidikan Islam yang integratif, terpadu dan berkesinambungan. Pendidikan agama alternatif juga dimaknai sebagai lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan dalam penanaman nilai-nilai dan ajaran agama sebagai respon terhadap sistem pendidikan agama yang ada karena dianggap belum memenuhi harapan mereka. Pendidikan unggulan merupakan istilah yang

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

7 Peraturan pemerintah No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

muncul dalam dunia pendidikan.

Merespon Kegelisahan Umat

SD Plus Islamic Center terletak di tengah-tengah Kota Manado, di sekitarnya terdapat beberapa perkantoran pemerintah daerah maupun swasta, SD ini juga berada di lingkungan Masjid Agung Manado yang menjadi kebanggaan dan pusat kegiatan keagamaan umat Islam Manado. Dengan demikian posisi SD Plus Islamic Centre ini sangatlah strategis dan menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, tidak jauh dari sekolah ini terdapat pula sekolah-sekolah favorit dan unggulan seperti Don Bosco, Santa Ursula, Yayasan Kajian Pengembangan Masyarakat (YKPM) yang dimiliki agama Nasrani, dengan demikian *atmosfir* kompetisi dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan sangat nampak dan menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga.

SD Plus *Islamic Centre* didirikan oleh beberapa tokoh muslim Manado seperti Drs. H. Abdullah Mokoginta (mantan Gubernur Sulawesi Utara), Muhammad Arsyad Daud SH, Drs. H. Djainuddin Ahmad (Mantan Kepala Kanwil Depag Propinsi Sulawesi Utara), Abdul Kadir Bajeber, SH , Udin T. Lanco dan tokoh-tokoh lainnya. Diantara beberapa hal yang melatari berdirinya SD Plus Islamic Centre dapat dikategorikan pada dua aspek, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya *pertama* ; Sekolah Islam yang menjadi andalan dan pilihan di Kota Manado belum menjadi pilihan bagi kaum kalangan umat Islam, walaupun terdapat lembaga pendidikan

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Islam (sebut saja SD Yapim, SD Muhammadiyah dan SD Al-Khairat) masih belum mampu menarik perhatian dan menjadi pilihan masyarakat muslimin di Kota Manado pada umumnya, *Kedua,* masyarakat muslim sendiri ada sebagian anaknya di sekolahkan di sekolah-sekolah non muslim favorit. Akibatnya banyak diantara mereka tidak mendapatkan pelajaran agama Islam bahkan lingkungan yang Islami, kekhawatiran ini cukup menjadi perhatian masyarakat muslim. *Ketiga*, adanya kebutuhan/kesadaran masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang tidak hanya mendapatkan pengetahuan umum tetapi juga mendapatkan pendidikan agama yang langsung di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, faktor eksternal; *pertama*, lahirnya Undang Undang no. 23 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang secara tidak langsung membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya adalah kurang menguntungkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap kaum minoritas baik secara politik maupun agama. *kedua*, lahirnya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang munculkan pro dan kontra saat disahkan di DPR RI. *Ketiga*, munculnya pemahaman-pemahamaan di luar Islam/agama lain yang merasuki umat Islam di kota Manado.

Keinginan membentuk lembaga pendidikan Islam yang bermutu, sudah menjadi dambaan masyarakat muslim Manado, keinginan ini telah dirintis sejak tahun ajaran 2000/2001 yaitu adanya keinginan membentuk suatu lembaga Sekolah (terutama SD) yang dapat diandalkan

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

dan menjadi pilihan umat Islam, selain itu lembaga ini nantinya diharapkan dapat menyiapkan generasi umat Islam yang lebih baik. Keinginan tersebut semakin kuat tatkala akan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana saat lahirnya tersebut terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat saat disahkan. Suasana pro kontra secara tidak langsung membawa efek kurang menguntungkan di daerah-daerah, apalagi secara kuantitas (secara politik, jumlah penganut maupun lainnya) jumlah umat Islam minoritas.

Usaha untuk merespon keinginan awal diatas, beberapa pengurus yayasan dan masyarakat Islam pada umumnya, tentang perlunya mendirikan lembaga pendidikan dasar yang berkualitas dan kompetitif. Tujuan lainnya adalah dalam rangka menghindari ketidakharmonisan secara horisontal dengan tetap memelihara lestarinya persatuan dan kesatuan bangsa terutama dalam memelihara mantapnya kerukunan hidup antar beragama.

PUSLITBANG
PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Melalui berbagai pertemuan pembahasan, baik secara formal maupun non formal di kalangan pengurus Yayasan maupun masyarakat muslim Manado. Akhirnya pada awal tahun ajaran 2004/2005, resmi dibuka lembaga SD Plus Islamic Center dengan Surat Keputusan Yayasan nomor 05/2004 tanggal 14-6-2004, dengan menampung siswa sebanyak 40 murid. Sementara itu keputusan pengurus Yayasan Karya Islamiah dengan No. : 06/2004, tanggal 17 Juni 2004. Untuk menjalankan organisasi lembaga SD ini telah diangkat beberapa personil yaitu : Dra. Rahmah Apiya

Agustiaty sebagai Kepala Sekolah, sedangkan sebagai Guru Kelas adalah Heny Nining Gani, S.Ag, Yuniaty Tadete, S.Pd.I, dan Fitri Muarif sebagai Tata Usaha Sekolah.

Sekolah Dasar Plus Islamic Centre memiliki visi : menjadikan sekolah Dasar yang handal dan bermutu tinggi. Untuk merealisasaikan visi tersebut tersusun beberapa misi antara lain; 1) meningkatkan profesional guru, dan karyawan dalam mengembang amanah di sekolah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 2) menjalin hubungan intensif yang saling menguntungkan dengan masyarakat, pemerintah, LSM, dan sekolah negeri/swasta lainnya, 3) mengikutsertakan orangtua dan masyarakat yang peduli pendidikan dalam sistem pengelolaan sekolah. Sementara motto sekolah ini adalah : SD Plus Islamic Center membina generasi muda yang berkualitas dan Islami menuju masa depan yang cemerlang.

Secara khusus tujuan pendidikan SD Plus Islamic Centre adalah menyelenggarakan pendidikan dasar Islami yang mampu membentuk karakter anak sehingga memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dengan kebutuhan zaman dan tuntutan anak dalam Islam. Untuk mewujudkan tujuan diatas, ada penerapan nilai-nilai yang harus dikembangkan, yaitu : a) *Rabbaniyah* : meluruskan niat dan menjaga keikhlasan amal; b) *Amanah* : menunaikan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab; c) *Ukhuwah* : menjalin kerjasama dalam persaudaraan secara efektif; d) *Khidmah* ; mengedepankan bantuan dan pelayanaan; dan e) *Dakwah* : menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Selain penerapan nilai-nilai yang dikembangkan, di SD Plus Islamic Center juga menerapkan Budaya yang dikembangkan dengan memakai Istilah 5 R, yaitu: a) Ringkas (R1) berarti simple, tidak banyak menggunakan tempat; b) Resik (R2) yakni bersih; c) Rapih (R3) yaitu baik – teratur – apik; d) Rajin (R4) yakni suka dan sungguh-sungguh bekerja/belajar; dan e) Rawat (R5) dimaknai pelihara – urus – jaga.

Keunggulan sistem pendidikan SD Plus Islamic Centre, diharapkan anak-anak mendapatkan pendidikan yang terpadu antara pendidikan umum dan agama yang antisipatif terhadap perkembangan zaman. Melindungi anak dari pengaruh pergaulan di luar sekolah. Karena pendidikan sistem *fullday* anak lebih lama di sekolah, lebih terarah dan terencana. Bagi pasangan suami istri yang bekerja tidak khawatir pentang pendidikan dan perkembangan kepribadian putra putrinya, karena dididik oleh tenaga kependidikan yang terlatih dan profesional. Perkembangan bakat dan minat dan kecerdasan anak dapat terpantau sejak dini dan sisi-sisi aktivitas anak di rumah dan sekolah terpantau melalui mekanisme kontrol guru.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Penggunaan istilah plus pada sekolah unggulan ini memiliki makna tersendiri yaitu secara operasional dalam penyelenggaraan pendidikannya memiliki nilai plus/ tambah atau keunggulan tertentu yang mungkin tidak dimilki oleh sekolah sekolah lain. Keunggulan tersebut boleh jadi terwujud pada kurikulum pendidikannya, visi pendidikannya, dan lain-lain. Dapat dipastikkan bahwa

salah satu nilai plus Sekolah Islam Unggulan adalah kurikulum pendidikan agamanya yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya.

Dari segi sosial ekonomi orang tua siswa, mereka ini tergolong kelas menengah, sebagian besar adalah para pegawai negeri maupun swasta yang bekerja di lingkungan sekitar kota Manado. Sebagian lagi siswa adalah pindahan dari daerah lain, karena anak-anak mereka mengikuti orangtuanya bekerja di Manado, sehingga orangtua menginginkan sekolah ke lembaga pendidikan yang ada nilai plusnya. Dari banyaknyanya siswa yang pindahan ini, sekolah ini seringkali mendapat label *sekolah transit*. Salah satu yang menjadi alasan mengapa pihak sekolah menerima mereka, karena faktor orangtua menginginkan sekolah yang ada nilai plusnya terutama dalam pendidikan agama. Sebagian besar orang tua berharap anak-anaknya ingin mendapatkan pendidikan agama dan sekaligus mendapatkan pendidikan umum.

Menurut Kepala Sekolah, model pendidikan tradisional dalam bentuk madrasah dan pesantren sudah banyak yang menggarap. Sementara itu, di perkotaan besar seperti Manado, semakin banyak muslim yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah favorit, yang umumnya dimiliki kelompok non-muslim. Atas dasar itulah konsep sekolah Islam modern lahir, dalam kerangka itulah sekolah SD Islamic Centre didirikan.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Penawaran Kurikulum Integratif

Untuk menjamin pencapaian keunggulan itu, SD Plus memadukan kurikulum Diknas dan Kurikulum Yayasan. Penerapan nilai-nilai Keislaman dalam kehidupan sehari-hari dikemas sedemikian rupa sehingga siswa-siswa tidak merasa jenuh. Siswa-siswa memulai pelajarannya dengan membaca *muraja'ah* dan kemudian do'a yang dibimbing masing-masing guru kelas. Demikian juga dengan praktik shalat dan pembiasaan shalat dhuha setiap hari, shalat Dhuhur dan Jum'at secara berjamaah.

Kurikulum SD Plus Islamic Center yang dikembangkan adalah kurikulum secara integral[8], yaitu antara pelajaran

8 Pendidikan *integralistik,* merupakan model pendidikan yang diorientasikan pada komponen-komponen kehidupan yang meliputi: Pendidikan yang berorientasi pada *Rabbaniyah* [Ketuhanan], *insaniyah* [kemanusiaan] dan *alamiyah* [alam pada umumnya], sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang baik dan untuk mewujudkan *rahmatan li al-'alamin,* serta pendidikan yang menggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individual-sosial. Pendidikan integralistik diharapkan dapat menghasilkan manusia [peserta didik] yang memiliki integritas tinggi, yang dapat bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, menyatu dengan dirinya sendiri sehingga tidak memiliki kepribadian belah atau kepribadian mendua, menyatu dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan disintegrasi sosial, dan dapat menyatu dengan alam sehingga tidak membuat kerusakan, tetapi menjaga, memlihara dan memberdayakan serta mengoptimalkan potensi alam sesuai kebutuhan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari konsep Ketuhanan [*Teosentris*], artinya pendidikan Islam harus berkembang dan dikembangkan berdasarkan teologi tersebut. Konsep kemanusiaan, artinya dengan konsep ini dapat dikembangnya antropologi dan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

agama maupun umum, dimana kurikulum ini didesain pada setiap guru harus mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Tujuan ini agar setiap anak didik memiliki pemahaman yang lengkap dan shahih dalam setiap pelajaran yang diterima, maka nilai afeksi Islam mewarnai pada proses Kegiatan (K) Belajar (B) Mengajar (M) di semua mata pelajaran yang diberikan pada siswa[9]. Dari hasil pengamatan menunjukan bahwa implementasi dari konsep integrasi antara iman, ilmu dan amal terlihat nampak suasana Islam dalam kehidupan siswa dan guru di lingkungan sekolah mulai masuk hingga keluar sekolah.

Pada bidang studi atau mata pelajaran umum, nilai-nilai agama Islam dimasukkan dalam aktifitas pembejaran di kelas, sehingga penanaman konsep dapat diterima anak sejernih dan sejelas mungkin, serta dapat mencerna pula nilai-nilai Islami yang ditampilkan guru, baik dalam bentuk konsep, nilai maupun perbuatan. Demikian pula dalam bidang studi agama, pembelajaran dikelas dengan memasukkan nilai nyata sehari-hari yang lebih dipahami oleh siswa sehingga dapat menerimanya secara nyata dan utuh. Integrasi ini diharapkan terciptanya guru umum yang agamis dan guru agama yang sains.

PUSLITBANG PENDIDIKAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

sosiologi pendidikan Islam, dan konsep alam dapat dikembangkannya konsep pendidikan *kosmologi* dan ketiga konsep ini harus dikembangkan seimbang dan integratif. Lihat lebih lengkap dapat dilihat Fadjar, A. Malik., 1999, *Reformasi Pendidikan Islam,* Jakarta: Fajar Dunia

9 Wawancara dengan Dra. Rahma Afiya Agustiyati, *Kepala Sekolah SD Plus Islamic Centre*

Pada prakteknya kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas baik meteri pendidikan agama dan pendidikan umum adalah dengan menekankan pada : a) Menampilkan Tuhan sebagai sumber segala keilmuan, b) Islamisasi materi, c) Memberi syarah hadits, sirah, dan kisah baik di pembukaan, inti ataupun penutup, d) Tidak memisahkan makhluk dan khaliknya, e) Menampakan perilaku sopan santun dalam perkataan dan perbuatan.[10]

Bersamaan dengan itu, SD ini juga menawarkan keunggulan tertentu kepada masyarakat, yakni mendidik siswa berakhlakul karimah dan berprestasi akademik secara maksimal. Dari sini, SD Plus tampil dengan sejumlah konsep unggulan seperti jaminan mutu yang dirumuskan dalam dalam beberapa point berikut: *Pertama*, siswa dapat membaca al-Qur'an dengan baik, *kedua* siswa dapat mengahafal Juz 'Amma dan Al-Qur'an. Keunggulan *kedua* ini menjadi modal untuk berdakwah, seperti siswa dapat menjadi imam shalat di Masjid dan lain-lain. *Ketiga* siswa dapat menguasai bahasa arab dan Inggris, *keempat* dapat menguasai do'a sehari-hari dan amalan Islami lainnya.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Kurikulum selain Pendidikan Agama Islam (PAI), diterapkan juga beberapa pelajaran/materi yang bernuansa agama Islam seperti: Bahasa Arab, Kaligrafi, Baca Iqra, Tahfidz, Do'a sehari-hari, Praktek Ibadah. Pelajaran Bahasa Arab diberikan dari kelas I sampai Kelas IV, Untuk Baca Iqro diberikan di kelas I dan II sedangkan kelas III sampai kelas VI membaca al-Qur'an.

10 Buku Panduan Sekolah Dasar Plus Islamic Centre Manado, h. 7

Dari kurikulum pendidikan agama yang dikembangkan di atas, diharapkan melahirkan output kompetensi lulusan SD Plus Islamic Center Manado: a) Shalat tanpa disuruh; b) Berpakaian secara Islami dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah; c) Sopan santun dalam bertutur kata dan bersikap : 1) Salam bila bertemu sesama Islam, 2) Menebar senyum terhadap orang lain, 3) Meminta izin bila ada keperluan; d) Tilawah al-Qur'an setiap hari tanpa disuruh; e) Pemikir kritis dan pemecah permasalahan; f) Belajar sepanjang hayat: 1) Belajar mandiri tanpa disuruh, 2) Memiliki ketrampilan belajar, 3) Belajar tanpa batas waktu, 4) Siap masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.; g) Pekerja kelompok : 1) Menerima perbedaan, 2) Terlibat aktif dalam kelompok, 3) Menghargai keputusan kelompok; h) Komunikator: 1) Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, 2) Berkomunikasi dalam bahasa Inggeris/ Arab lisan dan tulisan dalam kalimat sederhana dalam kenteks keseharian; i) Berpola hidup yang sehat dengan berkebiasaan baik dalam kebersihan, makan, tidur, puasa, olahraga; j) Peduli lingkungan; alam, sosial dan budaya; k) Penikmat dan menghargai karya seni Islami

SEKRETARIAT BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Rekruitmen Pimpinan, Pendidik dan Peserta Didik

Sebagai sekolah Plus yang memiliki nilai plus/tambah atau keunggulan tertentu yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain, seperti dalam hal kurikulum pendidikan, sarana prasarana, visi dan misi. Sekolah juga menawarkan sejumlah nilai keunggulan dalam hal sistem

rekruitmen pimpinan, tenaga pendidik, dan peserta didik. Sistem rekruitmen ini dilakukan secara selektif.

Sistem rekruitmen pimpinan dan tenaga pendidik dilakukan penilaian oleh yayasan yang selanjutnya diputuskan melalui surat keputusan Yayasan. Diantara kualifikasi pimpinan/kepala sekolah secara umum adalah lulusan sarjana pendidikan S1, memiliki jiwa leadership, memiliki integritas moral yang tinggi, mampu menjalankan roda lembaga. Sedangkan secara khusus harus mendapatkan pertimbangan dari pihak yayasan, memiliki visi dalam meningkatkan sekolah dan siap bekerja *fullday*.

Sedangkan Sistem rekruitmen pendidik dilakukan seleksi ketat mulai dari administarasi, wawancara, psikotest dan *microteaching*. Adapun kriteria kualifikasinya sebagai berikut: a) memiliki pengalaman mengajar, b) Sarjana S1 dalam bidang pendidikan, c) dapat membaca al-Qur'an, dapat berbicara bahasa Inggris dan Arab (minimal pasif), d) memakai busana muslimah (bagi guru Wanita). Sementara itu, dalam hal rekruitmen siswa juga dilakukan secara selektif, diantara persyaratan bagi siswa yang masuk SD Plus Islamic Center dilakukan melalu tes, baik secara lisan maupun tertulis; bagi siswa yang berasal dari TK Islamic Centre mendapatkan prioritas tersendiri, sedangkan di luar itu harus menjalani tes. Karena keterbatsan sarana dan jumlah SDM, pihak sekolah dari awal berdiri hanya menerima 2 lokal dengan rincian jumlah siswa 30 siswa per kelas pada awalnya. Diantara persyaratan masuk adalah : Persyaratan utama:

PENGEMBANGAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Beragama Islam, atas kemauan sendiri yang ditunjang dengan kemauan orang tua, memilki Ijazah/STTB dari Taman Kanak-Kanak, berkemauan melaksanakan tata tertib. Sementara persyaratan lainya adalah: berumur 6 – 8 tahun, dapat membaca huruf al-Qur'an, sekurang-kurangnyaa berkemauan untuk tahu membaca huruf al-Qur'an, lulus testing saringan penerimaan yang diadakan apabila siswa pelamar melebihi dari renecanaa penerimaan dan orangtua bersedia memenuhi beban biaya belajar yang ditentukan sekolah.

Pengembangan Inovasi Pembelajaran

Beberapa inovasi pengembanagan pembelajaran di SD Plus Islamic Center sebagaimana disebutkan dalam proses pembelajaran (KBM) dilakukan secara integral maka dalam proses KBM selalu memasukan ketiga aspek tersebut. Dalam prakteknya setiap kegiatan pembelajaran sebelum masuk kelas, siswa berkumpul berbaris untuk menghafal/*murajaah* Juz 'Amma dan al-Qur'an. Kemudian setiap mulai dan berkahir proses KBM juga selalu dilakukan membaca do'a, proses pembiasaan ini selalu ditekankan dalam setiap kegaiatan belajar mengajar.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Salah satu yang menjadi perhatian sekolah dalam mengembangkan keberhasilan pendidikan anak, selalu menekankan adanya komunikasi dengan orangtua terkait dengan perkembangan anak-didik baik secara langsung maupun tidak lansung seperti melalui Buku penghubung siswa.

Sekolah misalnya dalam mengembangkan pola komunikasi yang baik dalam memajukan keberhasilan siswa, sebagaimana para ahli menyebutkan ada tiga peran penting dalam keberhasilan pendidikan yaitu : keluarga, sekolah dan masyarakat. Tiga peran ini, satu sisi memang telah menyederhanakan, memudahkan pola pembahasan, pemantauan dan evaluasi pendidikan. Namun disisi lain dapat memungkinkan adanya sikap parsial terhadap tiga pusat pendidikan tersebut yaitu mempunyai persepsi, visi dan orientasi yang sama. Sekolah berusaha mendidik siswanya untuk gemar berdo'a dan beribadah, tetapi justeru keluarga tidak mencerminkan situasi yang seharunya. Akibatnya anak mengalami pada dua kondisi yang berbeda dan dapat mengarah kepada perkembangan jiwa yang tidak utuh.[11]

Didasari hal itu, SD Plus Islamic Center menerapkan program buku penghubung dan Informasi Guru dan Orang tua (IPOG) yang pemantau aktifitas pendidikan anak yang akan dilakukan guru dan orang tua melalui pengisisan buku kegiatan anak haria maupun mingguan. Dalam buku penghubung ini minimal tiga tujuan dari program IPG: *pertama*, memberikan informasi kepada guru dan orangtua mengenai sikap perilaku yang perlu ditanamkan kepada anaka, *kedua*: menjalin kerjasama anatar pihak sekolah dengan orangtua dalam hal memantau sikap dan

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

11 Wawancara dengan Dra. Rahma Afiya Agustiyati, *Kepala Sekolah SD Plus Islamic Centre*

perilaku anak didik sehari-hari, dan *ketiga,* memantau kemampuan anak didik dalam menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang baik dan islami sebag bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan yang dicanagkan oleh SD Plus ini.

Buku penghubung juga diharapkan dapat memudahkan kontrol dan komunikasi antar guru dan orang tua. Diantara komunikasi yang diterapkan itu melalui beberapa cara seperti : a) setiap menjelang pulang dari sekolah, guru memberi informasi kepada orang tua tentang kegiatan sisiwa selama di sekolah dan tugas yang harus di kerjakan, b) orangtua setiap hari bisa mengetahui kegiatan anak selama di sekolah dengan memeriksa buku penghubungnya. Tanda tangan orangtua telah memeriksa penghubung tersebut, c) setiap pagi saat masuk, semua siswa langsung mengumpulkan buku penghubung di atas meja guru dan guru dapat memerikas kembali tanggal atau informasi dari orang tua, d) setiap minggu orang tua juga menginformasikan ke sekolah tentang aktifitas anak selama di rumah dengan mengisi tabel aktifitas di rumah, yaitu dengan penliaian kata-kata : selalu, sering atau jarang.

PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Penguatan Jaringan Kelembagaan

Pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua, sekolah dan masyarakat. Orang tua sebagai pengguna hasil pendidikan memiliki tugas yang sama dalam mendidik anak. Hubungan para orangtua murid dengan pihak sekolah bersifat mutualistik dan bersama-

sama mewujudkan kerjasama yang produktif dan saling pengertian. Melalui Komite Sekolah, orang tua murid dapat memainkan peran dalam membantu melancarkan proses pendidikan, memberikan masukan, saran, tanggapan, gagasan dan melakukan evaluasi terhadap jalannya proses pendidikan. Komite sekolah merupakan bagian integral dari struktur lembaga pendidikan.

Untuk memperkuat kelembagaan dan memperluas pengembangan mutu pendidikan, SD Plus Islamic Center Manado terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam kontek pendidikan maupun non pendidikan. Dalam kontek pendidikan misalnya, selalu menjalin kerjasama dengan pihak Dinas pendidikan baik Kota maupun Propinsi, demikian juga dalam hal pendidikan agama tetap menjalin komunikasi dengan pihak Kementerian Agama kota maupun Propinsi. Dengan lembaga sekolah lain pun terus menjalin komunikasi baik dalam hal tukar menukar wawasan keilmuan dengan berbagi pengalaman yang tidak hanya dilakukan dengan lembaga milik Islam saja, tetapi juga dengan lembaga non muslim seperti dengan lembaga Kanisius, Santa Maria, De Borah dan lainnya. Dengan lembaga pendidikan Islam tak terkucuali terus menjalin komunikasi seperti SD Muhammadiayah, SD al-Khairat, SD Yapim dan di luar Manando seperti dengan melakukan kunjungan studi banding dengan Perguruan al-Azhar, Sekolah Terpadu dan sebagainya. Untuk mempromosikan lembaga ini selain dengan menjalin silaturrahmi secara berkala dengan orang tua siswa, juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat

LAPORAN HASIL PENELITIAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

luar dengan cara memberikan informasi kepada warga muslim yang bekerja di instansi pemerintahan maupun swasta.

Peluang dan Tantangan

Munculnya pendidikan Islam alternatif merupakan perubahan atas lembaga pendidikan yang berkembang selama ini, yaitu perubahan atas kegagalan yang dilakukan oleh sekolah umum dan lembaga pendidikan Islam dalam memadukan ilmu umum dan ilmu agama. Mereka tidak puas terhadap kurikulum pendidikan (model sekolah) yang dikembangkan oleh kementerian Pendidikan Nasional maupun model yang dikembangkan oleh Kementerian Agama seperti Madrasah.

Hadirnya model sekolah ini (plus, terpadu dan sejenisnya) dalam prakteknya berusaha melakukan pengembangan kurikulum dengan cara memadukan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional seperti mata pelajaran Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain, serta kurikulum pendidikan agama Islam yang ada di Kementerian Agama dan ditambah dengan kurikulum yang dikembangkan sekolah tersendiri (yayasan).

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi mendatang semakin meningkat. Kesadaran tersebut tidak hanya berkembang di kalangan masyarakat perkotaan lapisan menengah atas, tetapi sudah mulai hampir merata di kalangan masyarakat pedesaaan lapisan bawah. Kesadaran tersebut telah

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

menembus batas-batas sosial, kultural dan keagamaan baik di kalangan santri, priyayi maupun abangan sebagaimana istilah kategori Clifford Geerts dalam bukunya *The Religion of Java*.

Masyarakat menyadari bahwa tanpa bekal pendidikan yang memadai, anak-anak mereka akan kalah dalam persaingan memasuki lapangan kerja yang pada gilirannya secara sosial akan terpinggirkan. Secara kultural masyarakat muslim masih memandang kebutuhan akan pendidikan bukan terbatas penguasaan terhadap aspek intelektual dan ketrampilan lebih dari itu pendidikan harus menjadi tempat sosialisasi, penanaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan, moralitas dan nilai-nilai luhur budaya. Keimanan, ketakwaan dan moralitas harus mendasari penyelenggaraan, proses pembelajaran serta keluaran pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan definisi di atas, terdapat (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Munculnya lembaga pendidikan agama yang menjadi pilihan atau alternatif masyarakat Islam kota Manado yang paling utama adalah sebagai bentuk keprihatinan dari kalangan muslim tersendiri. Dari lembaga pendidikan muslim yang ada seperti Muhammadiyah dan al-Khairat, bila dibandingkan dengan sekolah negeri dan sekolah non muslim jauh ketinggalan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi masyarakat muslim Manado.

Hadirnya Sekolah Dasar Plus Islamic Center di Manado mendapatkan respon poisitif di Masyarakat, setidaknya dapat dilihat dalam beberapa hal diantaranya: *Pertama,* Tumbuhnya semangat di kalangan muslim menengah Manado mendapatkan pendidikan Islam yang berkualitas bagi anak-anak mereka. Keinginan mereka pada dasarnya adalah pendidikan umum Islam yang berkualitas tinggi, dimana peserta didik tidak hanya bergumul dengan ilmu-ilmu yang penting untuk kehidupan masa kini di dunia ini, tertapi juga ilmu-ilmu dan amal Islam. Atau sebaliknya, pendidikan berbasis agama seperti Madrasah dan pesantren namun unggul juga dalam ilmu-ilmu umum[12].

Kedua, adanya ekspektasi masyarakat muslim Manando untuk mendapatkan keilmuan secara integral yaitu

12 Jajat Burhanuddin, dkk., *loc. cit*

penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan Iman dan Takwa (IMTAK) dalam kurikulum pembelajaran mereka. Dengan kurikulum integraif tersebut para siswa dapat berkompetensi dengan sekolah umum maupun agama. Hal ini sebagai bentuk kritik terhadap sistem pendidikan pada umumnya yang hanya menitikberatkan pada penguasaan iptek tanpa dibarengi dengan landasan imtak, tetapi juga kritik terhadap lembaga madrasah yang lebih berorientasi kepada penguasaan imtak namun lemah dalam penguasaan iptek.

Ketiga, dalam rangka membangun image yang selama ini umat Islam belum mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menjadi pilihan umat Islam, yang kompetitif mengungguli sekolah-sekolah non muslim. Banyaknyanya sekolah favorit yang diselenggarakan lembaga non muslim, menjadi pilihan tersendiri bagi sebagian masyarakat muslim. Akibatnya sebagian muslim yang menyekolahkan anaknya ke lembaga non muslim lebih melihat pada kualitas pendidikan umum dan mengabaikan faktor agama, tidak sedikit anak-anak mereka mendapatkan pelajaran agama non muslim dan mengikuti kegiatan keagamaan. Dengan gambaran ini, munculnya sekolah Islam yang menjadi pilihan merupakan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pendidikan, bila penyelenggara pendidikan Islam dapat membuktikan dan menjawab akan kebutuhan masyarakat muslim maka dengan sendirinya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat muslim.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Bila dilihat pola pengembangan pendidikan yang dikembangkan SD Plus Islamic center dan sekolah Islam unggulan lainnya, seperti yang ditulis Azra ada semacam ”Santrinisasi”[13]. Pola santrinisasi itu terjadi melalui dua cara : *pertama* ; murid atau siswa dari sekolah-sekolah itu umunya telah mengalami “re –islamisasi”. Hal ini terjadi karena disamping mempelajari ilmu-ilmu umum, mereka mempelajari ilmu-ilmu Islam, mulai dari bagaimana membaca al-Qur’an, melaksanakan salat dengan tepat dan benar, hingga ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental. *Kedua*, murid atau siswa sekolah itu selanjutnya membawa Islam yang mereka pelajarai di sekolah ke rumah, dalam banyak kasus mereka bahkan mengajarkan kepada orangtua mereka yang acapkali hanya mengetahui sedikit tentang Islam, mislanya, tentang bagaimana caranya shalat, membaca al-Qur’an, bagaimana cara melaksanakan ibadah-ibadah Islam lainnya. Umumnya orangtua merasa malu akibat ketidaktahuan mereka mengenai ajaran dan praktik Islam tertentu. Akibatnya agar tidak mengecewakan sang anak mereka mulai mempelajari Islam, baik secara sendiri maupun dengan cara mengundang guru prifat untuk mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Hal ini juga seperti apa yang dialami beberapa orang tua.

Pilihan masyarakat untuk memperoleh sekolah unggul adalah dambaan akan masa depan anaknya,. Orang tua

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

13 Azyumardi Azra, 2000. *Penddikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, h. 80

menyekolahkan di sekolah Islam unggulan dan bermutu karena orang tua ingin memberikan prospek yang pasti bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga pendidikan lebih tinggi, dapat bersaing dengan sekolah-sekolah misionaris. Mereka ingin memeproleh pandangan dan pemahaman yang komprehensip tentang Islam. Banyak orangtua muslim yang mengetahui sedikit tentang Islam kini boleh merasa yakin bahwa anak mereka akan mendapatkan pengetahuan dan pemahanan yang lebih luas tentang ajaran Islam. Lebih dari itu anak-mereka diajarkan tentang bagaimana mempraktikkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka tidak hanya mempraktikkan kegiatan dengan dimulai membaca do'a, dan salat wajib lima waktu, tetapi juga diajarkan untuk memimpin shalat itu sendiri atau menjadi imam shalat. Selain itu orang tua merasa nyaman berada di lingkungan pendidikan Islam di bandingkan lembaga umum atau lebih-lebih di lembaga misionaris.

Otonomi Daerah membawa pengaruh tersendiri bagi perkembangan pendidikan Islam, apalagi secara geopolitik kota Manado penduduknya bukan mayoritas muslim, misalnya beberapa kebijakan Pemerintah Daerah dianggap kurang berpihak terhadap lembaga pendidikan minoritas. Perlakuan ini sangat dirasakan bagi Sekolah-Sekolah Islam (karena memang dibawah binaan Dinas Pendidikan), Pemda lebih mengutamakan lembaga –lembaga pendidikan yang dimiliki mayoritas bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang dimilki minoritas. Suasana demikian menjadi tantangan

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

tersendiri bagi sekolah-sekolah muslim.

Sekolah alternatif memang merupakan pilihan bagi masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan yang bermutu, tetapi kesempatan mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas bagi semua kalangan baik ekonomi lemah, menengah dan atas, belum semuanya terpenuhi. Karena sekolah unggul atau plus yang ada membutuhkan biaya yang besar, bagi mereka yang kaya saja dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke Sekolah Unggulan. Sedangkan yang golongan ekonomi ke bawah masih perlu adanya campur tangan pemerintah.

SD Plus Islamic Center merupakan salah satu kebanggan tersendiri dan menjadi alternatif atau pilihan pendidikan Islam bagi masyarakat muslim Manado, sekolah ini menjadi Sekolah Unggulan. Karena itu hadirnya lembaga pendidikan Islam ini, sebagaimana yang disebutkan Azra, tidak hanya berdampak pada perbaikan lembaga pendidikan Islam, tetapi juga pada pada proses santrinisasi masyarakat muslim. Pendidikan Islam alternatif secara umum menjadi tantangan dan sekaligus peluang untuk selalu menjaga mutu dan kualitas baik manajeman, tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan parasarana dan mampu bersaing secara kompetitif dalam mengahadapi globalisasi. Karena tanpa ini, lembaga pendidikan Islam akan dengan sendirinya ditinggalkan oleh masyarakat sebagai penggunanya.

***

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Hadirnya SD Plus Islamic Centre Manado memberikan pelayanan pendidikan agama kalangan muslim lapisan menengah; Mereka melihat sekolah atau madrasah yang ada belum sepenuhnya memenuhi harapan mereka. Penyelenggaraan pendidikan SD PIC dikelola secara "Islami" dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan modern (kurikulum, proses pembelajaran, sarana, budaya sekolah dan jaringan pendidikan yang dibangun. Hadirnya lembaga pendidikan Islam alternatif yang menawarkan berbagai keunggulan dan kompetitif merupakan harapan dan cita-cita umat Islam. Pilihan masyarakat muslim Manado yang menjadikan pendidikan Islam alternatif, karena didasari beberapa faktor yaitu: *pertama,* sebagai bentuk *guarantee* terhadap pembinaan ideologi/akidah sekaligus menawarkan pendidikan yang berkualitas. *Kedua:* mengembangkan kurikulum berbasis agama (IMTAK) dan dan umum (IPTEK) dengan mengintegrasikan Nilai-Nilai Keislaman dalam setiap proses setiap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), *ketiga* dapat berkompetisi dalam memasuki perkembangan dunia yang mengglobal.

PENELITIAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Untuk meningkatkan akses atau kesempatan medapatkan pendidikan agama yang universal, perlunya dipikirkan format sekolah agama alternatif bagi semua kalangan baik bagi masyarakat ekonomi lemah, menengah dan atas. Bagi Kementerian Agama perlu mendorong pengembangan mutu pendidikan ini melalui peningkatan kompetensi guru, inovasi pembelajaran, bantuan sarana belajar. Kedepan lembaga pendidikan/sekolah model yang dikembangkan lembaga ini akan semakin banyak sejalan

dengan semakin meningkatnya minat masyarakat akan lembaga pendidikan yang bermutu. Karenanya lembaga pendidikan terus melakukan perbaikan dalam hal mutu pendidikan, inovasi pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran. Sebagai bagian dari sitem pendidikan nasional, pendidikan model SD Plus Islamic Centre dan lembaga lainnya tetap memperhatikan tuntutan perlunya penanaman nilai-nilai kebangsaan, pluralitas dan toleransi serta budaya kecerdasan sebagai salah satu misi utama lembaga pendidikan []

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR PUSTAKA

A.E. Woolfolk. (1993): *Educational Psychology* . Needham Heights: Allyn & Bacon

A.W. Munawwir (1997): *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta, Pustaka Progresif, edisi kedua, cet. Ke-14

Abady, H.M. Yusrie dkk. (2002): *Pengembangan Wawasan Keagamaan melalui Majelis Taklim di Bandar Lampung*. Jakarta, Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI

Abdullah, Taufik (1987): *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor

Ainurrohmah, Leni. (2013): *Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogykarta.

Alawiyah, Tuty (1996): *Wanita dalam Nuansa Peradaban*. Jakarta, Yayasan Alawiyah,

Alawiyah, Tuty (1997): *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*. Bandung, Mizan

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Alawiyah, Tuty (2001): *Paradigma Baru Dakwah Islam: Memberdayakan Masyarakat melalui Pengembangan Sosial Kultural Mad'u*. Jakarta, IAIN Jakarta

Anshari, K. H. M Isa. (1979): *Mujahid Dakwah*. Bandung, CV. Diponegoro, cet. II.

Anwar, Rosehan, dkk. (2002): *Majelis Taklim dan Pembinaan Ummat.* Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI

Arifi, Zaenal. (2012): *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. Yogyakarta, DIVA Press.

Arikunto, Suharsim (1998): *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 12

Azra, Azyumardi (2002): *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru.* Jakarta, Logos.

Azra, Azyumardi (2000): *Penddikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu

Azra, Azyumardi (2005): *Wacana tenatng minoritas Muslim*, dalam Kata Pengantar Buku M Ali Kettani "*Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*,

Azra, Azyumardi dan Jamhari. (2006): "Pendidikan Islam Indonesia Dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Historis." dalam *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*, Ed. Jajat Burhanuddin dan Dina Afrianty. Jakarta, Raja Grafindo Persada

PUSLITBANG
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

B Milles, Mattew dan Michael A Haberman (1992): *Analisis data Kualitatif,* terj. Rohendi Rohidi. Jakarta, UI Press

Bafadal, Fadhal A.R. dan M. Syatibi. (2006): *Pergeseran Literatur Pondok Pesantren Salafiyah di Indonesia,* Jakarta, Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan

Bruenneissen, Martin Van (1999): *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat.* Bandung, Mizan

Buku Panduan Sekolah Dasar Plus Islamic Centre Manado Sulawesi Utara

Bunga Rampai kajian Pendidikan Nasional. (1998): *Pendidikan Alternatif sebagai proses pemanusiaan.* Jakarta: Depdiknas

Burhanuddin, Jajat (2006): *Mencetak Muslim Modern: Peta pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan – 1

Burhanuddin, Jajat dkk. (2006): *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia.* Jakarta, PT RajaGrafindo Press.

Chan, Sam M. dan T. Sam, Tuti T. (2005): *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Ciciek, Farha (1999): *Iktiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta, The Asia Foundation

Departemen Agama RI (1996): *Ensiklopedi Islam.* Jakarta, Departemen Agama RI

PUSLITBANG
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Dewan Redaksi (2001): *Ensiklopedi Islam.* Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Dewey, Jhon. (2004): *Experience and Education..* Jakarta, Teraju Mizan

Dhofier, Zamakhsyari (1982): *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai.* Jakarta, LP3ES

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama, (2001): *Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah*.

Fadjar, A. Malik.. (1999): *Reformasi Pendidikan Islam.* Jakarta, Fajar Dunia

Fata, Ahmad Choirul. *Anak Tiri itu Bernama Madrasah*, Republika, 13/2/20

Fatah, Munawir Abdul. (2011): *Tradisi Orang-Orang NU.* Yogyakarta, LKiS

Gus Dur, "Pesantren Sebagai Sub Kultur" dalam Dawam Raharjo (Editor). (1974): *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta, LP3ES

Handayani, T. P. (2010): *Kesejahteraan Psikologis Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.* Semarang, Jawa Tengah, Universitas Diponegoro.

Hasan, Husen Basri dkk. (2012): *Survei Pengajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren*. Jakarta, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Hasil Wawancara dengan Ibu Bariroh, *Pengasuh Pondok Fathul Khair*, 17 Oktober 2015

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Hasil Wawancara dengan Ibu Hj, Bariroh, , *Pengasuh Pondok Fathul Khair* , Tanggal 15 Oktober 2015

Hasil Wawancara dengan Khaerani, S.Sos.I, *Bendahara Pesantren fathul Khair*, 17 Oktober 2015

Hasil wawancara dengan Muh. Iqbal, Abdul Basith, Agus, *Para Ustadz Fathul Khair*, 30 Oktober 2015

Hasil Wawancara dengan Sabran, Haryadi, Amran, Erlian, Debbi, *Santri Dikterapan*, 1 Nopember 2015

Huda, Nurul, dkk. (1990): *Pedoman Majelis Taklim.* Jakarta, Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta

Impres No 1 Tahun 1994,15 April 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Indra, Hasbi dkk. (2004): *Potret Wanita Shalehah.* Jakarta, Penamadani

Johar. (2008): *Kurikulum yang mencerdaskan. Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif* . Jakarta, Penerbit Buku Kompas

Kabupaten Tabanan Dalam Angka Tahun 2004/205, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan .

Kartasasmita, Ginanjar (1996): *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta, Cides

Kettani, M. Ali (2005): *Muslim Minoritas di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta, Raja Grafindo Persada

Lexy J., Moleong (1999): *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosdakarya, cet-10.

Mahfudh, MA Sahal. (2004): *Nuansa Fiqh Sosial.* Yogyakarta, LKiS

PUSLITBANG PENDIDIKAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Margono, S. (2004): *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta, Rineka Cipta

Mas'udi, Masdar F. (1985): "Mengenal Pemikiran Kitab Kuning"*,* M. Dawam Rahardjo (editor), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah.* Jakarta, P3M,

Mastuhu. (1994): *Dinamika sistem Pendidikan Pesantren.* Jakarta, INIS

Melly, G Tan (1997): *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta, Yayasan Obor

Miarso. Yusufhadi. (1999): *Pendidikan Alternatif Sebuah Agenda Reformasi.* Jakarta, Jurusan Teknologi Pendidikan UNJ

Moloeng, Lexy J. (2009): *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung, PT. Ramaja Rosda Karya

Munir, Khadijah (2007): *Peningkatan Peran Serta Masyarkat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim, di sampaikan dalam seminar: Kajian masalah aktual keagamaan dan kerukunan umat beragama*, Makalah Seminar, 22 Maret 2007.

Murttadho, M. *Potensi Majelis Taklim Sebagai Sarana Pendidikan Luar Sekolah*, Jakarta, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Departemen Agama RI

Nawawi, Hadari dan Nini Martini (1996): *Penelitian Terapan.* Yogyakarta, Gajah Mada University Press

Nugraha, Abi S. Ed, (2015): *Mendidik tanpa Pamrih : Kisah Para Pejuang Pendidikan Islam*. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Peraturan pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

PP Rippnas, Kementerian Pemberdayaan Wanita, (Jakarta, Memperta, 2002-2004)

Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI (2005): *Studi Kelompok Keagamaan Minoritas di Berbagai Daerah*

Puslitbang pendidikan Agama dan Labsosio UI (2010): *Laporan Hasil Penelitian Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan pada Kelompok Khusus*. Jakarta, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Qomar, Mujamil (2005): *Pesantren, dari transformasi metodologi menuju demokratisasi institusi.* Jakarta, Penerbit Erlangga

Rahim, Husni (2001): *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta, Logos

Raphaela, Dewantari (2001): *Pendekatan Pemberdayaan*, Makalah yang disampaikan pada kuliah program MPS UI,

Ratnawati, G. (2010): *Pola Pembinaan NAPI Anak Sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.* Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Rosyada, Dede (2005): *Pendidikan Keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Makalah disampaikan paa Workshop"*Pengembangan Lembaga Pendidikan Keagamaan*", Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta-Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 27 Juli 2005

Saidi, HM Shaleh dan Drs. Yahya Anshori (1979): *Sejarah Keberadaan Ummat Islam di Bali.* Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan MUI propinsi Bali bekerjasama dengan Pemda Tk.I Bali tahun

Saidi, HM Shaleh (1996): *Perkembangan Akulturasi Islam dan Hindu di Bali*. Dalam Aswab Mahasin (ed.): *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa*: Jakarta, Yayasan festival Jakarta,

Salman, Ismah (2000): *Mitra Sejajar Wanita dan Pria dalam Pembangunan*, Jurnal Dakwah, Vol. 2, No. 1, Juli 2000

Silawaty, I., & Ramdhan, M. (2007): *Peran agama terhadap penyesuaian diri narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan*. JPS,

Strauss, Anselm & Juliet Corbin. (1988): *Basics of Qualitative Research*. Chicago, University of Cichago Press.,

Sugiyono (2008): *Metode penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung, Alfabeta

Sutarman, S (1991): *Pembinaan Keagamaan Narapidana; Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung*. Jakarta, Balai Litbang dan Kemasyarakatan Departemen Agama RI

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Syafi'i, Ahmad (1991): *Pembinaan Keagamaan Narapidada di Lembaga Pemasayarakatan*. Jakarta, Balai Litbang dan Kemasyarakatan Departemen Agama RI

Tilaar, H.A.R. (1998*): Beberapa Agenda reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. Magealang, Penerbit Tera Indonesia

Tolhah, Mohammad Hasan (1997): Makalah Sarasehan Pimpinan Pondok Pesantren dan Pemda Tingkat I Jatim, 2 Pebruari 1997

Turmudzi, Endang (2004): *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*. Yogyakarta, LkiS

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

UU Nomor12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Wawancara dengan Ahmad Yani, Sekretaris MUI Kabupaten Cianjur, pada 6 Februari 2013

Wawancara dengan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas kelas II B Cianjur, Mastur SH, pada 4 Februari 2013

Wawancara dengan KH Totoy Mukhtar Gozali dan para Ustadz, Pengasuh Pesantren Attaubah, 3 Februari 2013

Wawancara dengan para Warga Binaan LP Kelas II B Cianjur, 3 – 6 Februari 2013

Wawancara dengan Rais 'Am pesantren sekaligus santri, Heri Sukirman, SH, 5 Februari 2013

Widodo, Sembodo Ari dkk. (2003): *Struktur Keilmuan Pesantren : Studi Komparatif antara Pesantren*

PUSLITBANG BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Tebuireng Jombang dan Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Dir. Perguruan Tinggi Agama Islam : Jurnal Istiqro', Vol. 2,

Wirawan Sarwono, Sarlito (1994): *Psikologi Remaja.* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Wirawan, AA Bagus (1996): *Akulturasi Islam-Hindu; Tinjauan Historis*. dalam Aswab Mahasin (ed.) *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa*: Jakarta, Yayasan festival Jakarta,

Yaqin, M Ainul (2005), *Pendidikan Multi Kultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Pilar Media, Yogyakarta,

Yuanita. Rani (2011): *Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan Agama sebagai Upaya Mencegah Munculnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta*. Disertasi Fakultas Ilmu Sosial UNY

Zakaria, Rusydy (1991): *Pembinaan Keagamaan Narapidana; Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung*. Jakarta, Balai Litbang dan Kemasyarakatan Departemen Agama RI

Zarkasyi, Hamid Fahmi. (2007): *Pengembangan Institusional dan Kurikuler Pesantren Salafiyah,* Makalah "Seminar Pengembangan Pesantren Salafiyah" yang diselenggarakan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, tanggal 8-10 Juni 2007

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

113, 116-117, 119, 121-126, 128-145, 147, 162-166, 172-176, 178, 182, 215, 247-251, 253-254, 261
Salafiyah, 23, 70, 74, 102, 125, 247-248, 254, 259, 261
santri, xi, 24, 35, 69, 96, 131, 142, 193-195, ix
sekolah, 27, 50-51, 68, 78, 87, 93, 98, 102, 113, 118, 125, 128, 133-134, 139, 142, 158, 167-169, 173, 179, 182, 186, 189, 199, 213, 215-222, 224-226, 228-236, 238-243, 247, 250
sorogan, 35, 72, 75, 82, 87-88, 95-96, 104, 108, 125, 164, 258
TKA/TPQ, 162, 177, 194
tradisional, 67, 69-70, 96, 109, 193, 217, 226, 259
ustadz, xi, 18, 22, 34, 44, 51-53, 55, 57-58, 60, 63, 78-80, 88, 95-96, 100, 127, 131-132, 135, 140, 143-148, 158, 162, 164-165, 171, 174, 176, 187, 193-194, 199, 249, 253, ix
Warga Binaan, 4-5, 8-9, 12, 16, 24, 251, 253, ix
wetonan, 88

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

GLOSARIUM

Wetonan atau Bandongan

Sistem pembelajaran pesantren dimana kyai membacakan dan menjelasakan sebuah kitab dan santri dengan cermat memperhatikan dan mencatatnya.

Sorogan

Sistem pembelajaran pesantren dimana santri membacakan kitab di depan kyai yang kemudian dikoreksi.

Mu'tabarah

Sesuatu yang dianggap sah dan diakui dalam sebuah kajian keilmuan.

Kitab Kuning

Kitab-kitab berbahasa arab yang biasa digunakan di pesantren sebagai bahan pelajaran.

Yasinan

Tradisi umat Islam dalam membaca Surat Yasin dalam waktu dan acara tertentu yang biasanya diiringi dengan shalawat dan doa.

Mutakharrajin

Sebutan peserta didik yang telah menamatkan pendidikan di pesantren.

Bisyarah

Sumbangan/infak yang diberikan oleh santri untuk operasional pesantren

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Lalaran

Aktivitas mengulang-ulang hafalan baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok

Salafiyah

Sistem pendidikan pesantren tradisional yang hanya mempelajari ilmu-ilmu agama dan kitab-kitab klasik biasa dilakukan secara non klasikal.

Khalafiyah

Sistem pendidikan pesantren modern yang menyatukan pembelajaran ilmu agama dan ilmu umum yang disertai metode-metode modern dalam pembelajaran

Barzanji atau Dibaan

Suatu doa-doa, shalawat, pujian-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad Saw yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika kelahiraan, khitanan, pernikahan atau maulid Nabi Muhammad SAW.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

BIODATA PENULIS

Ta'rif, S.Ag, MA, dilahirkan di Indramayu 2 April 1975. Sejak 2005 bekerja sebagai peneliti (PNS) di Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan konsentrasi kajian pendidikan non formal dan informal. Pendidikan di mulai dari MI dan MTs Swasta di selesaikan di daerah kelahirannya, Indramayu, sejak 1991 sampai 1994 belajar di Madrasah Aliyah Al-Ishlah Bobos Cirebon. Pendidikan Sarjana S1 diselesaikan di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat tahun 1998, S2 Program Studi Kajian Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Penulis sempat mengenyam pendidikan pesantren di Cirebon. Akhir Tahun 2014 penulis berkesempatan mengikuti program *Short Course* di Goethe Universitat Frankfurt Jerman.

Sejumlah pendidikan dan pelatihan diikuti penulis antara lain: Diklat Fungsional Peneliti Pertama di Pusbindiklat LIPI tahun 2007, Diklat Fungsional Peneliti Pendidikan Agama dan Keagamaan yang diselenggarakan Pusdiklat Tenaga Teknis Balitbang dan Diklat Tahun 2008, Diklat Fungsional

Peneliti tingkat lanjutan oleh Pusbindiklat LIPI tahun 2015. Karya Tulis yang pernah terpublikasikan di Jurnal antara lain: *Memaksimalkan Potensi EI dan AQ dalam Kelas* (2006), *Kompetensi Guru Madrasah Diniyah* (2007), *Pelayanan Pendidikan Keagamaan Komunitas Muslim Minoritas Bali* (2008), *Pemberdayaan Perempuan di Majelis Taklim* (2009), *Orientasi Pendidikan Salafiyah: Studi Kasus Pesantren Benda Kerep Cirebon* (2012).*Pendidikan Islam Altenatif: Studi Kasus SD Plus Islamic Center Manado* (2013), *Model Pembinaan Keagamaan di Lapas Kelas II B Cianjur* (2015). E-mail: ta75rif@gmail.com.

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Buku dihadapan pembaca ini merupakan kumpulan dari berbagai tulisan penulis yang diolah dari hasil laporan penelitian selama bekerja sebagai peneliti di bidang pendidikan keagamaan nonformal dan informal pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Selain itu, tulisan buku ini juga diolah dari beberapa tulisan penulis yang telah diterbitkan dalam Jurnal Edukasi. Hadirnya buku ini diharapkan menjadi dorongan penulis untuk selalu berkarya dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia.

Isi buku ini terbagi ke dalam tujuh tema. *Bagian pertama* membahas tentang *Geliat Keagamaan Pesantren Lembaga Pemasyarakatan Cianjur*; *Bagian Kedua* membahas tentang *Pemberdayaan Perempuan pada Komunitas Majelis Taklim; Bagian Ketiga* menguraikan tentang *Pesantren APIK Kaliwungu Kendal Melawan Arus Pendidikan Global; Bagian Keempat* membahas *Pembinaan Pendidikan Anak Jalanan di Pesantren Fathul Khair Cimanggis Depok*; *Bagian Kelima* menguraikan tentang *Formulasi Keberagamaan Muslim Minoritas di Tabanan Bali*; *Bagian Keenam* menguraikan tentang *Merancang Masa Depan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini*; dan yang terahir *Bagian Ketujuh* mengkaji tentang *Belajar Pendidikan Islam Alternatif Pada SD Plus Islamic Center Manado*.

ISBN 978-602-61574-0-9

9 786026 157409

Pustaka cendekiamuda